

PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN PARIWISATA
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Supriyono, M.Si.

**PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN PARIWISATA
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

EDITOR

Sarjiyanto, S.E., MBA., Ph.D., CPDS



**Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata
Yang Berwawasan Lingkungan**

Copyright © 2023

ISBN : 978-623-378-646-1

Penulis:

Dr. Supriyono, M.Si.

Penyunting Naskah: Sarjiyanto, S.E., MBA., Ph.D.,CPDS

Penata Letak: Desita

Ilustrasi Isi: Mubin YP

Penata Sampul: Mubin YP

Cetakan Pertama, November 2023

Diterbitkan oleh **Oase Pustaka**

Anggota IKAPI 241/JTE/2022

Jl Palur Wetan Palur Mojolaban Sukoharjo

Sukoharjo

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya ,sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul **“Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan”**.

Buku ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca kaitannya dengan ilmu ekonomi dan pariwisata yang memiliki wawasan lingkungan .Untuk itu dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Buku ini.

Buku ini berisi tentang konsep dasar perusahaan yang merupakan elemen penting



dalam sebuah bisnis. Buku ini juga memaparkan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pariwisata, dimana diantara ketiganya akan saling berkaitan. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang elemen-elemen yang mendukung untuk perkembangan lingkungan pariwisata serta implementasi dan peran pemerintah dalam tata kelola lingkungan pariwisata.

Akhir kata kami berharap semoga buku dengan judul **“Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan”** ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Surakarta, November 2023

Penulis

Dr. Supriyono, M.Si.



DAFTAR ISI

BAB I KONSEP DASAR TATA KELOLA.....	1
A. Konsep Dasar Tata Kelola.....	2
B. Prinsip Tata Kelola Lingkungan dalam Pariwisata.....	28
C. Implentasi Tata Kelola	48
BAB II HUBUNGAN ANTARA EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN PARIWISATA.....	60
A. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi...	60
B. Dampak Lingkungan dari Pariwisata	70
C. Integrasi Ekonomi dan Lingkungan dalam Pariwisata.....	80
D. Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	112
BAB III PRINSIP TATA KELOLA PARIWISATA LINGKUNGAN HIDUP	117
A. Prinsip Tata Kelola Pariwisata Lingkungan Hidup	118
B. Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.....	141
C. Keterlibatan Komunitas	169
D. Transparansi dan Akuntabilitas	180
E. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan...	184
F. Peran Sektor Swasta	197



BAB IV INSTRUMEN TATA KELOLA LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA	205
A. Sertifikasi Lingkungan dalam Industri Pariwisata.....	205
B. Regulasi Lingkungan dalam Pariwisata....	221
C. Audit Lingkungan	239
BAB V IMPLEMENTASI TATA KELOLA LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA	252
A. Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Lingkungan Pariwisata.....	252
B. Manajemen Destinasi Wisata Berkelanjutan.....	264
C. Partisipasi Masyarakat Lokal	291
D. Tantangan dan Peluang Masa Depan.....	301
BAB VI EVALUASI DAN MONITORING	310
A. Evaluasi Lingkungan dalam Pariwisata....	310
B. Penilaian Risiko	322
C. Pemetaan Sumber Daya	330
D. Monitoring Lingkungan dalam Pariwisata	334
E. Tindakan Korektif dan Perbaikan	343
Daftar Pustaka	350



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian	62
Tabel 4.2 Kontribusi dalam Pengembangan SDGs	137
Tabel 4.3 Kriteria Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	272
Tabel 4. 4 Dampak Positif	316
Tabel 4. 5 Pemetan Sumber Daya.....	330



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata.....	65
Gambar 2. 2 Aspek-Aspek Dalam Pariwisata Berkelanjutan	277
Gambar 2. 3 Tiga pandangan konsep persepsi risiko pariwisata	323





KONSEP DASAR TATA KELOLA

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah bisnis. Tata kelola perusahaan yang baik membantu tercapainya pengelolaan perusahaan yang transparan kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham. Istilah tata kelola perusahaan diartikan sebagai upaya untuk menerapkan cara terbaik dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan dengan sistem pengendalian, peraturan, dan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan dan peraturan ini digunakan untuk mengendalikan manajemen. Pengendalian manajemen dilakukan melalui pemantauan yang terfokus terhadap perilaku manajemen sehingga dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan (pemilik)



atau bagi dirinya sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya istilah tata kelola perusahaan yang baik. Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi atau nilai bisnis.

A. Konsep Dasar Tata Kelola

1. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (The Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)

a. Tentang OECD

1) Sejarah OECD

Organisasi OECD muncul setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1961. Pada awalnya, organisasi ini dikenal sebagai OEEC (*Organization for European Economic Cooperation*) dan difokuskan pada negara-negara Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara di luar Eropa juga bergabung, sehingga akhirnya organisasi ini menjadi yang dikenal sekarang sebagai OECD.

Berawal dari inisiatif George Marshall, seorang pemenang Nobel Perdamaian dari Amerika Serikat, untuk membantu pemulihan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Inisiatif ini dikenal sebagai Marshall Plan.

Amerika Serikat memberikan bantuan ini ditujukan kepada negara Eropa



yang mengalami kerugian akibat perang. Amerika Serikat berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pembangunan jangka panjang. Inisiatif ini kemudian berkembang menjadi organisasi OEEC pada bulan April 1948.

Setelah pembaruan menjadi OECD, organisasi ini terutama berfokus pada isu-isu ekonomi, termasuk perdagangan bebas, pasar terbuka, dan industrialisasi. Mereka juga mempertimbangkan masalah seperti pengurangan kemiskinan, dukungan bagi wirausaha, pengembangan teknologi terkini, investasi, stabilitas keuangan, dan lain sebagainya.

2) Latar Belakang

Pembentukan OECD didorong oleh faktor-faktor ekonomi yang beragam yang memengaruhi negara-negara anggotanya. Setiap negara memiliki tantangan unik dalam mengelola ekonominya, baik dari segi internal maupun eksternal. Masalah-masalah ini bisa berkaitan dengan manajemen perusahaan, investasi, ekonomi digital, dan banyak lagi.



Oleh karena itu, OECD bertujuan untuk memberikan kerjasama dan dukungan kepada negara-negara yang membutuhkan. Dengan aturan dan partisipasi anggota yang terstruktur, masalah ekonomi ini dapat diatasi melalui negosiasi, identifikasi masalah, dan pencarian solusi bersama. Keputusan yang diambil selalu disesuaikan dengan kebijakan yang relevan.

3) Misi OECD

Misi utama OECD adalah mendorong penerapan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di negara-negara maju.

4) Tujuan OECD

Tujuan inti dari OECD adalah meningkatkan perekonomian global dan mendukung perdagangan internasional. Ini memberikan kesempatan bagi pemerintah berbagai negara untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk masalah bersama. Kerjasama ini melibatkan negara-negara demokratis yang memiliki komitmen yang serupa untuk



meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5) Fokus OECD

Fokus utama OECD adalah membantu pemerintah di seluruh dunia mencapai hal-hal berikut:

- a) Membangun kepercayaan dalam pasar dan institusi yang mendukung fungsi pasar.
- b) Menjaga keuangan publik yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
- c) Mendorong pertumbuhan melalui inovasi, strategi yang ramah lingkungan, dan keberlanjutan di negara-negara berkembang.
- d) Memberikan sumber daya kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan agar menjadi produktif.

b. Konsep Tata Kelola OECD

Definisi tata kelola menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yaitu fokus pada hubungan antara para pemangku



kepentingan (stakeholders) serta hak dan tanggung jawab yang terkait, berikut adalah definisi GCG yang umumnya digunakan oleh OECD:

“Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan bisnis. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjelaskan aturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan dalam urusan perusahaan. Dengan melakukan hal ini, juga menyediakan kerangka kerja di mana tujuan perusahaan ditetapkan, serta cara mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja”

Prinsip-prinsip corporate governance yang diterbitkan oleh OECD ini melibatkan aspek-aspek berikut:

- 1) Pembangunan landasan hukum yang diperlukan untuk menerapkan good



corporate governance dengan efektif ((*ensuring the basis for an effective corporate governance framework*))

Ini penting karena tanpa landasan hukum yang kuat, tujuan utama good corporate governance untuk melindungi hak pemegang saham dan pihak-pihak terkait sulit terwujud.

Landasan hukum mencakup pembuatan undang-undang perseroan terbatas, undang-undang perburuhan, undang-undang tentang kredit perbankan, standar akuntansi keuangan dan audit, serta prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek.

OECD merekomendasikan komunikasi dan konsultasi dengan perusahaan lokal saat menyusun undang-undang atau peraturan hukum terkait good corporate governance. Pemerintah juga disarankan untuk memantau penerapan prinsip-prinsip ini di dunia bisnis negara mereka dan melakukan dialog dengan asosiasi profesional dan pengusaha sebelum mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru.



- 2) Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (*the rights of shareholders and key ownership functions*)

Hak-hak pemegang saham dan fungsi penting kepemilikan perusahaan harus dijaga dan dilindungi, baik secara hukum maupun oleh perusahaan itu sendiri. Ini mencakup hak pemegang saham untuk menjual saham mereka, menerima dividen, dan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham.

- 3) Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang memiliki jenis saham yang sama harus diperlakukan secara sama. Sebelum membeli saham di bursa efek, investor berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan saham yang akan mereka beli.

- 4) Peranan *the stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*)



Prinsip ini menekankan perlindungan hak dan kepentingan para pemangku kepentingan non-pemegang saham, seperti karyawan, kreditur, pelanggan, dan pemasok. Kesuksesan operasi bisnis perusahaan sangat bergantung pada kerjasama dengan para pemangku kepentingan ini.

- 5) Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan (*disclosure and transparency*)

Perusahaan diharuskan untuk melakukan pengungkapan informasi dengan transparan kepada pemegang saham. Ini mencakup melaporkan secara akurat dan tepat tentang kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis, dan informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi perusahaan.

- 6) Tanggung jawab Dewan Pengurus (*the responsibilities of the Board*)

Dewan Pengurus (Board of Directors) memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, seperti hukum perpajakan, perburuhan, persaingan, perkreditan, lingkungan, dan keselamatan kerja. Dewan Pengurus terdiri dari dua



lapisan di banyak negara, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing dengan peran dan tanggung jawabnya sendiri. Bab selanjutnya akan membahas lebih detail mengenai fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengurus dalam konteks corporate governance.

2. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF)

a. Tentang IMF

1) Sejarah IMF

IMF dibentuk pada tahun 1944 setelah Konferensi PBB di Bretton Woods, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 45 negara. Tujuan utama dari kerja sama ekonomi ini adalah untuk mencegah terulangnya depresi besar seperti yang terjadi pada tahun 1930.

Beberapa negara saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang serius, yang mengakibatkan mereka menerapkan kebijakan hambatan impor. Sayangnya, kebijakan tersebut justru memperburuk keadaan ekonomi, dan beberapa negara tidak mampu bertahan.



Sejumlah perwakilan negara menghadiri Konferensi Bretton Woods untuk membahas perjanjian yang akan mengawasi sistem moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, dan menghilangkan pembatasan pertukaran valuta asing. Akhirnya, pada Desember 1945, IMF didirikan secara resmi dengan 29 negara sebagai anggota pendiri.

2) Tujuan IMF

IMF memiliki beberapa tujuan utama, termasuk:

- a) Memantau perkembangan ekonomi dan kebijakan di negara-negara anggota, memberikan saran mengenai kebijakan yang lebih tepat.
- b) Memberikan bantuan finansial kepada negara-negara anggota, kadang-kadang dalam bentuk pelatihan terkait masalah keuangan.
- c) Mengadakan pertemuan tahunan anggota untuk membahas isu-isu ekonomi dan kebijakan.

3) Tugas Utama IMF

IMF bertugas untuk mempromosikan kerja sama moneter internasional di antara negara-negara anggota. Selain



itu, IMF memiliki beberapa tugas utama, termasuk:

- a) Memberikan fasilitas untuk mendorong perdagangan internasional yang seimbang.
- b) Mengedepankan stabilitas nilai tukar mata uang internasional.
- c) Membantu dalam pembentukan sistem pembayaran multilateral.
- d) Memberikan bantuan finansial dengan sistem safeguard yang berkualitas kepada negara anggota yang mengalami masalah ekonomi atau neraca pembayaran.
- e) Dalam jangka panjang, berusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh dunia.

4) Peran dan Fungsi IMF

IMF memiliki peran dan fungsi penting dalam perekonomian global, yang meliputi:

- a) Pemberian Pinjaman dan Dukungan Finansial: IMF memainkan peran utama dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan keuangan. Pinjaman ini seringkali disertai dengan



persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh negara penerima, seperti melaksanakan reformasi ekonomi yang diperlukan.

- b) **Pemantauan Ekonomi Global:** IMF secara teratur menganalisis kondisi ekonomi global dan menerbitkan laporan yang memberikan wawasan tentang tren ekonomi di seluruh dunia. Laporan ini membantu negara-negara untuk memahami dampak kebijakan ekonomi mereka terhadap perekonomian global dan memberikan panduan bagi tindakan yang perlu diambil.
- c) **Konsultasi dengan Negara Anggota:** IMF melakukan konsultasi rutin dengan negara-negara anggotanya untuk membahas kebijakan ekonomi mereka. Selama konsultasi ini, IMF memberikan saran tentang cara meningkatkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan.
- d) **Penyedia Data dan Statistik:** IMF mengumpulkan data ekonomi dari negara-negara anggotanya dan menyediakan data dan statistik ekonomi yang dapat diakses oleh publik. Data ini penting untuk



pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ekonomi global.

- e) Pendidikan dan Pelatihan: IMF menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Program ini membantu para pemangku kepentingan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola ekonomi mereka dengan lebih efektif.

Dengan peran-peran ini, IMF berusaha untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global, mengatasi krisis ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia.

b. Konsep Tata Kelola IMF

Terkait dengan peran utama IMF dalam konteks moneter dan stabilitas keuangan global, IMF tidak menguraikan dengan rinci mengenai tata kelola sektor publik, tetapi lebih fokus pada konsep tata kelola secara makroekonomi. Menurut IMF, tata kelola makroekonomi merujuk pada konsep yang mencakup pengelolaan



keseluruhan negara, termasuk pengaturan kebijakan ekonomi dan kerangka hukum serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. IMF berpandangan bahwa tata kelola yang buruk dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan umum. Salah satu contoh dari tata kelola yang buruk adalah korupsi, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. IMF lebih lanjut menyatakan bahwa korupsi dapat mengancam integritas pasar, menghambat persaingan yang sehat, dan merugikan pertumbuhan ekonomi. IMF menganggap bahwa masalah tata kelola yang buruk adalah salah satu penyebab utama krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Oleh karena itu, IMF telah mengeluarkan pedoman yang disebut "Peran IMF dalam Isu Tata Kelola," yang berisi kebijakan mengenai bagaimana mengatasi masalah tata kelola ekonomi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan sebagai pijakan. Secara lebih khusus, pendekatan IMF terhadap tata kelola disesuaikan dengan perannya dalam



mengawasi kebijakan makroekonomi negara-negara anggota, yang meliputi:

- 1) transparansi keuangan negara;
- 2) efektivitas manajemen sumber daya publik;
- 3) stabilitas dan transparansi lingkungan ekonomi dan regulasi untuk sektor swasta.

Bagaimanapun juga, tujuan akhir dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh IMF adalah untuk membentuk kebijakan ekonomi yang dapat mencegah dan menghilangkan praktik-praktik ekonomi yang merugikan melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas institusi dan administrasi negara-negara anggota.

IMF memiliki fokus utama pada stabilitas makroekonomi, kelangsungan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, keterlibatan IMF dalam urusan pemerintahan harus dibatasi pada aspek ekonomi dari tata pemerintahan. Kontribusi IMF terhadap tata kelola yang baik, termasuk upaya pencegahan praktik korupsi, biasanya muncul dalam dua bidang utama:

- 1) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Publik



IMF membantu negara-negara anggotanya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya publik melalui reformasi yang melibatkan lembaga-lembaga sektor publik seperti perbendaharaan, bank sentral, perusahaan publik, layanan sipil, dan fungsi statistik resmi. Ini mencakup pembenahan prosedur administratif seperti pengendalian pengeluaran, pengelolaan anggaran, dan pengumpulan pendapatan. IMF memberikan nasihat kebijakan dan bantuan teknis untuk membantu negara-negara melakukan perubahan ini.

2) Dukungan Terhadap Lingkungan Perekonomian yang Stabil dan Transparan

IMF mendukung pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perekonomian yang transparan dan stabil. Ini menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan sektor swasta yang efisien. Contoh upaya dalam hal ini melibatkan sistem harga yang adil, rezim pertukaran dan perdagangan yang sehat, serta sistem perbankan dan regulasi terkaitnya yang memadai. IMF membantu negara-negara dalam



merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang mendukung lingkungan tersebut.

Melalui saran kebijakan dan bantuan teknisnya, IMF berusaha untuk meningkatkan tata kelola ekonomi dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan transparan. Hal ini membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan sektor swasta yang kuat. IMF juga berkontribusi dalam upaya mencegah praktik korupsi dengan mempromosikan praktik-praktik pemerintahan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

2. Bank Dunia (*World Bank*)

a. Tentang World Bank

1) Sejarah World Bank

Bank Dunia didirikan pada tanggal 1 April 1944 dalam konferensi moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, meskipun baru mulai memberikan pinjaman untuk rekonstruksi Eropa Barat setelah Perang Dunia II pada bulan Juni 1946. Pada pertengahan tahun 1950-an, Bank Dunia mulai berperan dalam investasi



infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia terdiri dari lima lembaga konstituen, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), The International Finance Corporation (IFC), The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

2) Lembaga di Bawah World Bank

Di bawah payung Bank Dunia, terdapat lima lembaga keuangan lainnya yang memiliki peran masing-masing:

- a.) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) memberikan pembiayaan utang kepada pemerintahan berpenghasilan menengah.
- b.) International Development Association (IDA) memajukan pembangunan ekonomi dengan memberikan dana pinjaman tanpa bunga yang lebih fleksibel dan ringan dari pasar modal kepada negara anggota IDA yang kurang maju atau miskin.



- c.) International Finance Corporation (IFC) membantu sektor swasta di negara berkembang melalui layanan konsultasi, investasi, dan pengelolaan aset.
 - d.) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) mempromosikan investasi asing di negara berkembang dengan memberikan jaminan berupa asuransi risiko politik dan peningkatan kredit kepada investor dan pemberi pinjaman.
 - e.) International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menyelesaikan sengketa antarnegara terkait investasi internasional dan mengelola arbitrase.
- 3) Fungsi World Bank
- a) Bank Dunia berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan dukungan kepada pemerintah yang memenuhi syarat melalui berbagai jenis pembiayaan seperti pinjaman berbunga rendah, kredit tanpa bunga, hibah, dan infus tunai. Dukungan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi publik, infrastruktur, dan lainnya. Selain itu, Bank Dunia juga



menyediakan saran kebijakan, melakukan penelitian, analisis, memberikan bantuan teknis, dan pelatihan untuk sektor publik dan swasta di negara-negara berkembang, serta mensponsori berbagai proyek pembangunan.

- b) Beberapa proyek yang disponsori oleh Bank Dunia mencakup Proyek Sumber Daya Manusia, Proyek Dukungan Imunisasi Nasional, dan Proyek Pembelajaran untuk Masa Depan. Tujuan Bank Dunia meliputi membantu pembangunan dan rekonstruksi negara, mendorong investasi modal, menstabilkan neraca perdagangan internasional, menyusun proyek pinjaman internasional, dan memengaruhi investasi global untuk mencapai kestabilan ekonomi.

b. Konsep Tata Kelola World Bank

Sesuai dengan misi World Bank untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua penduduk dunia, World Bank menganggap bahwa tata kelola sektor publik yang baik adalah suatu sistem yang memiliki karakteristik berikut:



- 1) Efektif dalam mengalirkan sumber daya ekonomi kepada penduduk miskin.
- 2) Memiliki perangkat institusional yang memungkinkan partisipasi publik dan melindungi kepentingan masyarakat, dengan tujuan mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

World Bank melaksanakan misi ini melalui praktek tata kelola global (*The Governance Global Practice*), yang bertujuan untuk membangun institusi yang terbuka, efektif, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta, mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan yang berkualitas, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan pemberian suara mereka dalam pengambilan keputusan pemerintah sangat penting.

Pentingnya tata kelola yang baik dalam pembangunan ekonomi juga diakui oleh World Bank. Negara yang mampu mengatasi korupsi dan memiliki sistem tata kelola yang efektif dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan dengan lebih efisien. Mereka juga cenderung menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan memiliki



pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik memiliki korelasi positif dengan pendapatan per kapita suatu negara.

Sistem tata kelola yang efektif, yang mencakup perpajakan, penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan integritas, sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya publik kepada masyarakat miskin, serta untuk melindungi dan mewakili kepentingan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, tata kelola yang baik merupakan dasar dari perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.

c. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

a. Tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance*

Berdirinya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) merupakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* berdasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor KEP/31/M.EKUI/08/1999. Pembentukan KNKCG bertujuan untuk menyusun pedoman *Good Corporate Governance*



(GCG) Indonesia bagi dunia usaha agar dapat lebih beradaptasi dengan perkembangan di tingkat global. KNKG didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan melakukan revitalisasi pada KNKCG yang didirikan pada tahun 1999.

Sejak tahun 1999, KNKG telah menerbitkan 11 panduan tata kelola yang baik berupa panduan umum, panduan industri, dan buku pegangan menerapkan GCG. Pedoman umum meliputi Pedoman Umum GCG Indonesia, administrasi publik dan pengelolaan masalah syariah yang baik. Panduan industri termasuk perbankan, asuransi dan reasuransi, konsultasi aktuarial dan Pialang Asuransi dan Reasuransi. Pedoman Penerapan GCG meliputi Etika Bisnis, Komite Audit dan Auditor Independen, serta manajemen risiko.

b. Konsep Tata Kelola Komite Nasional Kebijakan *Governance*

Tata kelola perusahaan adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu bisnis untuk mencapai kemajuan bisnis dan tanggung jawab perusahaan dengan tujuan akhir menciptakan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham secara



berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

Pada dasarnya, tata kelola perusahaan mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan antar pemangku kepentingan perusahaan. Tata kelola perusahaan tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham tetapi juga menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya seperti pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, masyarakat dan komunitas di mana perusahaan beroperasi.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengembangkan mekanisme tata kelola internal perusahaan dan menerapkannya. Perusahaan dapat mengadopsi praktik tata kelola yang sesuai dengan kebutuhannya, menerapkan praktik yang mempertimbangkan lingkungan di mana perusahaan beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat bisnis, serta risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Indonesia mencakup delapan prinsip yang dibagi menjadi tiga kelompok prinsip:

- 1) prinsip pertama merupakan kumpulan prinsip yang mengatur fungsi pengurusan



dan pengawasan perseroan, yaitu direksi dan dewan komisaris,

- 2) prinsip yang mengatur proses dan hasil yang dihasilkan oleh dewan direksi dan dewan pengawas,
- 3) prinsip yang mengatur pemilik sumber daya yang akan memperoleh manfaat utama dari penerapan tata kelola perusahaan.

Prinsip-prinsip tersebut dan turunannya diilhami oleh empat pilar tata kelola perusahaan, yaitu: perilaku etis, akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan. Mencerminkan empat pilar prinsip tata kelola perusahaan di Indonesia akan mendorong penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Berikut empat pilar tata kelola perusahaan:

1) Perilaku etis

Dalam proses menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan selalu mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun dan menjaga nilai-nilai etika serta kepercayaan yang senantiasa. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan dan dikelola secara



independen sehingga setiap instansi dalam perusahaan tidak mendominasi departemen lain dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain.

2) Tanggung jawab

Dunia usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya secara transparan dan adil. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingannya, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3) Transparan

Untuk menjaga objektivitas dalam mengelola operasionalnya, perusahaan menyediakan informasi penting dan relevan dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan secara proaktif mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh hukum tetapi juga hal-hal penting dalam pengambilan keputusan pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

4) Keberlanjutan



Perusahaan mematuhi peraturan hukum dan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang konsisten dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

B. Prinsip Tata Kelola Lingkungan dalam Pariwisata

1. Tata Kelola Lingkungan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan jelas menyebutkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup, melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,



pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, konservasi dan kesinambungan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, zona ekologi, keanekaragaman hayati, imbalan pencemar, partisipasi, kearifan lokal, tata kelola yang baik. dan otonomi daerah.

Pada bagian penjelasan UU PPLH disebutkan dengan jelas bahwa “asas partisipatif” artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari “asas kearifan lokal” adalah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam pola hidup masyarakat. Prinsip “tata kelola yang baik” berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Konsep tata kelola lingkungan hidup atau yang bisa disebut *environmental governance*



memandang negara dan masyarakat sebagai objek dan subjek dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Negara sebagai organisasi yang menguasai sumber daya dan kekuasaan mempunyai kemampuan untuk mengubah kondisi alam secara besar-besaran. Oleh karena itu, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengatur perilakunya sesuai dengan hukum ekologi. Melalui konsep tata kelola ini, *environmental governance* dipahami sebagai kerangka pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksi dengan masyarakat. Namun penting untuk diingat bahwa peran negara di sini adalah untuk memastikan bahwa arah dan tingkat perubahan sesuai dengan kemampuan ekosistem, bukan kemampuannya untuk mengubah kondisi bio-fisik.

Environmental governance perlu dibangun berdasarkan prinsip sentral bahwa sistem sosial dan ekologi selalu terlibat dalam interaksi yang tiada akhir (aksi-reaksi). Interaksi antar kelompok pembangunan dalam konsep governance telah menjadikan hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta menjadi setara. Tata kelola dalam konsep environmental governance



digunakan untuk memahami dan mengelola keterkaitan antara sistem sosial dan ekologi. Menurut Machmud Syahrul, konsep penegakan hukum lingkungan hidup di UUPPLH meliputi penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum administratif
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
 - 2) Melaksanakan penegakan pemungutan pajak
 - 3) pencabutan izin usaha (penutupan usaha) oleh otoritas pemberi izin
 - 4) Pelaksanaan audit lingkungan hidup secara wajib oleh Menteri Lingkungan Hidup
- b. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam bentuk
 - 1) Menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui perundingan
 - 2) Mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase
 - 3) dibandingkan menyelesaikan sengketa di pengadilan melalui proses perdata
- c. Konsep penerapan hukum pidana dalam bentuk
 - 1) Pelanggaran material
 - 2) Pelanggaran formill



- 3) Kejahatan Korporasi
- 4) Tindakan tata tertib
- 5) Tindakan pidana lingkungan merupakan kejahatan kejahatan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya *environmental governancedi* pahami sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pelestarian lingkungan. Pentingnya tata kelola yang baik, karena tata kelola yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan tata kelola tercapai.

Pemerintahan yang berhasil mencapai tata kelola yang baik belum tentu memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik masih memerlukan persyaratan tambahan, yaitu menghubungkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi. sehingga kita dapat berbicara tentang pengelolaan lingkungan yang baik

Tata kelola lingkungan yang baik merupakan kegiatan penting untuk menjamin keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Kegiatan ini memerlukan transparansi yang sistemik pada



institusi, kebijakan dan program lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. *Environmental Governance* merupakan kerangka penyelenggaraan negara melalui interaksi dengan warga negara, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Sonny kerap menekankan bahwa ada hubungan erat antara pemerintah yang baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Tata kelola yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan yang baik mencerminkan tingkat tata kelola yang baik. Intinya, tanpa tata kelola yang baik maka sulit mengharapkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penerapan tata kelola yang baik memerlukan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah benar-benar efektif dalam pemerintahannya. Sebab selama pemerintahan lemah dan tidak efektif maka kekuasaan pemerintah dapat menjadi alat untuk yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga merugikan kepentingan seluruh rakyat. *Kedua*, Menjamin tata pemerintahan yang baik, Pemerintah harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Artinya, setiap



penyelenggara pemerintahan harus memberikan contoh yang baik dengan menaati hukum. Tanpa penghormatan terhadap hukum, maka tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum, maka pemerintahan yang baik tidak dapat terjamin. *Ketiga*, pemerintah harus menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin kepentingan bersama semua orang. Artinya, pemerintah wajib bersikap netral dan adil dengan memperlakukan seluruh masyarakat secara setara di hadapan hukum dan berdasarkan undang-undang yang ada. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dengan cara melanggar hukum untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dapat dihindari.

Keempat, untuk menjamin semua itu, diperlukan perangkat kelembagaan demokratis yang dapat beroperasi secara efektif. Tata kelola dikatakan baik apabila sumber daya publik dan urusan publik dikelola secara efisien, efektif, dan partisipatif. Pengelolaan sumber daya publik yang efektif, efisien dan partisipatif memerlukan lingkungan demokrasi yang sehat berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mencapai lingkungan demokrasi yang sehat



diperlukan praktik pemerintahan yang terbuka.

Pada governance ada tiga faktor yang terlibat. *Pertama*, administrasi publik yang mengacu pada organisasi pemerintah. *Kedua*, tata kelola perusahaan mengacu pada dunia bisnis swasta. *Ketiga*, masyarakat sipil atau masyarakat luas. Hubungan ketiga komponen tersebut harus berada pada posisi seimbang, sinergis, dan saling mengawasi. Ada beberapa prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Yang pertama adalah prinsip *Good Environmental Governance* menurut Belbase yang terdiri dari tujuh indikator, yaitu sebagai berikut:

a. Supremasi hukum

Negara hukum merupakan suatu cara untuk mengatur warga negara agar patuh pada peraturan atau undang-undang yang ada. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai keleluasaan tertentu dalam mengatur kehidupan, bertujuan agar aparat penegak hukum dan masyarakat dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang.

b. Partisipasi dan keterwakilan

Partisipasi merupakan keterlibatan komponen-komponen tata kelola dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, baik materil maupun non materil. Sedangkan



representasi adalah representasi suatu gagasan yang ditangkap oleh indra dalam bahasanya sendiri.

c. Akses terhadap informasi (access to information)

Akses informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat.

d. Transparansi dan akuntabilitas (transparansi dan akuntabilitas)

Transparansi adalah informasi mengenai laporan lapangan, proses pengambilan keputusan, dan hasil keputusan yang dikomunikasikan secara jelas, faktual, dan tanpa kepura-puraan. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu instansi atau organisasi.

e. Desentralisasi

Prinsip desentralisasi adalah kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya.

f. Instansi dan organisasi (instansi, organisasi)

Lembaga dan lembaga merupakan organisasi yang berperan dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi terkait dapat berupa organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.



- g. Akses terhadap keadilan (access to justice)
Artinya digunakan perantara untuk memperoleh wewenang dan hak yang diperlukan.

2. Prinsip Tata Kelola Pariwisata

Pembangunan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, memanfaatkan, melestarikan dan meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata. Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan kualitas lingkungan serta kelestarian pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, isu pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang erat. Pariwisata adalah kegiatan kontak langsung dan keterlibatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat lokal. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata meliputi dampak sosial ekonomi, dampak sosial budaya, dan dampak lingkungan.

Pembangunan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, memanfaatkan, melestarikan dan meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata. Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan kualitas lingkungan



serta kelestarian pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, isu pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang erat. Pariwisata adalah kegiatan kontak langsung dan keterlibatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat lokal. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata meliputi dampak sosial ekonomi, dampak sosial budaya, dan dampak lingkungan.

Dampak pengembangan pariwisata terhadap lingkungan adalah membuang sampah sembarangan (selain menimbulkan bau tidak sedap juga mematikan pepohonan di sekitar); Mengolah limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang mencemari sumber air sungai, danau, dan laut; kerusakan terumbu karang karena nelayan tidak lagi memiliki pantai untuk mencari ikan karena pantai tersebut telah dibuka untuk membangun hotel dan restoran. Akibatnya, para nelayan kehilangan terumbu karang akibat pengeboman dan akhirnya tidak ada lagi di sana. apakah pantainya lebih menarik; Perambahan hutan yang tidak terkendali, rusaknya sumber daya hayati, hingga hilangnya daya tarik wisata alam.

Hal ini dilakukan dengan terus menjaga kelestarian dan juga upaya mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup, objek



dan daya tarik wisata, serta nilai-nilai budaya nasional yang bermuara pada kemajuan peradaban, peningkatan taraf kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengembangan objek dan destinasi wisata harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan; kehidupan ekonomi, budaya dan sosial; nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat; kelestarian budaya dan kualitas lingkungan; kelangsungan kegiatan pariwisata.

Lingkungan fisik menjadi daya tarik utama kegiatan pariwisata. Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Secara teori, hubungan antara lingkungan alam dan pariwisata harus bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Hubungan antara lingkungan hidup dan pariwisata tidak selalu merupakan simbiosis yang saling mendukung dan menguntungkan, oleh karena itu upaya konservasi, apresiasi dan edukasi dilakukan sedemikian rupa sehingga hubungan keduanya tetap stabil, namun kenyataannya hubungan tersebut tetap ada. antara keduanya justru menimbulkan konflik.



Pariwisata seringkali lebih mengeksploitasi lingkungan alam.

Dampak pariwisata terhadap lingkungan alam merupakan dampak yang mudah dikenali karena nyata. Pariwisata memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

h. Air. Air tercemar akibat pembuangan limbah cair (deterjen laundry hotel) dan limbah padat (sisa makanan tamu). Limbah ini mencemari laut, danau, dan sungai. Air juga tercemar oleh limbah bahan bakar minyak dari transportasi air, seperti dari kapal pesiar. Akibat pembuangan limbah, lingkungan menjadi tercemar, kesehatan masyarakat terganggu, vegetasi perairan berubah dan rusak, nilai estetika air menurun (misalnya warna laut berubah dari biru menjadi hitam) dan perairan tercemar. Jadi makanan laut menjadi berbahaya. Wisatawan tidak bisa berenang karena air laut, danau, dan sungai tercemar. Masyarakat dan wisatawan bersatu untuk memastikan kebersihan perairannya. Untuk meminimalisir pencemaran air maka digunakan angkutan sungai sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan, seperti: perahu dayung, kayak, dan kano.



- i. Atmosfir. Bepergian melalui udara sangat nyaman dan cepat. Namun perjalanan udara berpotensi merusak atmosfer bumi. Gas buang yang dilepaskan ke udara mencemari atmosfer, dan deru mesin pesawat menyebabkan polusi suara. Selain itu, udara tercemar oleh asap knalpot kendaraan jalan raya (mobil, bus) dan kebisingan mesin kendaraan. Akibat polusi udara dan polusi suara, nilai pariwisata menurun, pengalaman menjadi tidak menyenangkan dan berdampak negatif terhadap tumbuhan dan hewan. Inovasi kendaraan ramah lingkungan dan angkutan penumpang udara diterapkan untuk mengurangi polusi udara dan suara. Rekomendasi untuk mengurangi lalu lintas kendaraan bermotor juga dibuat dan kampanye wisata sepeda juga ditingkatkan.
- j. Pantai dan pulau. Pantai dan pulau menjadi tujuan wisata pilihan para wisatawan. Namun, pantai dan pulau seringkali menjadi tempat yang terkena dampak negatif pariwisata. Pembangunan sarana pariwisata pantai dan pulau, pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air), dan pembangunan infrastruktur mempengaruhi kapasitas pantai dan pulau. Kerusakan lingkungan pesisir,



rusaknya karang laut, hilangnya penggunaan lahan tradisional pesisir, dan erosi pantai merupakan beberapa dampak pembangunan pariwisata. Melestarikan dan melestarikan pantai dan laut merupakan salah satu pilihan untuk memperpanjang umur pantai dan laut. Mendeklarasikan taman dan kawasan perlindungan laut merupakan salah satu pilihan. Wisatawan juga disugahi kegiatan ekowisata yang ramah lingkungan.

- k. Pegunungan dan hutan belantara. Wisatawan dari daerah musim panas memilih pergi ke pegunungan untuk menikmati pemandangan baru. Aktivitas pegunungan berpotensi menimbulkan kerusakan pada pegunungan dan kawasan hutan belantaranya. Reboisasi dan peremajaan gunung untuk mencegah kerusakan gunung dan hutan belantara;
- l. Vegetasi. Penebangan liar, penggundulan hutan, risiko kebakaran hutan, pemetikan bunga, tanaman dan jamur untuk tujuan wisata merupakan beberapa kegiatan yang menyebabkan kerusakan vegetasi. Hal ini menyebabkan degradasi hutan, perubahan struktur vegetasi, hilangnya spesies tumbuhan langka dan rusaknya habitat tumbuhan. Ekosistem tumbuhan menjadi tidak teratur dan tidak seimbang;



- m. Satwa Liar. Wisatawan terpesona dengan gaya hidup hewan tersebut. Namun aktivitas pariwisata mengganggu kehidupan hewan tersebut. Jumlah satwa liar semakin berkurang sehingga ketika wisatawan berkunjung ke kawasan wisata, satwa tidak lagi mudah ditemukan;
- n. Peninggalan sejarah, budaya dan agama. Tempat-tempat keagamaan yang banyak dikunjungi wisatawan mengganggu fungsi utamanya sebagai tempat ibadah yang sakral. Situs budaya digunakan untuk tujuan komersial dan oleh karena itu dieksploitasi secara berlebihan. Kapasitas situs sejarah, budaya, dan keagamaan dapat diperkirakan dan dikendalikan oleh otoritas pengelolaan pengunjung dengan tujuan meminimalkan kerusakan pada situs sejarah, budaya, dan keagamaan. Upaya konservasi dan konservasi serta rehabilitasi dapat dilakukan untuk memperpanjang umur situs-situs tersebut;
- o. Daerah perkotaan dan pedesaan. Pendirian hotel, restoran, fasilitas wisata, toko cinderamata dan fasilitas lainnya diperlukan di kawasan wisata. Seiring dengan perkembangan tersebut, jumlah wisatawan, jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas semakin meningkat.



Hal ini tidak hanya memberikan tekanan terhadap lahan, namun juga mengubah fungsi lahan pemukiman menjadi lahan komersial sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, dan pencemaran estetika. Dampak negatif tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan pengunjung, penataan kawasan perkotaan atau desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan penting dalam pembangunan.

Pengelolaan pariwisata hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang mengedepankan nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunikatif, dan sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan pariwisatanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurut Dowling dan Adas pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus berbasis pada kearifan lokal dan kekhasan lokal yang mencerminkan keunikan warisan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya sebagai landasan pengembangan kawasan



wisata. 3. Mengembangkan lebih banyak atraksi wisata berbasis khasanah budaya lokal.

- c. Pelayanan pariwisata berbasis keunikan budaya dan lingkungan setempat.
- d. Memberikan dukungan yang sah terhadap pertumbuhan dan pembangunan pariwisata apabila terbukti membawa manfaat positif, namun di sisi lain mengendalikan atau menghentikan kegiatan pariwisata apabila melebihi ambang batas lingkungan alam atau penerimaan sosial, meskipun di sisi lain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara lebih rinci Liu dan Western menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat memainkan peran strategis dalam fungsi-fungsi berikut:

- a. Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara umum, pengembangan kawasan wisata akan mengakibatkan degradasi sumber daya akibat meluasnya pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata yang tidak terkendali, serta pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut, yang merupakan akibat yang tidak dapat dihindari. tentang peluang komersial yang diciptakannya.



Pariwisata jika dikelola dengan baik dapat menjadi solusi ekonomi untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan.

b. Keberlanjutan ekonomi

Tren industrialisasi dan perkembangan ekonomi global akan menimbulkan saling ketergantungan terhadap produk impor sehingga menguras sumber devisa negara. Pengembangan pariwisata merupakan solusi permasalahan tersebut dengan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kelas bawah yang banyak tinggal di pedesaan¹⁸, sehingga diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan sumber daya perekonomian yang lebih baik.

c. Meningkatkan integritas budaya

Aspek ekologi pariwisata memerlukan hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat lokal, termasuk dialog budaya yang dilandasi rasa hormat terhadap keberadaan dan integritas satu sama lain. Jika unsur keutuhan budaya ini hilang, maka dapat dijamin, apapun tingkat perkembangan kawasan wisata tersebut, lama kelamaan akan ditinggalkan.

d. Nilai edukasi dan pembelajaran

Keberlanjutan dan keberlanjutan suatu kawasan wisata bergantung pada



terciptanya pemahaman dan minat seluruh pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman dan kepedulian tersebut hanya dapat dicapai melalui proses penanaman modal (nilai) dan standar (norma) melalui proses pembelajaran pendidikan.

Tata kelola pariwisata yang baik melalui keterlibatan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam perencanaan di semua tingkatan. Pariwisata berbasis komunitas dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan kebanggaan terhadap daerah dan budayanya, meningkatkan keharmonisan, memberdayakan komunitas dan menciptakan kesetaraan masyarakat, mengurangi migrasi dan menstimulasi imigrasi. Pariwisata berbasis komunitas juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, meningkatkan tingkat kesehatan dengan meningkatkan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, fasilitas dan infrastruktur umum (air, listrik dan telekomunikasi), memelihara dan mempromosikan budaya lokal, situs sejarah dan alam dengan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya konservasi dan memberikan dukungan yang dibiayai oleh keberadaan pariwisata di suatu daerah.



Pariwisata berbasis komunitas dapat meningkatkan hubungan dan jaringan antar budaya melalui pertukaran budaya dan dialog antara komunitas lokal dan wisatawan.

C. Implementasi Tata Kelola

1. Implementasi Tata Kelola Lingkungan

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang dapat diintegrasikan ke dalam: 1. Perencanaan lingkungan hidup 2. Pemanfaatan lingkungan hidup 3. Pengendalian lingkungan hidup 4. Pemeliharaan lingkungan hidup 5. Pemantauan lingkungan hidup 6. Penegakan hukum lingkungan hidup Dalam hal ini, peraturan dapat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan, diperlukan prinsip-prinsip. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 Tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup: “Tanggung jawab negara, konservasi dan keberlanjutan, keselarasan dan keseimbangan, integrasi, manfaat, kehati-hatian, kesetaraan, ekoregion, keanekaragaman hayati, upah pencemar, keahlian partisipasi, kecerdasan lokal, tata



kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah”

- a. Prinsip tanggung jawab negara adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, generasi sekarang dan mendatang.
 - 2) Negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Negara yang mencegah penggunaan sumber daya alam yang mencemari atau merusak lingkungan.
- b. Prinsip Kelestarian dan keberlanjutan
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap satu sama lain dalam generasi yang sama dengan berupaya menjaga daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- c. Prinsip Keserasian dan Keseimbangan
Pemanfaatan lingkungan hidup memerlukan perhatian pada banyak aspek seperti manfaat ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan dan konservasi ekosistem.
- d. Prinsip integrasi



Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan menggabungkan berbagai unsur berbagai komponen yang terkait.

e. Prinsip manfaat

Segala upaya dan/atau kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat dan martabat manusia selaras dengan lingkungan hidup.

f. Prinsip kehati-hatian

Ketidakpastian dampak suatu usaha atau kegiatan akibat terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi alasan untuk menunda tindakan guna meminimalkan atau menghindari terjadinya dampak buruk ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Prinsip keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan profesional bagi seluruh warga negara, antar daerah, antar generasi, dan antar gender.

h. Prinsip ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik



sumber daya alam, kondisi geografis ekosistem, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- i. Prinsip keanekaragaman hayati
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk menjaga keberadaan, keanekaragaman, dan kelestarian sumber daya alam hayati termasuk sumber daya alam tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam, serta faktor abiotik disekitarnya, merupakan satu kesatuan. . sebuah ekosistem.
- j. Prinsip pencemar membayar
Setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya mencemari atau merusak lingkungan hidup harus menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.
- k. Prinsip partisipatif
Seluruh anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Prinsip Kearifan Lokal
Dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang diterapkan dalam sistem kehidupan masyarakat.



m. Prinsip tata kelola yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

n. Prinsip otonomi daerah

Pemerintah dan perangkat daerah mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia.

Dalam realita dilapangan selama ini, konsep *Environmental governance* kurang terimplementasikan dengan baik disebabkan oleh beberapa hal seperti dikemukakan oleh Samekto (2005) yakni terlalu State Based, sentralistik, energi masyarakat tidak dimanfaatkan, isu-isu legalistik dan teknokratik, terlalu mengandalkan kekuatan dan instrumen penegakan hukum, kurang memanfaatkan instrumen ekonomi (swasta), tidak transparan dan akuntabel. Dari realita tersebut, secara otomatis manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan bukan berdampak positif melainkan sebaliknya akan berdampak negatif.



Tetapi untuk semakin menyempurnakan implementasi Environmental governance dalam rangka dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik, Hempel (1996) menyatakan ada beberapa unsur penting dalam usaha mensukseskan implementasi konsep Environmental governance antara lain:

- a. Revitalisasi dan penguatan komunitas lokal serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang konsep bioregion kedalam kegiatan operasional masyarakat.
- b. Partisipasi yang besar dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat di dalam pembentukan, pelaksanaan dan monitoring terkait kebijakan program lingkungan.
- c. Pendistribusian kembali sumber-sumber dari sektor industri bagi pengembangan kawasan dan perkotaan melalui praktik perdagangan yang wajar, paket bantuan pemerintah/ non pemerintah serta penyediaan transfer teknologi.
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, partisipasi politik, akses memperoleh kredit dan meningkatkan gizi serta kesehatan.



- e. Memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam perencanaan pasar hijau dan dukungan pasar.
- f. Penggunaan aturan/hukum lingkungan hidup dalam perdagangan global untuk melindungi kerentanan/keterbatasan sumber daya alam dan ekosistem yang lebih luas.
- g. Memperluas hak-hak komunitas pekerja, menetapkan upah minimum dan program kesehatan dan keselamatan lingkungan.
- h. Meningkatkan pendidikan dan mengembangkan literasi kewarganegaraan serta saling ketergantungan dan tanggung jawab pribadi.
- i. Tersedianya teori-teori yang menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, antara lain teori-teori tentang pertumbuhan penduduk, teknologi modern, perilaku konsumen, dan kekuatan kontrol politik dan ekonomi internasional.
- j. Ada kerja sama yang erat antara ilmuwan, masyarakat umum, dan politisi untuk mengembangkan demokrasi yang mengintegrasikan pengetahuan lingkungan ke dalam kebijakan publik.
- k. Penelitian terbatas diperlukan mengenai norma/tindakan pengembangan



kelembagaan untuk mendukung pengelolaan lingkungan global dan lokal.

2. Implementasi Tata Kelola Pariwisata

Pengelolaan pengembangan pariwisata harus menggunakan tata kelola pariwisata yang baik. Penerapan tata kelola pariwisata yang baik mencakup 10 prinsip (Sunaryo, 2013) sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan dalam pengembangan atau pertumbuhan pariwisata sebagai pengawas atau pengendali, khususnya dengan ikut serta dalam menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan pariwisata, menentukan Sumber Daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan digunakan untuk mengelola dan mengembangkan daerah tujuan wisata. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

b. Keterlibatan pemangku kepentingan

Dalam proses pengembangan dan pengembangan pariwisata, subyek dan pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif dan efektif. Termasuk di dalamnya adalah kelompok relawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di



bidang pariwisata, asosiasi industri pariwisata, asosiasi dunia usaha dan pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dan selanjutnya terlibat dari pihak-pihak yang akan memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut.

c. Kemitraan milik lokal

Dalam pengembangan dan pertumbuhan pariwisata, kepemilikan lokal harus mampu memberikan dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat lokal. Melalui model kemitraan strategis, masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pengelolaan bersama, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung pariwisata serta restoran, hotel, toko cenderamata, dan transportasi wisata.

d. Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan

Program dan kegiatan pembangunan pariwisata harus menjamin pemeliharaan dan peningkatan sumber daya alam dan buatan yang ada dengan menggunakan kriteria dan standar internasional yang baku, yaitu penggunaan sumber daya dalam pembangunan pariwisata harus digunakan secara berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya



tak terbarukan secara berlebihan. energi (yang tidak dapat diubah).

- e. Memenuhi aspirasi masyarakat
Dalam program kegiatan pariwisata harus memperhatikan aspirasi dan tujuan masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan atau kondisi yang harmonis antara wisatawan/wisatawan, badan usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya kerjasama pengembangan atraksi wisata budaya atau kemitraan wisata budaya dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan atau administrasi hingga tahap pemasaran.
- f. Toleransi terhadap lingkungan
Dalam setiap kegiatan pembangunan atau pengembangan pariwisata, kapasitas daya dukung lingkungan hidup harus ada dan pelaksanaan kapasitas tersebut harus konsisten dan selaras dengan batasan kapasitas lokal dan daya dukung yang tersedia saat ini. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pengembangan berbagai fasilitas dan kegiatan pariwisata, termasuk daya dukung fisik, hayati, ekonomi, dan sosial budaya.
- g. Pemantauan dan evaluasi
Di bidang pengembangan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, program kegiatan



pemantauan/monitoring dan evaluasi mencakup sejumlah kegiatan, khususnya pengembangan pedoman, penilaian dampak kegiatan pariwisata, indikator dan batasan pembangunan untuk mengukur dampak pariwisata. sampai implementasi. Memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan.

- h. Tanggung jawab terhadap lingkungan
Perhatian khusus diberikan pada kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesehatan masyarakat, yang secara jelas dinyatakan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan pariwisata saat ini. Persoalan ini perlu mendapat banyak perhatian ketika merencanakan program pembangunan dan pengembangan pariwisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi dan menjamin kesinambungan, pengelolaan hotel yang berkesinambungan dan isu-isu terkait lainnya untuk keberlanjutan pembangunan pariwisata secara menyeluruh.
- i. Pelatihan masyarakat
Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan selalu memerlukan



pengetahuan dan keterampilan masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk menjadi sarana membekali masyarakat dan meningkatkan keterampilan berusaha secara profesional.

j. Mempromosikan dan melindungi nilai-nilai budaya lokal

Program promosi dan advokasi juga diperlukan sebagai bagian dari pengembangan dan pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, termasuk promosi dan advokasi penggunaan kelambu, penggunaan lahan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan karakter lanskap (rasa memiliki) dan identitas budaya masyarakat lokal. pariwisata. Pemanfaatan wilayah dan kegiatan yang dilakukan harus ditujukan untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada wisatawan.





HUBUNGAN ANTARA EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN PARIWISATA

A. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi

Tujuan perekonomian suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pemberi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil pada tingkat nasional atau produk domestik bruto regional (PDB) pada tingkat daerah, yaitu total pendapatan atau total pengeluaran terhadap produksi barang dan jasa di suatu daerah. daerah. Pangung. Kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan produktif harus dilaksanakan karena dianggap sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di negara berkembang.

Menurut Sadono Sukirno Pertumbuhan ekonomi merupakan indeks yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja suatu perekonomian, khususnya menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah yang terus membaik membuktikan bahwa perekonomian daerah berkembang dengan baik



Industri pariwisata merupakan bagian penting dari perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Beberapa ahli berpendapat industri pariwisata merupakan industri yang kompleks dan *terfragmentasi*, yang keberadaannya sulit diukur dan ditentukan karena tren pariwisata terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kontribusi industri pariwisata terhadap PDB dan devisa industri pariwisata periode 2018-2022.

Tabel 4.1 Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi terhadap PDB (%)	5.2	4.7	4.0	4.2	3.6
Devisa (US\$)	16.43 M	16.91 M	3.31 M	0.54 M	4.26M
Tenaga Kerja (juta jiwa)	19.46	20.76	20.43	21.26	22.89

Sumber: BPS dan Kemenparekraf

Pengembangan pariwisata juga mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menciptakan permintaan konsumsi dan investasi, yang



keduanya mengarah pada aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. Selama perjalanan wisatawan akan berbelanja sehingga secara langsung menciptakan permintaan pasar terhadap barang dan jasa ((*tourism final demand*)). Selain itu, permintaan *tourism final demand* pada akhirnya secara tidak langsung menciptakan permintaan terhadap barang modal dan bahan baku (permintaan yang berasal dari investasi. Untuk memenuhi permintaan pariwisata, diperlukan investasi di bidang transportasi, hotel dan fasilitas akomodasi lainnya, kerajinan tangan, industri produk konsumsi, jasa, katering, dan lain-lain.

Pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui banyak jalur, diantaranya dapat dilihat:

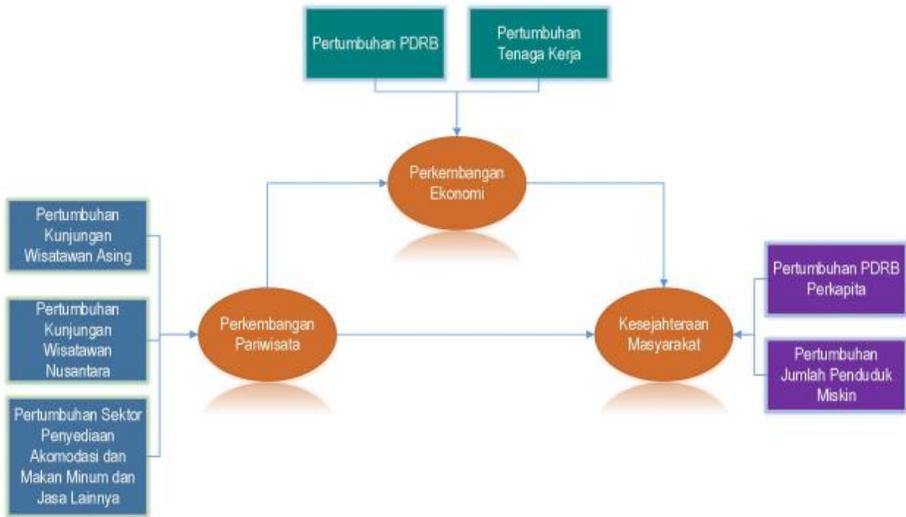
1. Industri pariwisata merupakan sumber pendapatan devisa untuk memperoleh alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. Pembangunan pariwisata merangsang investasi di bidang infrastruktur.
3. Perkembangan industri pariwisata mendorong berkembangnya sektor ekonomi lainnya melalui dampak langsung, tidak langsung, dan dampak.



4. Pariwisata berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
5. Pariwisata menciptakan skala ekonomi yang positif.
6. Pariwisata juga penting dalam menyebarkan pengetahuan teknis, mendorong penelitian dan pengembangan, dan mengumpulkan sumber daya manusia.

Perlunya mendorong pengembangan industri pariwisata. Argumen pertama, industri pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar. Argumen kedua adalah bahwa pariwisata dapat mendukung perekonomian karena menghasilkan keuntungan yang cepat, yang pada gilirannya menghasilkan devisa lebih cepat dibandingkan ekspor biasa. Argumen ketiga adalah pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.





Gambar 2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata

Menurut Cohen (1984) Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat digolongkan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

1. dampak terhadap penerimaan devisa,
2. dampak terhadap pendapatan masyarakat,
3. dampak terhadap kesempatan kerja,
4. dampak terhadap harga,
5. dampak terhadap keuntungan/keuntungan pembagian keuntungan,
6. dampak terhadap kepemilikan dan penguasaan,



7. dampak terhadap pembangunan secara keseluruhan dan

8. dampak terhadap pendapatan negara

Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), pembangunan pariwisata pada dasarnya menyoar beberapa tujuan utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persatuan dan keutuhan bangsa

Pariwisata dinilai mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat di seluruh tanah air. Dampak yang diharapkan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan ke daerah lain selain tempat tinggalnya, akan tercipta rasa persaudaraan dan pemahaman terhadap sistem dan filosofi hidup mereka yang berkunjung, sehingga meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan.

2. Pengentasan kemiskinan

Perkembangan pariwisata harus menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mencoba bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan



masyarakatnya. Pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengentasan kemiskinan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Karena sifat kegiatan pariwisata yang memberikan keindahan alam, kekayaan budaya, keramahtamahan dan pelayanan, maka sangat sedikit sumber daya yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Artinya penggunaan sumber daya yang dapat dikonsumsi cenderung sangat rendah, sehingga dari sudut pandang keberlanjutan sumber daya tersebut mudah dikelola dalam jangka waktu yang relatif lama.

4. Pelestarian budaya

Pembangunan pariwisata harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah, termasuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya negara atau daerah tersebut. UNESCO dan PBB-WTO, dalam resolusi bersama tahun 2002, menyatakan bahwa pariwisata adalah alat utama pelestarian budaya. Dalam konteks ini, Indonesia harus menjadikan pengembangan pariwisata sebagai kekuatan pendorong untuk melestarikan budaya di berbagai daerah.



5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia
Berwisata saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Di beberapa kelompok masyarakat, pariwisata bahkan dikaitkan dengan hak asasi manusia, termasuk pemberian liburan panjang dan program cuti berbayar.
6. Peningkatan perekonomian dan industri
Pengelolaan pariwisata yang baik dan berkelanjutan akan membawa peluang pertumbuhan ekonomi pada suatu destinasi wisata. Pemanfaatan bahan baku dan produk lokal dalam penyediaan jasa di sektor pariwisata juga akan membuka peluang bagi industri lokal untuk berperan dalam menyediakan barang dan jasa.
7. Perkembangan teknologi
Dengan semakin kompleksnya dan tingginya tingkat persaingan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi, maka tuntutan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata untuk mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Di bidang-bidang tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat



guna yang dapat menunjang kegiatan perekonomian lainnya. Dengan cara ini, pengembangan pariwisata akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah di banyak bidang yang lebih luas dan mendasar. Pariwisata akan menjadi elemen integral pembangunan daerah dan diintegrasikan ke dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Cakupan industri pariwisata sangat luas, ketika industri pariwisata berkembang maka industri pariwisata menjadi motor penggerak yang mampu menarik banyak industri lainnya, hal ini merupakan tanda dari sifat industri pariwisata yaitu multiplier effect. Argumen ini menunjukkan keunggulan industri pariwisata yang memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan sektor usaha lainnya. Sektor ekonomi yang akan didorong jika pariwisata berkembang antara lain pertanian (pertanian subsisten, peternakan, perikanan dan peternakan, bahkan kehutanan), industri khususnya industri kerajinan, industri dalam negeri dan ekonomi kreatif, serta pembangunan infrastruktur. Sektor transportasi meliputi angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan udara (Arjana, 2021).



B. Dampak Lingkungan dari Pariwisata

1. Ahli Fungsi Lahan

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB). Pariwisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk relaksasi atau kegiatan rekreasi. Sampai saat ini, menurut “UU Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata diartikan sebagai serangkaian kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah”.

Pariwisata memiliki potensi untuk merangsang pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dan hal tersebut berhasil dilakukan. Namun pertumbuhan industri pariwisata mendominasi dan menjadi sumber bahaya bagi sektor pertanian karena meningkatnya kebutuhan lahan konstruksi untuk mendukung operasional industri pariwisata (Subagiyo et al., 2020). Konversi lahan terus terjadi dan semakin sering terjadi setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konversi lahan



untuk keperluan lain merupakan masalah serius di Indonesia, yang berhubungan langsung dengan terbatasnya pasokan lahan.

Konversi lahan pertanian ke penggunaan lain bukanlah fenomena baru; Seiring dengan perkembangan populasi dan perekonomian dunia, kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat. Menurut Lestari (2009), “Perubahan penggunaan lahan yang disebut juga dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan. mulai dari pemanfaatan semula (tergantung peruntukannya) hingga fungsi lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Laporan ini juga membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan penggunaan lahan. Tiga alasan penting yang berkontribusi terhadap perubahan tujuan penggunaan lahan pertanian: faktor eksternal, terutama faktor akibat pertumbuhan perkotaan, populasi dan ekonomi; faktor internal, termasuk faktor yang berasal dari kondisi sosial ekonomi penggunaan lahan rumah tangga petani; dan faktor politik, termasuk yang berasal dari peraturan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur perubahan fungsi



lahan pertanian. Kelemahan unsur regulasi atau peraturan itu sendiri terutama berkaitan dengan efektifitas undang-undang, penanganan pelanggaran, dan kebenaran unsur lahan yang dilarang untuk dikonservasi.

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi perencanaan ke fungsi lainnya sehingga berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Oleh karena itu, alih fungsi penggunaan lahan yang optimal harus selaras dengan perencanaan penggunaan lahan daerah dan pengelolaan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah. Pengelolaan dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004. 2007 tentang Perencanaan Tata Guna Pertanian.

Konversi lahan terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Semakin maraknya konversi lahan untuk penggunaan lain merupakan permasalahan yang cukup serius terkait dengan keberadaan lahan di Indonesia. Peraturan pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi kawasan wisata harus konsisten dengan tujuan penggunaan



lahan dan perencanaan tata ruang. Pada prinsipnya perubahan penggunaan lahan harus disertai dengan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan lahan, yang merupakan penilaian teknis yang obyektif dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengusulkan solusi, menyelesaikan pengaduan, hak guna lahan, dan memberikan izin perubahan tujuan penggunaan lahan.

Beralihnya fungsi lahan subur dari lahan pertanian ke lahan non pertanian disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. Pertanian sebagai suatu sistem perekonomian relatif lemah dibandingkan dengan industri dan kegiatan lainnya;
- b. Posisi pertanian, hukum dan kebijakan penggunaan sumber daya alam (lahan) di Indonesia masih lemah.

2. Penyebab Alih Fungsi Lahan

Alasan dilakukannya alih fungsi lahan menjadi tujuan wisata. Berikut beberapa faktornya (Alfiansyah, Bani & Soerdarwo, 2022), antara lain:

- a. Meningkatkan pendapatan
Mengalihfungsikan lahan menjadi tujuan wisata untuk meningkatkan



- pendapatan dan akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera.
- b. Biaya produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan pendapatan
Laju konversi lahan juga dipengaruhi oleh tingginya biaya input pertanian. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi kerugian akibat gagal panen, harga yang tidak stabil (sering kali rendah), kenaikan harga pestisida dan pupuk, serta perpanjangan waktu panen. Akibatnya, mereka rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan sangat bergantung pada uang tunai.
 - c. Fungsi Lahan lebih Menguntungkan
Konversi lahan yang terjadi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pendapatan meningkat berkali-kali lipat dan biaya operasional yang dikeluarkan lebih sedikit dengan pendapatan yang menjanjikan, sehingga sangat berarti dalam membuka peluang kerja yang adil bagi masyarakat. masyarakat.
 - d. Penunjang Wisata
Perkembangan pariwisata mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan karena lahan akan digunakan atau dialihkan untuk mendukung pengembangan



fasilitas pelayanan pariwisata dan infrastruktur pariwisata, ini mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Kemitraan dengan masyarakat lokal penting dalam fase pengembangan pariwisata, karena pada masyarakat berpotensi adanya pro dan kontra dalam mengali potensi pariwisata. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara dalam pengembangan pariwisata, misalnya dengan menjadi pemandu wisata atau dengan menciptakan usaha pariwisata. Kegiatan pariwisata dapat membawa manfaat namun juga dapat menimbulkan banyak permasalahan bagi sosial budaya masyarakat. Masyarakat telah menetapkan norma dan menetapkan persyaratan untuk kelangsungan tujuan wisata dalam jangka panjang (Suri, 2019). Dampak ini merupakan akibat dari keterlibatan masyarakat dengan wisatawan serta perubahan lingkungan alam akibat pengembangan pariwisata. Partisipasi merupakan aspek penting dalam pengembangan berbagai inisiatif, di antaranya berkaitan dengan industri pariwisata. Keterlibatan dalam



penyebaran informasi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai agen pembangunan akan memungkinkan mereka beroperasi secara efektif di masa depan (Silvaana et al., 2021).

Menurut Iwan Isa, dalam kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata, ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya konversi tersebut, antara lain:

- a. Lahan yang digunakan sebagai kawasan wisata memiliki harga yang tinggi, ini akan menyebabkan masyarakat cenderung menjual tanahnya;
- b. Kebutuhan lahan untuk kegiatan komersial meliputi pengembangan real estate, kawasan industri, kawasan komersial dan jasa lainnya yang memerlukan lahan luas, termasuk lahan kehutanan dan pertanian;
- c. Degradasi lingkungan, termasuk kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kekurangan air, menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat;



- d. Otonomi daerah mengutamakan pembangunan sektoral yang menjanjikan keuntungan jangka pendek yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan primer daerah (PAD), hal ini kadang tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang, kepentingan nasional yang benar-benar penting bagi seluruh lapisan masyarakat;
- e. Lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

3. Dampak Alih Fungsi Lahan

Dampak alih fungsi lahan menjadi tempat wisata antara lain:

a. Dampak sosial

Banyaknya wisatawan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya di kawasan wisata. Populasi dan perubahan piramida usia merupakan faktor yang mempengaruhi demografi, begitu pula perubahan lapangan kerja dari pertanian menjadi pemandu wisata, serta perubahan infrastruktur dan barang.



Seiring dengan semakin populernya pariwisata, ini membawa dampak positif bagi pendidikan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengunjung dan meningkatnya kekayaan yang dapat digunakan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Dampak ekonomi

Seiring berkembangnya destinasi wisata, memberikan pengaruh langsung terhadap faktor perekonomian desa, antara lain kemajuan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata berdampak pada perekonomian lokal melalui delapan cara utama. Hal ini merupakan dampak terhadap pendapatan devisa, pendapatan negara, kesempatan kerja, harga, distribusi keuntungan, kepemilikan dan kendali, pembangunan dan pendapatan negara, semuanya dikelompokkan menjadi satu.

c. Dampak Lingkungan

Pertumbuhan pariwisata mempunyai pengaruh terhadap faktor lingkungan, misalnya dimulainya pembangunan infrastruktur seperti berdirinya



pedagang, lahan parkir yang luas dan jalan yang lebih baik, dan lain-lain. Di sisi lain, kerusakan lingkungan akan terjadi akibat menurunnya kualitas lingkungan akibat adanya sampah di sekitar kawasan pengembangan wisata, meningkatnya pencemaran udara dan air serta kemacetan lalu lintas serta perubahan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pengembangan pariwisata.

d. Konflik budaya

Karena pariwisata melibatkan perpindahan individu-individu di wilayah yang berbeda dan menimbulkan hubungan sosial antara wisatawan dengan masyarakat lokal, dimana hubungan tersebut bersifat sementara (selama individu tersebut, dalam hal ini wisatawan, bertempat tinggal di kawasan wisata tersebut), maka menimbulkan konflik budaya. karena perbedaan budaya, suku, gaya hidup, bahasa, kepercayaan dan tingkat kebahagiaan antara kedua belah pihak.

e. Konflik penggunaan lahan

Apalagi di daerah dengan garis pantai dan kepulauan yang indah, pemanfaatannya seringkali berlebihan.



Konflik cenderung muncul mengenai pengembangan lahan untuk infrastruktur atau fasilitas pariwisata dan kepentingan masyarakat lokal dalam mengelola lahan untuk pertanian atau keperluan lainnya.

Ironisnya, masyarakat lokal di kawasan wisata tersebut seringkali dirugikan dalam melindungi tanah mereka dengan alasan bahwa pariwisata menjanjikan pembangunan ekonomi yang lebih baik di kawasan tersebut dibandingkan pemanfaatan lainnya. .

f. Masalah etika

Selain dampak-dampak yang disebutkan di atas, industri pariwisata dapat menimbulkan situasi serius dimana pelanggaran norma budaya dan kejahatan mulai bermunculan.

C. Integrasi Ekonomi dan Lingkungan dalam Pariwisata

1. **Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) adalah pariwisata yang tumbuh sangat pesat, melibatkan peningkatan arus kapasitas akomodasi, penduduk lokal dan lingkungan hidup, dimana pengembangan pariwisata dan investasi



baru di sektor pariwisata tidak akan menimbulkan dampak negatif dan dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan hidup, jika kita memaksimalkannya. dampak positifnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Hasilnya, sejumlah inisiatif telah diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata dengan lebih baik dan mengedepankan isu pariwisata berkelanjutan, karena bisnis yang baik dapat melindungi sumber daya atau aset penting bagi pariwisata, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan.

Hadiwijoyo (2012) pariwisata berkelanjutan merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, mampu memberikan kesempatan kerja kepada generasi muda untuk dapat berkembang berdasarkan tatanan sosial yang ada. Model pariwisata berkelanjutan dinilai lebih “menjanjikan” karena memuat wawasan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi juga bergantung pada keberlanjutan bagi



masyarakat dan lingkungan hidup. Bentuk pembangunan dan pariwisata didasarkan pada keberhasilan pengembangan aspek ekonomi dengan visi perlindungan lingkungan hidup. Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam dokumen Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan *Green Jobs* untuk Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), pariwisata Berkelanjutan adalah jenis pariwisata yang sepenuhnya mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat. dan dampak ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan masyarakat tuan rumah. Berdasarkan pengertian UNWTO terlihat bahwa pariwisata berkelanjutan mempunyai dampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dijelaskan sebagai berikut.

Kapera (2018) berpendapat bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya konsisten dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk bagaimana memanfaatkan dan melindungi potensi yang dimiliki alam, dan bagaimana memanfaatkan potensi



alam secara ekonomi. . nilai-nilai, nilai-nilai ekologi dan lingkungan hidup serta nilai-nilai budaya, sosial dan intelektual setempat yang bersangkutan.

Selanjutnya konsep pariwisata berkelanjutan adalah:

Pertama. Kegiatan pariwisata ini dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,

- a. Kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan hidup,
- b. Kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab sosial dan
- c. Kegiatan pariwisata tidak bertentangan dengan budaya lokal.

Dari konsep tersebut terlihat pemikiran masyarakat bahwa pengembangan pariwisata di suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik wisata merupakan berkah, bukan bencana. Dengan cara ini, perusahaan akan selalu berusaha menjaga keberlanjutan, menjaga keberlanjutan dan tentunya menciptakan suasana yang aman dan kondusif (Muriawan 2009). Pariwisata dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan dapat merangsang perekonomian masyarakat dimana kegiatan pariwisata



akan mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja.

d. Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya alam, sosial dan budaya yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata pada generasi ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan, artinya dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi dan adil secara etika dan sosial bagi masyarakat.”

Pariwisata berkelanjutan perlu didasarkan pada tiga pilar penting: pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial (Suradnya, 2011). Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai menjaga keberlanjutan.

- 1) Keberlanjutan ekologi dan nilai-nilai alam, dimana pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan menjamin kelestarian sumber daya alam, flora, fauna, dan



lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata harus membantu menjaga dan melestarikan sumber daya alam tanpa merusaknya. Hal-hal yang dapat dilakukan terkait keberlanjutan ekologi, seperti (a) menjamin konservasi tanah, air dan udara, (b) efisiensi penggunaan sumber daya alam dan pengurangan penggunaan sumber daya alam langka, (c) pengelolaan limbah pariwisata, (d) melindungi kelestarian keanekaragaman genetik, jenis hewan dan tumbuhan.

- 2) Keberlanjutan sosial budaya, pengembangan pariwisata harus mampu memperkuat kerja masyarakat baik di bidang seni, melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada agar tidak hilang. Pembangunan pariwisata memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan berdasarkan potensi daerah.
- 3) Keberlanjutan ekonomi, pembangunan pariwisata harus melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat agar



masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata dengan mendirikan usaha pariwisata atau mencari pekerjaan di bidang pariwisata. Keberlanjutan ekonomi harus memungkinkan pemerataan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi jangka panjang. Dalam proses pengembangan pariwisata, kita berharap dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan ekonomis.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip yang dikembangkan di bawah ini. Prinsip-prinsip tersebut mencakup partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya berkelanjutan, pertimbangan tujuan masyarakat, perhatian terhadap kapasitas implementasi, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan dan promosi.

1) Partisipasi

Masyarakat harus memantau atau mengendalikan pembangunan pariwisata dengan berpartisipasi



dalam mendefinisikan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya untuk pemeliharaan dan peningkatan, dan mengembangkan tujuan dan strategi pembangunan, mengembangkan dan mengelola atraksi wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penerapan strategi yang telah disiapkan sebelumnya.

2) Keterlibatan Pelaku/Stakeholder Involvement

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata antara lain LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan kelompok, kelompok relawan, pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak berpengaruh serta kepentingan lainnya yang akan mendapatkan manfaat dari dampak kegiatan pariwisata.

3) Kepemilikan lokal

Pembangunan pariwisata harus memberikan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat lokal. Sarana penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain-lain. harus dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa



pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal serta kemudahan akses bagi pengusaha dan pengusaha lokal memang diperlukan untuk mencapai kepemilikan lokal. Selain itu, hubungan antara pelaku ekonomi dan masyarakat lokal harus diupayakan untuk mendukung kepemilikan lokal.

4) Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, artinya kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung oleh keterhubungan lokal pada tahap perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sehingga pemerataan manfaat dapat tercapai. Ketika dilaksanakan, kegiatan pariwisata harus memastikan bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menggunakan kriteria dan standar internasional.



- 5) **Pertimbangkan tujuan masyarakat**
Tujuan masyarakat perlu diperhatikan dalam kegiatan pariwisata agar dapat tercapai kondisi harmonis antara wisatawan/wisatawan, destinasi dan masyarakat setempat. Misalnya kerjasama di bidang wisata budaya atau kemitraan wisata budaya dapat dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran.
- 6) **Daya Dukung**
Daya dukung atau daya dukung tanah harus diperhatikan meliputi daya dukung fisik, alam, sosial dan budaya. Perencanaan dan pembangunan harus tepat dan selaras dengan batas wilayah dan lingkungan setempat. Rencana dan kegiatan harus dievaluasi secara berkala sehingga penyesuaian/perbaikan yang diperlukan dapat diidentifikasi. Ukuran dan jenis fasilitas pariwisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat diterima.
- 7) **Pemantauan dan evaluasi**
Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan pariwisata



berkelanjutan meliputi penyusunan pedoman, penilaian dampak kegiatan pariwisata dan pengembangan indikator dan batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat yang dikembangkan harus mencakup skala nasional, regional dan lokal.

- 8) 8. Tanggung jawab hukum
Perencanaan pariwisata harus memperhatikan lapangan kerja, pendapatan dan peluang peningkatan kesehatan masyarakat lokal, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas dan memastikan sumber daya yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

- 9) Pelatihan
Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan bisnis dan karir. Pelatihan tersebut harus mencakup topik mengenai



pariwisata berkelanjutan, manajemen hotel serta topik terkait lainnya.

10) Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga mencakup peningkatan penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap serta rasa memiliki dan identitas masyarakat lokal. Pengembangan lahan dan kegiatan tersebut harus ditujukan untuk menciptakan pengalaman wisata berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan acuan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan menarik partisipasi masyarakat lokal.

Pembanguna pariwisata memerlukan peran serta masyarakat lokal agar memiliki rasa kepemilikan, kepedulian, tanggung jawab, komitmen serta meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya



melalui perspektif keberlanjutan pariwisata. Pemerintah harus mampu menangkap peluang dengan memperhatikan kualitas kapasitas lingkungan daerah destinasi, menggunakan sumber daya lokal secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan ekowisata, mengatur jumlah pengunjung, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. kapasitas lingkungan di wilayah sasaran. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan membuka lapangan kerja.

- 2) Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan kebutuhan masyarakat.

Keseimbangan ini akan tercapai jika semua pihak dapat bekerja sama menuju satu tujuan sebagai komunitas yang kuat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat, pemerintah daerah, industri pariwisata dan organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dimana destinasi pariwisata tersebut dikembangkan. Artinya berdasarkan pertimbangan dan konsensus



masyarakat setempat dapat menimbulkan dampak positif, khususnya kemampuan menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, terjalinnya hubungan baik antara industri pariwisata, pemerintah. dan masyarakat sehingga tercipta pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud.

- 3) Pembangunan pariwisata melibatkan pemangku kepentingan Dengan melibatkan lebih banyak pihak, dapat meberikan masukan yang lebih baik untuk pembangunan pariwisata, ini juga harus mempertimbangkan pandangan organisasi masyarakat lokal, yang melibatkan kelompok masyarakat miskin, perempuan, asosiasi pariwisata dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi proses pembangunan.
- 4) Memberikan kemudahan kepada usaha kecil dan menengah. Program pendidikan terkait pariwisata harus mengutamakan masyarakat lokal, dan industri yang



tumbuh di daerah tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha dan melatih masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi dalam aktivitasnya setelah pariwisata. mencapai tujuan Anda sendiri tanpa mengorbankan esensi Anda atau apa pun.

- 5) Pariwisata harus dikemas dengan tujuan untuk membangkitkan kegiatan usaha lain di masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan nilai tambah terhadap sektor lain, baik usaha baru maupun usaha yang sudah ada berkembang.
- 6) Adanya kerjasama antara masyarakat lokal
Hubungan kerja sama yang saling menguntungkan sehingga mengurangi tingkat kehilangan pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan negara. dan agen itu sendiri yang melakukan aktivitas tersebut.
- 7) Pembangunan pariwisata harus dapat memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang – undangan baik tingkat nasional maupun



intenasional sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala, membentuk kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.

- 8) Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan Memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Karena anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan adalah sesuatu yang logis, jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata tersebut.
- 9) Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi.
- 10) Harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap konsisten dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan prinsip manajemen



kapasitas, baik kapasitas daerah maupun kapasitas nasional, beberapa daya tarik wisata, kapasitas ekonomi, kapasitas sosial dan kapasitas sumber daya lainnya. . sehingga pengembangan pariwisata dapat terus berlanjut.

- 11) Harus ada keterbukaan dalam penggunaan sumber daya seperti penggunaan air tanah, penggunaan lahan dan sumber daya lainnya untuk memastikan tidak disalahgunakan.
- 12) Melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang keahlian pariwisata agar tenaga kerja ahli di bidangnya masing-masing.
- 13) Tercapainya tiga kualitas, yaitu pariwisata harus mampu mencapai “kualitas hidup” bagi masyarakat lokal, pariwisata harus mampu memberikan “kualitas peluang usaha” bagi penyedia jasa. dalam industri pariwisata dan aspek berikutnya dan terpenting adalah menciptakan pengalaman yang berkualitas.

e. Startegi Pariwisata Berkelanjutan



Dalam hal ini empat komponen yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dan partisipasi, keberagaman, integrasi dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, 2004).

1) Pembangunan menjamin kesetaraan dan keadilan sosial

Pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan sosial harus didasarkan pada faktor-faktor seperti: pemerataan sumber daya lahan dan faktor produksi, pemerataan peran dan kesempatan perempuan, pemerataan ekonomi dicapai dengan pemerataan distribusi kekayaan, namun kesetaraan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai. dicapai. dapat dicapai secara langsung.

2) Pembangunan menghormati keberagaman

Menjaga keanekaragaman hayati merupakan prasyarat untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar keseimbangan ekologi. Mempertahankan keragaman budaya mendorong



perlakuan yang sama terhadap masyarakat dan membuat pengetahuan tentang tradisi masyarakat yang berbeda lebih mudah dipahami.

- 3) Mengembangkan dengan menggunakan pendekatan terpadu Pembangunan berkelanjutan mengutamakan hubungan antara manusia dan alam. Manusia berdampak pada alam dengan cara yang menguntungkan atau merugikan. Gunakan hanya pemahaman tentang hubungan timbal balik yang kompleks antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan pemahaman tersebut, maka dimungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi sebagai suatu konsep pelaksanaan pembangunan. Ini merupakan tantangan kelembagaan yang besar.
- 4) Pembangunan memerlukan visi jangka panjang Masyarakat cenderung lebih menghargai masa kini dibandingkan masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang



dimasukkan dalam penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan memerlukan penilaian yang berbeda dari asumsi umum dalam prosedur diskonto. Kesadaran jangka panjang adalah perspektif pembangunan berkelanjutan.

2. Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi

Soekadijo (1997) berpendapat bahwa dampak pariwisata terhadap karakteristik ekonomi masyarakat mempunyai dampak negatif dan dampak positif terhadap lingkungan sosial ekonomi kehidupan masyarakat, sehingga berkembangnya Pariwisata mengubah lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja. dan bentuk pembagian kerja. Aspek ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata suatu daerah, namun dalam pengembangan daerah tersebut sering kali aspek lain seperti sosial dan lingkungan terlupakan.

Biantoro (2014) dalam skala nasional, pengembangan pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Dampak langsung meliputi:



- 1) Kegiatan pariwisata mempunyai kemampuan untuk menarik tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru untuk menunjang kegiatan pariwisata.
 - 2) Memperkuat pengembangan wilayah yang seluruh wilayahnya berpotensi menjadi daerah tujuan wisata, terutama daerah pegunungan, pantai, daerah terpencil yang memiliki keindahan alam untuk menjadi daerah tujuan wisata. Sehingga industri pariwisata bisa mengembangkan kawasan yang bisa menjadi daya tarik wisata.
- b. Dampak tidak langsung yang timbul selama proses pengembangan pariwisata adalah:
- 1) Multiplier effect, khususnya jumlah uang yang diterima masyarakat, dapat menimbulkan sejumlah transaksi yang besarnya tergantung pada kondisi perekonomian.
 - 2) Mempromosikan pemasaran berbagai produk karena pariwisata merupakan kekuatan konsumen dinamis yang dapat mendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut



- 3) Pendapatan negara berupa pajak langsung dan pendapatan tiket masuk dan retribusi parkir.

Dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata menurut (Yoeti, 2008) adalah:

- a. Dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal.
- b. Dapat meningkatkan kesempatan kerja.
- c. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- d. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah
- e. Potensi peningkatan pendapatan nasional (GNP) atau produk domestik bruto (PDB)
- f. Mampu mendorong dan meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan sektor lainnya.
- g. Mampu memperkuat neraca pembayaran.

Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam dokumen Sustainable Tourism and Green Jobs Strategic Plan for Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), indikator pariwisata berkelanjutan didasarkan pada aspek ekonomi antara lain:

- a. Pendapatan dari pariwisata



Pendapatan dari belanja wisatawan mancanegara sangat penting karena merupakan sumber penerimaan devisa dan neraca pembayaran. Pajak dan biaya merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan total pengeluaran pengunjung.

b. Berkontribusi pada pengentasan kemiskinan

Berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan sudah menjadi tujuan dan komitmen Pemerintah. Banyak tempat wisata yang terletak di dekat daerah miskin, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Indikator-indikator yang perlu dinilai adalah pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin, peluang mata pencaharian di luar pertanian, pengembangan usaha dalam rantai komoditas pariwisata, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, hubungan dengan CSR, ketenagakerjaan dan pertukaran hak, pertumbuhan dan diversifikasi, akses terhadap pasar dan sumber mata pencaharian.

c. Nilai uang



Salah satu indikatornya adalah nilai moneter produk pariwisata, khususnya peningkatan indeks daya saing perjalanan dan pariwisata Indonesia.

d. Kebocoran ekonomi

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi ekonomi menciptakan banyak peluang untuk kebocoran yang tinggi

e. Proporsi pendapatan pariwisata yang ditujukan untuk konservasi

Konservasi sumber daya alam dan budaya sangat penting untuk keberlanjutan pariwisata, dan pendanaan dapat berasal langsung dari pariwisata.

f. Investasi dunia usaha, investasi masyarakat dan belanja pemerintah

Selain sektor publik dan swasta, investasi masyarakat juga diperlukan untuk menjadikan pariwisata lebih berkelanjutan. Investasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan pemuda di sektor rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan.

g. Struktur industri



Pariwisata berkelanjutan akan bergantung pada perpaduan yang seimbang antara berbagai jenis kegiatan dan penyampaian

3. Pariwisata Terhadap Aspek Sosial Budaya
Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam dokumen Sustainable Tourism and Green Jobs Strategic Plan for Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), indikator pariwisata berkelanjutan untuk aspek sosial meliputi:

a. Kesejahteraan masyarakat

Komitmen pemerintah dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, arahan presiden dan dokumen lainnya.

b. Aset budaya permanen

Setiap industri pariwisata mempunyai budaya yang mana aset budaya dijadikan sasaran kepemilikan atau pengelolaannya secara modern. Aset budaya yang melekat pada suatu masyarakat, meliputi nilai dan budaya berupa makanan, pakaian, dan lain-lain.

c. Partisipasi masyarakat



Dalam pariwisata, partisipasi masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga dalam menentukan arah perencanaan dan sebagai penyedia jasa.

d. Kepuasan atau ketidakpuasan lokal

Pariwisata bermanfaat bagi masyarakat dan akan diterima secara positif, ketidakpuasan akan menimbulkan konflik atau dampak negatif terhadap dunia usaha, pihak berwenang, penduduk dan wisatawan.

e. Dampak pariwisata terhadap masyarakat

Pariwisata mempunyai dampak terhadap masyarakat, dimana hal tersebut akan mempengaruhi sikap, manfaat sosial, perubahan gaya hidup, perumahan dan jumlah penduduk.

f. Akses masyarakat terhadap aset-aset utama

Pariwisata sebagai peluang akses bagi masyarakat lokal berkaitan dengan akses terhadap lokasi-lokasi utama, hambatan ekonomi, dan kepuasan terhadap tingkat akses.

g. Kesetaraan gender

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata mempengaruhi jenis pekerjaan dan



gender. Partisipasi perempuan di pasar kerja formal dan informal lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam pariwisata berkelanjutan, gender perlu disetarakan berdasarkan jenis pekerjaan, misalnya, penyediaan akomodasi, makanan, dan layanan pribadi harus ditugaskan pada jenis pekerjaan spesifik gender di bidang pariwisata.

h. Pekerja anak

Pekerja anak harus diberantas dan diawasi di daerah tujuan wisata. Memang benar bahwa anak-anak pada umumnya merupakan pekerja tidak berbayar, khususnya di sektor informal, selain pekerja anak yang terlibat dalam perdagangan anak.

i. Melestarikan/membangun warisan budaya

Situs yang dilestarikan/dibangun meliputi situs budaya, rambu, sistem reservasi, kerusakan, pemeliharaan dan monumen.

j. Melestarikan nilai-nilai budaya

Melestarikan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kehidupan tradisional, makanan/masakan, tata cara berpakaian, acara budaya, kerajinan tangan, dll.



4. Pariwisata Terhadap Aspek Lingkungan

Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dalam jangka panjang dan mempunyai nilai etika, sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Charter for Sustainable Tourism, 1995). Sutiarmo (2017) dampak pariwisata terhadap lingkungan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif, antara lain:

a. Dampak positifnya antara lain:

- 1) Memperkuat upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan alam, spesies hewan, dan lingkungan pertanian
- 2) Meningkatkan restorasi monumen dan bangunan bersejarah
- 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan wisata
- 4) Meningkatkan penyediaan infrastruktur baru dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada
- 5) Perubahan karakteristik kawasan terbangun akibat perluasan dan perencanaan kota
- 6) Perubahan struktur atau pembangunan perkotaan dan pedesaan



- 7) Meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pembersihan lingkungan
- b. Dampak negatifnya antara lain:
- 1) Menyebabkan pencemaran air, udara, kebisingan dan tanah
 - 2) Peningkatan erosi berupa:
 - 3) Erosi pantai, tanah longsor, kerusakan geologi dan kerusakan tepian sungai
 - 4) Drainase sumber air bawah tanah dan udara
 - 5) Drainase mata air mineral untuk digunakan sebagai bahan konstruksi
 - 6) Eksploitasi sumber daya hayati secara berlebihan
 - 7) Terjadi penumpukan sampah dan limbah yang merusak ekosistem sekitar

Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam dokumen Sustainable Tourism and Green Jobs Strategic Plan for Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), indikator mengenai pariwisata ramah lingkungan meliputi:



- a. Lindungi sumber daya alam yang berharga. Perlindungan sumber daya alam yang berharga mempunyai dengan indikator yaitu:
 - 1) Melindungi ekosistem penting, kawasan rentan, dan spesies yang terancam punah.
 - 2) Kualitas air laut, pencemaran dan persepsi terhadap kualitas air
 - 3) Mempromosikan dan memelihara pariwisata ramah lingkungan.
- b. Pengelolaan sumber daya alam yang langka, pengelolaan sumber daya alam langka antara lain:
 - 1) Pengelolaan energi, penghematan, efisiensi, energi terbarukan
 - 2) Perubahan iklim dan pariwisata: mitigasi, adaptasi, iklim ekstrem, risiko, dampak terhadap destinasi, emisi gas rumah kaca, transportasi dan konsumsi energi
 - 3) Penyediaan dan konservasi air: Pasokan air, daur ulang, harga air dan kelangkaan.
- c. Membatasi dampak kegiatan pariwisata
Membatasi dampak kegiatan pariwisata dengan indikator sebagai berikut:



- 1) Pengolahan limbah cair: air kotor, perluasan sistem, efisiensi, pengurangan polusi.
 - 2) Pengelolaan limbah padat: membuang, mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, menyimpan, mengumpulkan dan bahan berbahaya.
 - 3) Polusi udara: kualitas, kesehatan, polusi pariwisata dan persepsi wisatawan.
 - 4) Pengendalian kebisingan: pengukuran, persepsi.
- d. Pengelolaan dampak visual sarana dan prasarana pariwisata: Warna lingkungan, konstruksi, desain, dan lanskap alam
- e. Mempromosikan pariwisata berkelanjutan
- Mempromosikan pariwisata berkelanjutan untuk menjamin kepuasan konsumen, agenda ketenagakerjaan berkelanjutan, dan profitabilitas bagi bisnis pariwisata. Hal ini didasarkan pada 3 pilar, yaitu:
- 1) Keadilan sosial (monumen, warisan budaya, suku, budaya hidup, kelompok adat).



- 2) Pembangunan ekonomi
(menciptakan lapangan kerja dan kondisi kerja yang lebih baik)
 - 3) Keutuhan lingkungan hidup
(ekologi yang baik, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik).
- f. Kesehatan dan keamanan, indikator kesehatan dan keselamatan adalah:
- 1) Kesehatan:dimana kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan pangan, kesehatan dan keselamatan pekerja mempertimbangkan kebutuhan spesifik pekerja.
 - 2) Mekanisme penanganan penyakit pada semua tingkatan dengan peran serta seluruh pihak terkait.
 - 3) Keamanan pariwisata, keamanan risiko, terorisme, bencana alam, manajemen rencana tanggap darurat.
- g. Mengendalikan kegiatan pariwisata
- 1) Pengendalian intensitas penggunaan:tekanan pada lokasi dan sistem, jumlah wisatawan dan kepadatan yang berlebihan.
 - 2) Manajemen operasi: olahraga, pameran, pengendalian massa.



D. Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan merupakan landasan bagi industri pariwisata masa depan yang mengedepankan kualitas, kesinambungan dan keseimbangan. Tahap implementasi strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan meliputi kolaborasi dan menarik partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata.

Keberlanjutan juga dijelaskan sebagai penerapan sistem pengelolaan pariwisata yang baik yang melibatkan banyak aktor berbeda seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Khairunnisa adalah partisipasi, partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, tanggung jawab, promosi dan pelatihan (Khairunnisa, 2020).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan pariwisata yang dicapai tidak hanya dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang sehingga generasi mendatang dapat memperoleh manfaat darinya. Pembangunan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan memerlukan perencanaan, penelitian,



pelaksanaan dan pemantauan yang baik terhadap berbagai kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan (Sutiksno et al., 2020).

Sedangkan menurut Utama, pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan rencana strategis untuk merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata (Utama, 2016) guna melestarikan alam, budaya, dan lingkungan untuk masa depan. Pengelolaan pariwisata dikembangkan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Beberapa elemen yang menjadi tujuan utama program pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah:

2. Untuk menjaga lingkungan hidup, semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata wajib menjaga lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata tidak boleh melakukan penggundulan hutan, mencemari alam, dan merusak cagar alam. Oleh karena itu, dalam mengembangkan industri pariwisata perlu dilakukan kegiatan pelestarian alam dan lingkungan hidup.
3. Pembangunan pariwisata harus berkelanjutan dengan menjaga sumber daya alam dan melestarikan budaya masyarakat setempat. Karya seni dan



peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dapat diintegrasikan ke dalam produk pariwisata.

4. Pembangunan pariwisata perlu memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam langka yang perlu dilindungi, dipelihara atau dikembangkan.
5. Keterlibatan masyarakat setempat, pengembangan pariwisata harus ada peran serta masyarakat setempat agar masyarakat mempunyai rasa kepemilikan, kepentingan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam serta bersedia menjaga keseimbangan antara perekonomian dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan pariwisata harus mampu melindungi perekonomian masyarakat lokal dan memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata yang dikembangkan di lingkungannya.
6. Memberikan manfaat kepada wisatawan yang berkunjung dengan emosi dan pengalaman positif. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata dapat memberikan kesan dan kualitas kepada



wisatawan sehingga mereka puas dengan industri pariwisata yang dihadirkan kepada mereka.

7. Menyeimbangkan kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Menjaga hubungan baik antara masyarakat, wisatawan dan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan wisatawan.
8. Capaian pembangunan pariwisata harus selaras dengan visi dan misi pariwisata berkelanjutan.
9. Pengembangan pariwisata harus mematuhi undang-undang, perjanjian dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Pembangunan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi mendatang.
11. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata. Program pengembangan dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan, pengajaran, penelitian banding, sertifikasi pada bidang khusus



sesuai bidang profesi masing-masing di bidang pariwisata.





PRINSIP TATA KELOLA PARIWISATA LINGKUNGAN HIDUP

Pariwisata adalah salah industri penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan bagi negara. Pariwisata telah menjadi kunci pertumbuhan global, pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata merupakan industri potensial yang perlu dikembangkan. Pariwisata mempunyai potensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi perekonomian, mengurangi kemiskinan dan menciptakan hubungan timbal balik dengan sektor lain terutama penyedia jasa.

Tata kelola pariwisata yang baik sebenarnya memerlukan kerjasama banyak pemangku



kepentingan karena industri pariwisata terdiri dari banyak pemangku kepentingan berbeda yang bersama-sama menyediakan jasa pariwisata. Penting untuk mengelola hubungan antar pemangku kepentingan dalam hal peran dan kepentingan

A. Prinsip Tata Kelola Pariwisata Lingkungan Hidup

1. Konsep Pembangunan Pariwisata

Sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang Master Plan pengembangan pariwisata periode 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multisektoral yang mencerminkan kebutuhan setiap orang dan setiap individu negara serta interaksi antar wisatawan. dan komunitas lokal, wisatawan lain, pemerintah, otoritas regional, dan pelaku bisnis.
- b. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka menciptakan nilai tambah yang diinginkan.

Pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk



menciptakan nilai tambah pada seluruh aspek industri pariwisata, mulai dari infrastruktur dan atraksi wisata dan aspek lainnya. Sasaran pembangunan pariwisata nasional adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
- b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mengintegrasikan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan ekonomis

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan bertujuan agar banyak destinasi wisata masyarakat dapat dikenal baik oleh masyarakat maupun masyarakat global serta dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya mencegah kerusakan. Namun di sisi lain, penyelenggaraan pariwisata selalu memerlukan perbaikan.



Dengan kepariwisataan terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan kepariwisataan dalam aspek sosial yang berkaitan dengan hubungan antar manusia khususnya wisatawan dengan masyarakat lokal di tempat tujuan wisata. Jadwal, selain itu kegiatan ini tidak menutup kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan fisik di daerah tujuan.

Dampak pengembangan pariwisata dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada kegiatan pengelolaan pariwisata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan faktor lainnya, serta masyarakat di daerah tujuan wisata.

Secara teoritis tujuan dan misi pembangunan pariwisata akan tercapai apabila proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui prinsip tata kelola pariwisata yang baik. Prinsip penerapan tata kelola pariwisata yang baik pada dasarnya didasarkan pada koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta implikasi partisipasi aktif yang sinergis (integrasi dan saling memperkuat) antara pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat lokal.

Kepariwisata nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, menjadikan kepariwisataan bertumpu pula



pada semua aspek kehidupan masyarakat, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kepariwisata mampu membangun kondisi semua aspek kehidupan bangsa dan pariwisata akan turut mampu membangun:

- a. Ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- b. Ketahanan Politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan proaktif.
- c. Ketahanan Ekonomi, yaitu kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara kemampuan stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.



- d. Ketahanan Sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan social budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras,serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan Hankam, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh insan pariwisata yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasilhasilnya, mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Selain kelima aspek tersebut berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan kepariwisataan, ada tiga faktor yang sangat berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia yaitu:

- a. Sumber Daya Alam

Telah diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beranekan ragan dan mempunyai unsur-unsur keindahan alam (natural beauty),



keaslian (originality), kelangkaan (scarcity), dan keutuhan (wholeness) dan diperkaya dengan kekayaan alam berupa keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata di Indonesia.

b. Penduduk

Penduduk Indonesia yang beradat dan ramah tamah, terdiri atas beberapa suku bangsa dengan keanekaragaman budaya yang sangat berpengaruh bagi upaya pembangunan nasional yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

c. Geografi

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan luas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi yang 2/3nya berupa perairan dan mempunyai garis pantai lebih dari 81.000 km. Letak Indonesia yang strategis menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan bangsa dan negara. Kondisi geografis yang demikian memberikan peluang besar bagi upaya pengembangan pariwisata. Melalui pengembangan pariwisata yang



komprehensif dan inklusif dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kondisi geografis, akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya ketahanan nasional yang tangguh.

d. Kegiatan utama di bidang pariwisata

Pariwisata mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata serta kegiatan usaha lain yang terkait. Pembangunan pariwisata pada hakikatnya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman tradisi, seni dan budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Perkembangan destinasi wisata jika dipadukan dengan pengembangan usaha pariwisata seperti usaha perjalanan wisata, usaha akomodasi, dan transportasi wisata akan mampu meningkatkan daya tarik bagi semakin banyaknya wisatawan dan juga mendukung pengembangan destinasi wisata baru. Hasil yang optimal dapat dicapai jika upaya pembangunan tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur yang tepat.



Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonom suatu negara. Pembangunan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata suatu daerah harus memperhatikan potensi daerah tersebut. Semakin besar potensi yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar kemungkinannya untuk berkembang menjadi daerah tujuan wisata.

Secara sosial, masyarakat di wilayah yang bersangkutan mempunyai karakter sosial yang luhur berupa keramahan dan penerimaan yang mudah terhadap siapapun yang memasuki wilayahnya. Potensi sosial ini akan memudahkan terjalinnya interaksi sosial yang lebih akrab dan terbangunnya hubungan antar manusia yang lebih harmonis, selain itu berbagai tradisi unik dapat diintegrasikan ke dalam produk pariwisata untuk promosi.

Dari segi budaya, kawasan yang bersangkutan banyak mempunyai karya seni dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai



seni tinggi dan juga dapat diintegrasikan menjadi produk pariwisata. Dari segi alam, kawasan yang dimaksud mempunyai potensi alam dengan keunikan dan keunggulan tersendiri. Keanekaragaman satwa endemik di kawasan tersebut juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk wisata. Potensi alam ini merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri.

Pembangunan pariwisata adalah suatu upaya terencana dan terstruktur untuk meningkatkan objek dan kawasan wisata yang sudah ada serta membangun objek dan kawasan wisata baru untuk pemasaran kepada wisatawan potensi wisata. Pengembangan pariwisata pada prinsipnya sama dengan pengembangan produk pariwisata, dimana pengembangan produk pariwisata merupakan sarana pariwisata yang harus beradaptasi dengan perubahan selera pariwisata yang sangat dinamis. Untuk mendorong pengembangan pariwisata perlu dilakukan beberapa upaya secara terpadu dan efektif, yaitu:

- a. Mendorong pengenalan objek dan kawasan pariwisata.
- b. Transportasi yang nyaman
- c. Kemudahan imigrasi atau birokrasi
- d. Akomodasi menjamin kenyamanan menginap



- e. Pemandu wisata yang berkualitas
- f. Menyediakan barang dan jasa dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau.
- g. Isi waktu dengan tempat wisata yang menarik
- h. Lingkungan bersih dan higienis.

2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan hidup manusia di masa depan (Brundlandt, 2001). Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai kemajuan yang dicapai dari interaksi antara aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek sosial politik, sehingga pola perubahan yang terjadi dalam aktivitas manusia dapat menjamin kehidupan manusia. masyarakat hidup saat ini dan esok dan memiliki kemampuan untuk mengakses pembangunan sosio-ekonomi tanpa melampaui ambang batas lingkungan (CMED, 1987).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjamin tercapainya manfaat optimal secara berkelanjutan, hanya dapat dicapai dengan pendekatan (kebijakan) yang komprehensif



dan terpadu. Pembangunan pariwisata harus menghormati prinsip “di sini senang, di sana senang”. Artinya prinsip ini harus mampu membuat wisatawan membawa kenangan indah terhadap destinasi wisata atau tempat tujuan wisatanya, karena membawa kenangan manis bagi wisatawan dan mengajarkan untuk memberikan sesuatu yang.

Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian diterapkan pada industri pariwisata oleh Burns dan Holden (1997) sebagai model yang mengintegrasikan lingkungan fisik (lokasi), lingkungan budaya (host community) dan wisatawan (traveler). Prinsip-prinsip yang menjadi landasan acuan pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Burns dan Holden (1997) adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan mempunyai nilai hakiki dan juga dapat menjadi aset pariwisata. Penggunaannya tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga bermanfaat bagi generasi mendatang.
- b. Pariwisata harus dihadirkan sebagai kegiatan positif yang membawa manfaat bersama bagi masyarakat, lingkungan, dan wisatawan itu sendiri.
- c. Hubungan pariwisata dengan lingkungan hidup harus dikelola agar lingkungan



hidup lestari dalam jangka panjang. Pariwisata tidak boleh merusak sumber daya, tidak memberikan manfaat bagi generasi mendatang, dan tidak memberikan dampak yang dapat diterima.

- d. Kegiatan pariwisata dan pembangunan harus memperhatikan skala, sifat dan karakteristik lokasi dimana kegiatan tersebut dilakukan.
- e. Harus dibangun keselarasan antara kebutuhan wisatawan, lokasi/lingkungan dan masyarakat setempat.
- f. Dalam dunia yang dinamis dan terus berubah dan bermanfaat. Beradaptasi terhadap perubahan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip.
- g. Industri pariwisata, pemerintah daerah dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk memperhatikan prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama untuk menerapkannya.

Diperlukan sistem pengelolaan pariwisata terpadu untuk membangun pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Sistem ini mencakup sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan seluruh kepentingan pemangku kepentingan seperti:



pemerintah, masyarakat lokal, pengusaha, peneliti, akademisi, wisatawan dan LSM.

Tanggung jawab masing-masing pelaku berbeda-beda. Pemerintah bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengembangan daerah tujuan wisata. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas telekomunikasi, fasilitas air minum, dan sistem pengolahan limbah.

Entitas lain yang mempunyai tanggung jawab sesuai prinsip perencanaan juga harus memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul baik secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Selain itu perencanaan juga harus dapat memberikan pedoman agar semua pihak dapat menikmati manfaat wisata lingkungan secara optimal dan dapat meminimalkan dampak negatifnya.

Dari sudut pandang ekologi, perencanaan untuk mengukur daya dukung lingkungan merupakan hal yang penting sebelum suatu lokasi dikembangkan menjadi kawasan wisata. Daya dukung lingkungan akan menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mendukung kegiatan seperti penyediaan air minum, pengelolaan lahan,



dan keanekaragaman hayati wilayah. Kapasitas lingkungan pariwisata akan dikaitkan dengan jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi situs cagar budaya, fasilitas yang dapat dibangun, dan permasalahan sampah yang timbul dari kegiatan tersebut. Selain itu, material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas wisata merupakan produk lokal dan berkekuatan rendah.

Secara ekonomi, rencana pembangunan pariwisata harus mencakup perhitungan biaya dan manfaat pembangunan. Dalam menghitung biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*), kita tidak hanya memperhitungkan manfaat ekonomi yang akan diterima oleh para pemangku kepentingan, namun juga biaya-biaya yang akan dikeluarkan, misalnya biaya pemeliharaan atau pemeliharaan lingkungan hidup. Tentu saja jangka waktu yang diperhitungkan dalam perhitungannya bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, pada tataran sosio-kultural, perencanaan perlu mencakup kondisi sosio-kultural masyarakat setempat yang mungkin timbul selama kegiatan pariwisata serta dampak negatif yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya.



Keberhasilan pariwisata bergantung pada banyak faktor, yang dapat dibagi menjadi tiga faktor utama: faktor internal, faktor eksternal, dan faktor struktural. Faktor internal dapat digolongkan sebagai potensi pengembangan wisata daerah, pengetahuan pelaku wisata terhadap pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat setempat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor utama yang berasal dari luar daerah tujuan wisata, seperti kesadaran wisatawan terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan penelitian/pendidikan di daerah tujuan wisata, dan lain-lain kawasan pariwisata untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan masyarakat setempat. Faktor struktural merupakan faktor yang berkaitan dengan kelembagaan, kebijakan, dan peraturan pengelolaan kawasan wisata (lokal, regional, nasional, dan internasional). Sebaliknya, ketiga faktor kunci keberhasilan tersebut dapat menjadi penghambat pengembangan pariwisata.

Untuk mencapai pariwisata ramah lingkungan, diperlukan adanya tour operator yang menurut Wood (2002) bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan informasi sebelum perjalanan terkait budaya dan lingkungan lokasi



- b. Melakukan pengarahan pada saat kedatangan termasuk informasi mengenai kondisi geografis, sosial, politik dan beberapa kendala/tantangan.
- c. Menyediakan pemandu lokal yang terlatih.
- d. Menciptakan peluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.
- e. Mengembangkan pemahaman tentang kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat setempat serta berbagai permasalahan yang dapat dibicarakan saat berinteraksi dengan masyarakat setempat.
- f. Terbukanya kesempatan bagi LSM yang ingin berpartisipasi.
- g. Mengatur pembayaran penuh seluruh tiket masuk.
- h. Menyediakan akomodasi yang ramah lingkungan (site-sensitive).

Sesuai karakteristiknya, operator wisata selain berfungsi sebagai pemandu wisata yang menyediakan informasi yang dibutuhkan wisatawan juga menyiapkan akomodasi yang ramah lingkungan (eco-lodge) sebagai akomodasi.

Akomodasi ramah lingkungan dianggap merefleksikan inisiatif lokal dengan menerapkan desain lokal dan pemakaian bahan lokal. Akomodasi khusus yang dibangun ini mampu menghindari tekanan yang terlalu banyak bagi lingkungan dan



relatif mudah dalam perawatannya. Selain itu, wisatawan akan lebih terkesan dengan suasana eksotik yang muncul dari akomodasi semacam ini. Wood (2002) menyatakan ciri-ciri eco-lodge sebagai berikut:

- a. Perlindungan lingkungan alam dan budaya.
- b. Meminimalkan dampak negatif dalam proses pembangunan.
- c. Dibangun sesuai dengan budaya setempat seperti bentuk dan warna.
- d. Gunakan air secara efektif.
- e. Memastikan pengelolaan limbah.
- f. Menggunakan energi yang ramah lingkungan.
- g. Membuka peluang interaksi masyarakat lokal.
- h. Menyediakan program pendidikan bagi operator, wisatawan dan penduduk lokal tentang lingkungan alam dan budaya.
- i. Berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan melalui program penelitian.

Selain itu, unsur penting lainnya dalam pengelolaan pariwisata adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat lokal dapat melakukan kegiatan pariwisata dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial budaya setempat. Usaha



pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan agar masyarakat mampu membuat keputusan sendiri agar dalam pengembangan wisata mampu mempresentasikan inisiatifnya dalam hubungan dengan stakeholders lain.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat penting untuk disosialisasikan bahwa kegiatan wisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Hal ini penting agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga. Hubungan dengan stakeholders lain juga dapat saling bahu membahu untuk melaksanakan konservasi.

Untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan diperlukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan internal dilakukan oleh pengelola sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak eksternal seperti masyarakat, LSM dan organisasi independen lainnya.

3. Prinsip-Prinsip yang membentuk Pariwisata

a. Berkelanjutan

Mendorong keberlanjutan ekonomi, peningkatan masyarakat, dan konservasi



geologi. Tantangan di wilayah atau negara mana pun adalah mengembangkan kapasitas pariwisata dan kualitas produk tanpa mengorbankan lingkungan yang memelihara dan menopangnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa jenis, lokasi dan luas pemanfaatan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam.

b. Manfaat bagi masyarakat lokal

Partisipasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Komunitas lokal dapat berpartisipasi dalam kegiatan geowisata dan memberikan pengetahuan, layanan, fasilitas dan produk. Sektor ini dapat menghasilkan pendapatan untuk pengelolaan konservasi sumber daya selain manfaat budaya dan sosial. Kontribusi dapat berupa finansial, dengan sebagian dari biaya pariwisata membantu mensubsidi proyek konservasi lingkungan. Atau, hal ini mungkin melibatkan dukungan praktis di lokasi bagi wisatawan yang terlibat dalam pengumpulan dan/atau analisis data geologi.

c. Orientasi Kepuasan wisatawan

Konsep ini mencakup pentingnya keselamatan pengunjung ketika mengunjungi suatu situs warisan budaya.



Informasi yang diberikan mengenai peluang harus secara akurat mewakili peluang yang ditawarkan di suatu destinasi tertentu. Pengalaman geowisata harus memenuhi atau melampaui harapan realistis pengunjung. Pelayanan dan kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas kedua setelah melestarikan dan melindungi apa yang mereka kunjungi.

4. Kontribusi Pariwisata dalam Pengembangan SDGs

Peran pengembangan pariwisata ini cukup penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kontribusi geowisata dalam SDGs.

Tabel 4.2 Kontribusi dalam Pengembangan SDGs

No.	<i>Sustainable Development Goals</i>	Deskripsi
1.	SDGs Mengurangi Kemiskinan	1. Memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak dan bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang ekstrem dan terkait dengan perubahan iklim
2.	SDGs Pendidikan berkualitas	4. Mendidik masyarakat lokal dan pengunjung untuk menerapkan pengetahuan tentang



pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup, menghormati keberagaman dan perdamaian

3. SDGs Kesetaraan Gender

5. Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat, konservasi dan pembangunan

4. SDGs 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi

Memperkuat perekonomian lokal yang berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata yang menciptakan peluang kerja sambil mempromosikan budaya dan produk lokal

5. SDGs 11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

Melindungi warisan budaya dan alam serta membuat masyarakat bangga terhadap daerahnya

6. SDGs 12. Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab

Mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup harmonis

7. SDGs 13. Penanganan Perubahan Iklim

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran, kapasitas untuk melakukan mitigasi dan beradaptasi



terhadap dampak bencana perubahan iklim

8. SDGs Ekosistem Lautan 14. Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir, meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya laut

9. SDGs Ekosistem Daratan 15. Menjamin konservasi ekosistem wilayah darat dan pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan

10. SDGs Kemitraan untuk mencapai tujuan 17. Memperkuat jaringan kerja sama aktor lokal dan regional serta internasional dalam berbagai gagasan tentang pengetahuan dan praktik yang baik

Sumber: Pardede, 2021

Berkelanjutan sebagai “pembangunan” adalah upaya untuk mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Pada prinsipnya, berkelanjutan berusaha untuk menyeimbangkan antara ekonomi



keberlanjutan, keberlanjutan social, dan ekologi kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Sari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu:

- a. Menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban etis ini mencakup tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat dari jasa serupa.
- b. Karena alasan ekologi, misalnya keanekaragaman hayati mempunyai nilai ekologis yang sangat tinggi, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak boleh diarahkan pada kegiatan yang hanya memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup,



kegiatan yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

- c. Alasan ekonomi, masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini memenuhi kriteria keberlanjutan, karena kita tahu bahwa aspek-aspek ekonomi berkelanjutan juga cukup kompleks, oleh karena itu seringkali aspek keberlanjutan ekonomi adalah terbatas pada mengukur kesejahteraan antargenerasi.

Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, agar dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Apabila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu.

B. Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhlukhidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi



kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2)).

Istilah sumber daya alam secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: "Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat



lokal, serta. Penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang”.

Dalam UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Bab II pasal 3 poin e berbunyi “Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup”. Inilah yang seharusnya terjadi terhadap sumber daya alam dan lingkungan kita. Secara umum, sumber daya alam diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomi. Sumber daya alam juga dapat dikatakan sebagai komponen ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi kebutuhan manusia. Suatu sumber daya dapat dikatakan sebagai sumber daya alam apabila memenuhi dua kriteria berikut: pertama, harus terdapat pengetahuan, teknologi, atau keterampilan untuk memanfaatkannya, dan kedua, harus terdapat kebutuhan akan sumber daya tersebut, bahan baku alam.

Segala sesuatu yang ada di sekitar alam adalah lingkungan hidup, dan apabila faktor-faktor lingkungan itu bermanfaat bagi manusia, maka disebut sumber daya alam. Secara singkat sumber daya alam dapat diartikan sebagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, sumber daya alam akan bertambah



dan terus dibutuhkan seiring berjalannya waktu. Pemanfaatan sumber daya alam harus dibarengi dengan pemeliharaan dan konservasi karena sebagian sumber daya alam jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, demi keberlangsungan hidup manusia, perlu dilakukan tindakan yang bijaksana dan dibarengi dengan kesadaran yang mendalam terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencapai keberlanjutan yang kokoh.

Manusia adalah bagian dari alam, yang berarti menjaga keseimbangan alam sangatlah penting. Tidak jarang masyarakat lupa bahwa dirinya memerlukan sumber daya alam sehingga sering dieksploitasi dalam pemanfaatannya dan tidak memikirkan dampaknya. Saat ini banyak terjadi bencana alam akibat rusaknya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan faktor yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Faktor alam timbul dari fenomena alam yang tidak menentu seperti kondisi cuaca ekstrim dan perubahan iklim sehingga menimbulkan bencana alam seperti letusan gunung berapi dan tsunami. Sementara itu, faktor terkait aktivitas manusia berasal dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan seperti penggundulan hutan. Krisis ekologi yang terjadi saat ini adalah akibat langsung dari aktivitas manusia yang tidak



terkendali di alam. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, manusia dengan rakus mengeksploitasi alam.

Kesadaran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bijaksana sangatlah penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, maka manusia juga turut menjaga sumber ekonomi, karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Semua sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dinamakan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan berbagai jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi secara langsung. Namun ada juga sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Kemudian dilakukan usaha pengolahan atau manufaktur. Seperti perusahaan penanaman padi dan hortikultura, perusahaan kerajinan dan industri.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan sosial utama yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesehatan ekosistem. Menciptakan lingkungan yang bersih dan menjaga keseimbangan alam dapat dilakukan dengan melakukan konservasi demi pengelolaan



sumber daya alam yang baik. Melalui semangat dan jiwa konservasi, diharapkan manusia bisa lebih bijaksana dalam melihat serta memperhatikan kelanjutan kehidupan di bumi dan berusaha memperbaiki keadaan alam yang telah rusak. Oleh karena itu, konservasi wajib dilakukan apabila manusia masih ingin menghirup udara bersih, meminum air dari sumber yang bersih dan menikmati panorama yang eksotis. Dengan begitu, kebelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dapat terwujud.

1. Sumber Daya Alam Utama dan Pembangunan Berkelanjutan

a. Tanah dan Lahan

Tanah merupakan bagian kerak bumi yang terletak pada lapisan paling atas. Bagian litosfer ini berasal dari pelapukan batuan penyusun lapisan bumi yang tersusun dari air, udara, dan bahan organik lainnya. Indonesia mempunyai tanah dengan tingkat kesuburan yang bervariasi. Kesuburan tanah menjadikan tanah sebagai sumber daya alam. Tanah tergolong sumber daya alam abiotik atau abiotik. Meskipun kesuburan tanah pada akhirnya dapat habis, namun kesuburan tersebut dapat dipertahankan, itulah sebabnya tanah tergolong sebagai contoh sumber daya alam terbarukan. Tanah



merupakan tempat hidup berbagai jenis organisme tanah. Sedangkan pengertian tanah adalah lingkungan fisik yang meliputi tanah, air, tumbuh-tumbuhan, iklim dan benda-benda lain yang terdapat pada suatu wilayah daratan. Tanah memainkan peran penting dalam semua kehidupan di bumi, karena mendukung kehidupan tanaman dengan menyediakan nutrisi dan air serta mendukung akar tanaman. Struktur tanah yang berongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga merupakan habitat berbagai jenis mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah merupakan tempat tinggal dan beraktivitas.

Menurut beberapa ilmuwan tanah, ilmu tanah terbagi menjadi dua cabang utama:

- 1) Pedologi dalam penelitian ini mempelajari tanah sebagai objek geologi. Silsilah mencakup pengelolaan tanah (inventarisasi sifat dan perilaku tanah); Asal usul tanah (asal usul dan evolusi tanah); sistematis (klasifikasi tanah berdasarkan morfologi, sebaran dan fungsi); dan ekologi tanah (tanah adalah lingkungan tumbuhnya tumbuhan, hewan, dan manusia).



2) Edaphology atau ilmu kesuburan tanah mempelajari tanah sebagai benda penunjang kehidupan. Edaphology (ilmu tanah terapan) berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan dan hortikultura; memahami kesuburan tanah untuk membantu tanaman tumbuh lebih baik, meningkatkan dan menjaga kesuburan (hasil).

Istilah tanah mempunyai banyak arti:

- 1) Benda-benda alam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kualitas atau kesuburan tanah.
- 2) Bahan perusak iklim, yang berasal dari batuan atau bahan organik, digunakan untuk bahan penggalian, pertambangan, dan konstruksi. Dalam hal ini tanah merupakan satuan berat (ton) atau volume (m³).
- 3) Ruang atau tempat di permukaan bumi yang digunakan manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Dalam hal ini tanah dinyatakan dalam luas (ha, are, m²). Juga dapat dipandang sebagai tubuh alami yang tersusun atas kompleks ekosistem di dalamnya terdapat berbagai jenis



mineral dan organisme hidup, mulai dari mikroorganisma hingga vertebrata. Keberadaan dan perilaku organisme ini mengakibatkan tanah bersifat dinamis. Jenis- jenis sumber daya alam tanah dapat dibedakan menjadi 3 menurut sifat dari batuan induknya, yakni meliputi tanah vulkanik, tanah tersier dan tanah organik. Berikut adalah penjelasan masing-masing sumber daya tanah.

1) Tanah Vulkanik, yaitu tanah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi yang masih aktif. Proses pembentukan tanah vulkanik dipengaruhi oleh peristiwa meletusnya gunung berapi atau peristiwa vulkanisme. Ketika gunung berapi meledak, maka akan mengeluarkan material erupsi berupa lava dan lahar. Lava yang membeku kemudian menjadi batuan beku. Jika terjadi pelapukan pada batuan beku tersebut maka akan terbentuk tanah vulkanik. Kesuburan tanah vulkanik lebih tinggi dibandingkan jenis tanah lainnya. Jenis tanah ini mudah untuk ditanami dan menyediakan tanah yang subur dan subur untuk tanaman. Maka tak heran jika banyak orang yang bertani di kaki gunung.



- 2) Tanah tersebut bersifat non-vulkanik, artinya tanah tersebut tidak mengalami vulkanisasi.
- 3) Tanah organik adalah tanah yang terbentuk akibat pengendapan bahan organik. Jenis tanah ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah gambut dan tanah humus. Proses terbentuknya tanah gambut dipengaruhi oleh pembusukan bagian tanaman pada tempat yang selalu tergenang air. Contoh terbentuknya lahan gambut adalah rawa. Kesuburan tanah gambut sangat rendah karena tanahnya bersifat asam. Meski demikian, lahan gambut masih bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman pasang surut.

b. Udara

Sumber daya alam berikutnya adalah udara. Banyak orang yang salah mengira bahwa udara bukanlah sumber daya alam karena tidak terlihat. Asumsi ini salah. Udara adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Udara adalah kumpulan berbagai gas yang mengambang di permukaan bumi. Semua gas yang terkandung di udara dapat berubah komposisinya tergantung pada ketinggian



permukaan tanah. Ketika udara naik dan semakin dekat ke atmosfer, lapisan udara menjadi semakin tipis. Udara ini tidak dapat dilihat langsung dengan mata telanjang dan tidak berbau. Namun udaranya bisa dirasakan saat ada gerakan. Udara yang bergerak disebut angin. Udara yang berupa angin dapat menggerakkan benda-benda disekitarnya.

Angin muncul akibat adanya perbedaan suhu udara di permukaan bumi. Udara di tempat yang suhunya lebih rendah akan berpindah ke tempat yang suhunya lebih tinggi.) Pergerakan udara ini kemudian menimbulkan angin. Angin mempunyai energi yang dapat dimanfaatkan. Bahkan energi angin merupakan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan.

Fasilitas yang melaksanakan energi angin adalah pembangkit listrik tenaga angin (PLTB). Teknologi yang digunakan diadaptasi dari teknologi turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. Proses konversi energinya menggunakan bantuan turbin angin. Cara kerjanya adalah energi angin memutar turbin angin yang kemudian akan memutar rotor di dalam generator yang terletak di belakang turbin dari proses



itulah kemudian dihasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga baru ini memiliki banyak keuntungan, di antaranya yakni :

- 1) Energi angin tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui
- 2) Energi angin tidak menghasilkan emisi gas buangan seperti karbon dioksida.
- 3) Potensi energi angin sangat besar.
- 4) Listrik yang dihasilkan dari energi angin relatif stabil.
- 5) Lahan ladang angin dapat digunakan untuk keperluan lain karena pondasi turbin angin berukuran kecil.

Meski dikatakan ramah lingkungan, PLTB masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah hanya dapat digunakan di daerah yang banyak energi anginnya, biaya perawatan turbin anginnya cukup tinggi, dan dibutuhkan lahan yang luas untuk membuat ladang angin. Selain itu, turbin angin juga dapat membahayakan burung dan kelelawar di kawasan ladang angin.

c. Laut/Samudera

Laut adalah suatu perairan yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua dan pulau dengan benua dan pulau lain. Air laut



terdiri dari kombinasi 96,5% air murni dan 3,5% bahan lainnya. seperti garam, gas campuran, bahan organik, dan unsur yang tidak dapat bercampur. Sifat fisik utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni. Namun air laut di seluruh dunia memiliki konsentrasi garam yang berbeda-beda. Air laut paling segar ditemukan di Teluk Finlandia bagian timur dan Teluk Botania bagian utara, tetapi juga merupakan bagian dari Laut Baltik. Sedangkan air laut yang paling asin terdapat di Laut Merah.

Berikut beberapa potensi yang dimiliki lautan:

- 1) Sumber Daya Perairan Tidak dapat dipungkiri bahwa lautan mempunyai sumber daya perairan yang cukup kaya.
- 2) Tumbuhan laut Selain kelompok hewan yang hidup di laut, terdapat juga kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut yang juga mempunyai nilai gizi dan ekonomi yang besar. Salah satu produk yang diketahui manfaatnya adalah rumput laut, yang secara komersial dikenal sebagai alga. Alga, juga dikenal sebagai rumput laut, merupakan sumber daya hayati.
- 3) Penambangan mineral dan kelautan tidak hanya menyediakan makanan



dan obat-obatan bagi manusia, tetapi juga menyediakan deposit mineral dan operasi penambangan di dasar laut.

- 4) Transportasi dan Perhubungan, Dalam bidang transportasi, posisi laut sangat strategis baik untuk kawasan regional maupun dunia.
- 5) Wisata Bahari, Laut merupakan salah satu primadona dunia. Pesona alam laut dengan terumbu karang yang cantik serta beragam spesies koral dan ikannya. Tidak heran jika laut juga memiliki potensi dalam daya tarik wisata

d. Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan suatu wilayah yang mana menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman yang lain. Pengertian hutan tidak hanya berhenti sesederhana itu. Hutan juga bisa dikatakan sebagai ekosistem yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan terdiri dari tiga bagian utama: bagian atas, bagian permukaan, dan bagian bawah tanah. Di bagian atas hutan terdapat mulsa



alami, yaitu daun-daun pohon yang tumbuh lambat. Di permukaan hutan terdapat daun-daun kering berguguran, semak-semak dan ditumbuhi rumput. Sedangkan di bagian bawah tanah hutan terdapat unsur hara, akar pohon, sumber air dan juga habitat mikroorganisme.

Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lain secara rapat. Kawasan seperti ini terdapat di banyak belahan dunia dan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, habitat hewan, modulator aliran hidrologi dan konservasi tanah, serta merupakan salah satu aspek terpenting dari biosfer terestrial.

Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa suatu lahan luas yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam suatu lingkungan alam yang lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang umum di seluruh dunia. Hutan terdapat di daerah beriklim tropis dan dingin, di dataran dan pegunungan, di



pulau-pulau kecil, dan di benua besar. Hutan adalah kumpulan jenis tumbuhan, terutama pohon atau tumbuhan berkayu lainnya, yang menempati areal yang cukup luas.

2. Fungsi hutan

Hutan menutupi hampir sepertiga luas daratan bumi dan menyediakan infrastruktur organik yang diperlukan bagi kehidupan. Hutan juga merupakan rumah bagi kumpulan kehidupan terpadat dan paling beragam di planet ini. Secara umum hutan mempunyai pengaruh :

- a. Mengatur pengelolaan air atau menjaga fungsi hidrologi dan mencegah erosi.
- b. Merupakan sumber bahan baku hasil pertambangan seperti kayu bakar, fiber, buah-buahan dan hasil lainnya.
- c. Produksi kayu didasarkan pada sistem produksi berkelanjutan.
- d. Kebutuhan hiburan.
- e. Melindungi tumbuhan dan hewan.
- f. Tempat penyimpanan materi genetik atau sumber sumber daya genetik.

3. Tipe hutan



- a. Menurut fungsinya, hutan Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu :
- 1) Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi mengatur pengelolaan air, mencegah banjir, erosi dan menjaga kesuburan tanah.
 - 2) Hutan cagar alam adalah hutan yang karena sifatnya yang unik diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian materi genetik serta penunjang kehidupan.
 - 3) Hutan wisata adalah hutan yang diatur secara khusus untuk dikembangkan dan dipelihara untuk tujuan pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan.
 - 4) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang direncanakan untuk menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan ekspor. Hutan produksi meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas dan
 - b. hutan produksi jangka panjang,
- b. Hutan produksi yang dapat dikonversi juga dikenal sebagai



hutan konversi. Kawasan hutan ini dapat dikonversi untuk penggunaan lain seperti penghijauan, pertanian, dan pemukiman.

b. Hutan juga dapat dikelompokkan menurut bentukannya yaitu:

1) Hutan tropis. Penyebarannya sangat luas, mempunyai tipe vegetasi yang berbeda-beda dan tumbuh di daerah beriklim lembab (tipe A dan B). Hutan tropis dibedakan berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (dpl), khususnya:

a) Hutan tropis dataran rendah, tumbuh pada ketinggian 0 sampai dengan 1.000 m dpl, jenis tanah podsolik, latosol, dan tanah aluvial;

b) Hutan tropis dataran rendah, tumbuh pada ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut;

c) hutan hujan tropis alpin, tumbuh pada ketinggian lebih dari 2.000 m.

2) Hutan muson. Distribusinya terbatas dan tumbuh di iklim



musiman (tipe C dan D), tanah litosol, Mediterania, dan gromosol.

- 3) Panasnya hutan. Tumbuh pada pasir kuarsa, rendah unsur hara, jenis tanah podsol
- 4) Hutan stepa campuran, regosol dan grumosol
- 5) Hutan pantai. Tumbuh di tanah berpasir kering di sekitar pantai, tetapi di atas permukaan air pasang tertinggi, dengan tanah regosol (berpasir).
- 6) Hutan bakau atau hutan air payau (mangrove forest). Ditemukan di daerah pesisir dan tepi sungai dengan tanah berlumpur atau sedikit berpasir, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan tanah aluvial.
- 7) Hutan rawa. Pohonnya tumbuh di sekitar muara dan sering terendam air sungai segar (kaya unsur hara), tanah aluvial, dan lempung gley.
- 8) Hutan rawa gambut. Mirip dengan hutan rawa tetapi tumbuh pada lapisan gambut (bahan organik) yang belum lapuk sempurna, tebal 1 sampai



15 m, dan hutan tergenang air gambut yang berasal dari air hujan sejenis tanah organik.

2. Lingkungan Hidup

Habitat menyatukan seluruh komponen, dampak, dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Habitat bergantung pada banyak faktor, antara lain keadaan faktor lingkungan, kondisi fisik seperti suhu dan cahaya, berbagai faktor lingkungan, serta interaksi antar komponen lingkungan habitat hingga membentuk suatu ekosistem. Secara umum lingkungan hidup mempunyai tiga komponen yaitu: lingkungan hayati, lingkungan fisik, dan lingkungan budaya

a. Lingkungan hayati

Komponen lingkungan yang pertama adalah lingkungan hayati yang disebut juga dengan lingkungan biologi. Lingkungan biologis menyatukan semua organisme hidup di sekitar manusia. Menurut ukuran, makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis: mikroorganisme dan makroorganisme. Organisme makroskopis terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme meliputi bakteri dan pengurai



(detritivora). Selain itu, makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 menurut fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai.

- 1) Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Produsen juga dikenal sebagai autotrof. Makhluk hidup yang dianggap sebagai produsen adalah tumbuhan.
- 2) Konsumen yakni makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Konsumen bisa dijabarkan lagi menjadi konsumen I, konsumen II dan seterusnya. Konsumen I memperoleh makanannya dari produsen. Sedangkan konsumen II memperoleh makanannya (memakan) konsumen I.
- 3) Dekomposer yaitu makhluk hidup yang memiliki tugas menguraikan jasad makhluk hidup lainnya yang telah mati. Jasad makhluk hidup yang mati merupakan bahan organik yang kemudian diuraikan oleh dekomposer menjadi bahan anorganik. Makhluk hidup yang termasuk dekomposer adalah bakteri pengurai dan jamur.

b. Lingkungan fisik



Komponen lingkungan yang kedua adalah lingkungan fisik yang disebut juga lingkungan abiotik. Lingkungan fisik mencakup semua benda mati yang mengelilingi organisme hidup. Komponen lingkungan ini merupakan pelengkap lingkungan biologis. Unsur-unsur lingkungan fisik adalah matahari, air, udara, bumi, iklim dan lingkungan fisik lainnya. Inilah pentingnya peran setiap elemen lingkungan fisik.

Matahari merupakan salah satu komponen lingkungan fisik berupa sinar matahari yang mempunyai peranan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Sinar matahari juga diperlukan bagi makhluk hidup lainnya, terutama manusia, sebagai sumber energi.

- 1) Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air merupakan unsur terpenting dalam lingkungan fisik bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air akan terjadi kekeringan yang dahsyat. Begitu pula jika airnya terlalu banyak maka akan terjadi banjir.
- 2) Udara. Unsur lingkungan fisik berupa udara tidak kalah penting dengan air. Setiap makhluk hidup pasti bernapas.



Udara dibutuhkan dalam proses respirasi (bernapas) tersebut. Lapisan Udara terdiri dari berbagai macam gas. Manusia dan hewan membutuhkan udara dalam bentuk oksigen, sedangkan tumbuhan memerlukan udara dalam bentuk karbondioksida untuk berfotosintesis.

- 3) Tanah. Setiap makhluk hidup berdiri di atas tanah. Banyak mikroorganisme juga hidup di tanah. Di lahan tersebut juga dapat ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat sebagai makanan bagi manusia dan hewan.

c. Lingkungan sosial

Komponen lingkungan yang ketiga yakni lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan manusia dapat berwujud aktivitas antar sesama manusia maupun aktivitas yang berhubungan dengan alam. Terdapat dua jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, yakni asosiatif dan disosiatif. Kegiatan perkumpulan merupakan kegiatan yang menciptakan hubungan baik antara manusia dan alam. Misalnya saja penanaman pohon di lahan yang gundul. Kegiatan-kegiatan ini



berdampak pada hutan hijau dan perlindungan sumber daya air yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan kegiatan disosiatif adalah kegiatan yang menimbulkan hubungan buruk dengan alam atau menimbulkan kerugian satu sama lain. Misalnya saja membuang sampah ke sungai dapat mencemari ekosistem sungai dan pada akhirnya menimbulkan bencana banjir yang merugikan manusia.

3. Prinsip - Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan antara lain:

1) Keadilan

Kesetaraan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama. Pemerataan dipandang memiliki kemampuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan kesempatan bagi masyarakat.

2) 2. Perekonomian

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan ekonomi



menitikberatkan pada peningkatan keterampilan pekerja sehingga dapat meningkatkan daya saingnya dengan memperoleh lapangan kerja yang berkelanjutan, menekankan pada kerjasama ekonomi strategis, serta meningkatkan kinerja infrastruktur dasar. seperti perumahan, air, jalan... dan bahkan infrastruktur informasi. Berbeda dengan kota yang tidak menerapkan pembangunan berkelanjutan, karena kota dengan model pembangunan seperti ini menekankan persaingan antar sektor dan masyarakat, berkembangnya industri besar, serta keterbukaan, ekspansi ekonomi yang masif, dan ketergantungan yang sangat besar terhadap dunia usaha. Kota-kota yang menerapkan pembangunan berkelanjutan mendapatkan keuntungan dari kondisi sosial ekonomi yang baik karena adanya rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan modal kerja dan peluang kerja yang adil bagi masyarakat.

3) Energi

Penghematan energi merupakan bagian dari pembangunan



berkelanjutan. Contoh yang dilakukan adalah mengoptimalkan pembangunan gedung dengan penerangan alami sebanyak-banyaknya, mengutamakan pengembangan sistem transportasi umum, hemat massa dan energi serta tidak nyaman menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya.

4) Ekologi

Prinsip konservasi ekologi dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui penggunaan lahan campuran bila memungkinkan, sistem transportasi dan bangunan yang terintegrasi, memperhatikan keberadaan ruang terbuka, ruang hijau dan membatasi perluasan perkotaan yang berlebihan.

5) Partisipasi

Bentuk pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan dapat merespon aspirasi atau masukan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan meningkatkan dan



mengoptimalkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sedangkan menurut UNCED, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi:

1) Keadilan antar generasi.

Bahwa setiap generasi manusia di dunia berhak menerima dan menempati bumi yang tidak berada dalam keadaan konstelasi akibat perbuatan generasi sebelumnya.

2) Keadilan dalam satu generasi

Merupakan asas yang berbicara tentang keadilan dalam satu generasi umat manusia, yang mana beban permasalahan lingkungan hidup harus ditanggung bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.

3) Asas pencegahan dini

Mengandung makna bahwa apabila timbul ancaman besar yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat diperbaiki, tidak adanya hasil atau bukti ilmiah yang meyakinkan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

4) Melindungi keanekaragaman hayati

Merupakan prasyarat keberhasilan penerapan prinsip keadilan



antargenerasi. Melindungi keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati tertentu.

- 5) Internalisasi biaya lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup dapat dianggap sebagai biaya eksternal suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya alam.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan disebut dengan SDGs atau *sustainable development goals*. Program yang satu ini dijalankan sejak tahun 2015 dan menjadi program berkelanjutan Millenium Development Goals. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan berkelanjutan seperti berikut:

- 1) Mengentaskan kemiskinan.
- 2) Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.



- 3) Kehidupan sehat yang lebih sejahtera. Mampu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan di semua usia.
- 4) Mewujudkan pendidikan yang lebih komprehensif, ramah, dan bermutu.
- 5) Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
- 6) Membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inovasi, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dll.
- 7) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- 8) Mengambil langkah penting dalam perubahan iklim dan dampaknya, dan masih banyak lagi lainnya.

C. Keterlibatan Komunitas

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan gagasan yang dikenal luas di bidang pembangunan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan adalah perjalanan yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan saat ini dan masa depan. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial,



dan lingkungan hidup saat ini dan di masa depan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan hidup, dan masyarakat lokal serta berlaku untuk setiap orang. bentuk kegiatan pariwisata pada semua jenis daerah tujuan wisata, termasuk wisata massal dan jenis kegiatan pariwisata lainnya. Fandeli dan Muhammad (2019) menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan memerlukan perhatian terhadap lingkungan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat lokal, semakin berkembangnya budaya lokal dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Prinsip pariwisata berkelanjutan harus menjadi landasan pengembangan destinasi wisata. Jika toleransi materiil terlampaui maka akan berdampak besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dan lingkungan alam (Hadiwijoyo, 2018).

Pariwisata berkelanjutan adalah upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menyeimbangkan penyediaan dan pembangunan berkelanjutan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya untuk masa depan. Arti pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan dan



membawa manfaat saat ini dan masa depan (Sulistiyadi dkk, 2017).

Pembangunan berkelanjutan termasuk lokalitas adalah tantangan berikutnya. Artinya, peran serta masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam perwujudannya agar mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan pariwisata. Bentuk partisipasi lokal meliputi pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, pertimbangan tujuan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas, pembuatan dan promosi pelatihan (Teguh, 2015)

Partisipasi masyarakat adalah tindakan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan dari desa wisata. Proses keterlibatan dimulai dengan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kebutuhan mendasar dan komunitas. Berikutnya adalah proses pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi untuk mengelola dan mengatasi masalah tersebut. (Isbandi, 2007 dalam Wahyuni, 2019). Partisipasi merupakan komponen yang wajib dimiliki dalam proses pembangunan. Melalui proses ini, kapasitas dan upaya masyarakat lokal untuk menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan kolektif akan menjadi lebih kuat. Pertunangan tersebut menjadi legendaris selama proses pengembangan. Hampir semua negara secara luas menyatakan perlunya



berpartisipasi dalam semua proses pembangunan (Yunita, 2018).

Aktor utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah masyarakat lokal. Mereka harus mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata di daerahnya. Industri pariwisata secara tidak langsung akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat lokal. Dampak tersebut meliputi realitas sumber daya alam, budaya, tradisi, identitas dan benda peninggalan sejarah (Sedarmaanti dkk, 2018). Fungsi partisipasi masyarakat dapat menjadi agen yang mampu mengubah struktur pembangunan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan tersebut berpotensi memberikan dampak bagi para pelaku perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perubahan sosial di masyarakat (Wulandari dkk, 2022).

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk membantu masyarakat lokal berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pariwisata dan berbagi manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya secara adil. Selama ini pembangunan pariwisata berhasil mengurangi pengangguran dengan



menciptakan berbagai lapangan kerja seperti kantor pariwisata, pemandu wisata, akomodasi, makanan dan minuman. Dalam pelibatan masyarakat lokal, penekanannya adalah pada penghormatan dan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial nenek moyang. Dan terus melindungi warisan budaya dan nilai-nilai tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai tradisional agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Penggunaan sumber daya secara optimal merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata dan pemeliharaan proses ekologi yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati untuk menjaga proses yang berkelanjutan (Silvaana dan Moubarak, 2020).

Keterlibatan masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal. Masyarakat lokal harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan pengembangan pariwisata, proses pengelolaan, hingga pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar lebih banyak tentang rincian program dan akan menciptakan rasa memiliki terhadap program tersebut (Prentice, 1993 dalam Sarkar, 2020).



Bentuk partisipasi masyarakat berupa gagasan, tenaga, keterampilan dan keahlian. Bentuk partisipasi dalam pengembangan kawasan pariwisata ada tiga, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah-buahan. Refleksi tersebut terlihat dari partisipasi responden dalam pertemuan sosialisasi. Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan badan pengelola destinasi wisata. Perencanaan ini dikaitkan dengan pengembangan kawasan wisata. Oleh karena itu, partisipasi ini dapat digolongkan sebagai partisipasi interaktif.
2. Partisipasi sebagai energi. Bersedia ikut atau berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata. Mereka bekerja sebagai penjaga gerbang, juru parkir, penjaga pantai, dan melayani masyarakat atau membangun fasilitas pendukung yang ada. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam bentuk energi merupakan tingkat yang mendorong partisipasi.
3. Terlibat dalam keterampilan dan kemampuan. Keterlibatan ini dapat dilihat pada tingkat partisipasi dalam inisiatif.

Partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu faktor keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Unsur partisipasi masyarakat menjadi penggerak



utama masyarakat, masyarakat bergerak menuju kemandirian dalam proses pembangunannya. Dengan demikian, mereka benar-benar merasakan manfaat positif dari pengembangan desa wisata (Darmayanti et al., 2021).

1. Bentuk Partisipasi dalam Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perencanaan mengandung dukungan terhadap gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ternyata komunitas lokal mempunyai peranan penting dalam pengembangan pariwisata. Jika masyarakat setempat mendukung pembangunan, hampir bisa dipastikan prosesnya akan berjalan lancar. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- b. Komunitas lokal harus menerima dukungan keuangan untuk berinvestasi dalam pembangunan
- c. perjalanan
- d. Masyarakat lokal berperan penting sebagai wirausaha
- e. Masyarakat lokal harus berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pariwisata



- f. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir oleh pejabat pemerintah
- g. Masyarakat harus mempunyai suara dalam proses pengambilan keputusan.

Bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti pembentukan organisasi seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Pariwisata). Organisasi ini didirikan setelah melalui musyawarah antara masyarakat dan desa. Dalam kegiatan diskusi tersebut, keluarannya adalah pengambilan keputusan mengenai pembangunan infrastruktur dan infrastruktur pariwisata. Mereka yakin dengan pertimbangan tersebut akan tercapai hasil yang maksimal dalam mengembangkan suatu destinasi wisata.

Partisipasi masyarakat lokal dalam tahapan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Antusiasme dan partisipasi masyarakat setempat belum maksimal karena terbatasnya tingkat operasional dalam pengembangan wisata pusaka di kawasan Trowulan. Secara keseluruhan motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan pariwisata cukup baik. Namun bentuk tersebut masih belum merata karena bentuk yang paling



dominan adalah penyelenggaraan pameran dan festival (Widayawati, 2018).

2. Bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan

Bentuk partisipasi pada tataran implementasi merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun pada saat proses perencanaan. Bentuk penyertaan ini diawali dengan proses pencairan modal. Penggalangan dana dilakukan dalam bentuk pengajuan dan dukungan proposal dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Selain itu, hasilnya dikelola secara swakelola untuk membangun fasilitas (Kaharuddin dkk., 2020).

Ira dan Muhammad (2019) bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam proses pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah dengan terlibat langsung pada usaha-usaha pariwisata yang dilakukan lewat lembaga Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis mengelola usaha pariwisata seperti humas, pemasaran, kafe, dan live in. Keberhasilan pengelolaan dapat dilihat melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang. Perwujudan partisipasi dalam pelaksanaan dengan melaksanakan pembuatan seluruh sarana dan prasarana dan pembuatan jalan



untuk aksesibilitas, Selain itu, mereka juga berperan penuh dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan mengelola tempat parkir. Bentuk partisipasi masyarakat ini merupakan partisipasi tenaga yang merupakan partisipasi non materiil (Ratnaningsih dan Mahagangga, 2015). Kriska dkk (2019) menambahkan bahwa partisipasi kerja merupakan bentuk partisipasi yang sering diberikan oleh masyarakat lokal. Memang partisipasi ini tidak membutuhkan modal yang besar.

3. Bentuk partisipasi dalam pengkajian pariwisata berkelanjutan

Masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam proses pengkajian dan pemantauan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini penting karena mereka semakin dekat dengan tujuan mereka setiap hari. Oleh karena itu, mereka pun mengetahui segala capaian dan keterbatasan kegiatan pariwisata. Hasil observasi mereka juga harus dibandingkan dengan data yang dikumpulkan. Identifikasi permasalahan yang tepat juga akan menghasilkan solusi yang tepat dan dapat menyusun strategi baru untuk lebih mengembangkan destinasi pariwisata tersebut.

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari program pembangunan pariwisata



berkelanjutan. Langkah ini untuk mengevaluasi kesesuaian antara rencana dengan capaian program, mengidentifikasi potensi dan hambatan, serta memberikan saran perbaikan pada program berikutnya. Mekanismenya diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan evaluasi (Wahyuni dan Manaf, 2016). Evaluasi yang efektif membutuhkan serangkaian target spesifik dan terukur. Kinerja dan kemajuan dapat dilakukan penilainya selama dan setelah penyelesaian tindakan atau tugas strategis. Penting untuk memberikan pandangan seimbang pada kinerja dengan menggunakan informasi dari sejumlah indikator selama kurun waktu tertentu dan menghindari pengambilan keputusan hanya berdasarkan satu indikator saja (Cahyadi, 2019).

Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi ada dua, yaitu materil dan immateriil. Kebugaran ditunjukkan melalui kehadiran mereka pada penilaian rutin. Bentuk immateriilnya kemudian disampaikan dengan cara mengevaluasi dan menjelaskan



perkembangan usaha yang dijalankan, serta memberikan kritik dan saran untuk program selanjutnya. Partisipasi mereka dalam tahap evaluasi menjadi penting, mengingat masyarakat merupakan sasaran langsung dari program pembangunan pariwisata berkelanjutan (Rahma dan Niswah, 2020).

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi mana pun, baik swasta, keagamaan, pemerintah, atau organisasi nirlaba lainnya. Transparansi dan akuntabilitas telah muncul sebagai cara untuk mengatasi kegagalan pembangunan dan defisit demokrasi. Dengan akuntabilitas yang lebih besar, kebocoran seperti korupsi dan inefisiensi akan diperbaiki (McGee & Gaventa, 2011).

1. Transparansi Tata Kelola Pariwisata

Patrizia & Massimo (2014) menegaskan bahwa transparansi adalah tersedianya informasi yang relevan dan andal mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan tata kelola perusahaan suatu organisasi nirlaba. Piotrowski dan Van Ryzin (2007) menemukan bahwa dengan semakin besarnya transparansi dan kebebasan informasi dari pemerintah, semakin sulit untuk meminta pertanggungjawaban pejabat atau manajer atas tindakan mereka, namun



keterbukaan informasi akan mendorong akuntabilitas demokratis. Transparansi didefinisikan sebagai berbagi informasi dan bertindak terbuka, memungkinkan pemangku kepentingan mengumpulkan informasi yang mungkin penting untuk mendeteksi pelanggaran dan melindungi kepentingan mereka (Adyloglu & Vuran, 2012). Transparansi di sini berarti warga masyarakat mempunyai persamaan hak dan akses terhadap informasi mengenai proses penganggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat banyak (Kumalasari, 2016).

Penerapan prinsip transparansi yaitu pengungkapan informasi umum mengenai pariwisata, secara terbuka dan akurat.

- a. Penyediaan Informasi Keuangan dan Non Keuangan, dalam penyediaan informasi Non Keuangan dalam prinsip transparansi harus jelas dan akurat dan di bagikan atau yang mudah diakses oleh pihak internal bahkanpun pihak eksternal.
- b. Visi dan Misi, visi dan misi destinasi pariwisata menjadi tolak ukur perusahaan dalam mencapai target perusahaan.
- c. Strategi Perusahaan, manajemen destinasi pariwisata memiliki strategi dalam mencapai visi dan misi pariwisata



sehingga mampu bersaing dengan destinasi yang lain. Pelayanan yang baik dan yang ramah dan sopan.

- d. Sasaran Perusahaan, pencapaian prinsip transparansi adalah sasaran masyarakat, karena manajemen destinasi pariwisata harus memiliki sasaran perusahaan yang tepat yang tertulis dalam standart operasional perusahaan agar destinasi pariwisata memiliki tujuan jangka Panjang.
- e. Kondisi keuangan: Prinsip transparansi memegang peranan penting dalam kondisi keuangan, sehingga harus transparan kepada pemerintah karena destinasi wisata adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, selain transparan terhadap kondisi keuangan para pelaku usaha, mereka juga transparan terhadap pemerintah.
- f. Komposisi pengurus dan remunerasi pegawai, benar-benar transparan, susunan pengurus harus diumumkan secara publik kepada seluruh pegawai, bahkan kepada publik atau publik kepada pemangku kepentingan dan dalam rezim remunerasi. Remunerasi pegawai, dalam operasional Dari sudut pandang komersial, remunerasi pegawai perlu dituangkan secara tertulis dan disetujui



oleh karyawan, seperti peraturan kerja yang dibicarakan dan disepakati bersama.

2. Akuntabilitas Pemangku Kepentingan

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah penyediaan informasi dan publikasi kegiatan, oleh karena itu akuntabilitas berarti tanggung jawab untuk menciptakan pengawasan melalui alokasi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang menguntungkan. organisasi nirlaba. Gelfand dan rekannya (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi tanggung jawab atas tindakan yang sesuai dengan kontinjensi interpersonal, sosial, dan struktural. Akuntabilitas sebagai sebuah mekanisme memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola yang bertanggung jawab. Peraturan akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik atau lembaga publik tetap berada pada jalurnya. Akuntabilitas sebagai suatu mekanisme juga penting karena berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi administrasi publik. Selain itu, mekanisme akuntabilitas juga dapat mencapai tujuan yang lebih spesifik dan langsung (Bovens, 2010). Dua elemen ini harus ada agar terwujudnya suatu pengelolaan dan pelaporan yang baik sehingga menghasilkan sebuah informasi



yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

Penerapan asas tanggung jawab bertujuan untuk menyiapkan struktur organisasi yang memungkinkan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan aktif pariwisata.

- a. Pengawasan terdapat pada sistem pengendalian internal perusahaan, prinsip tanggung jawab ditekankan mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal sehingga destinasi wisata harus mempunyai sistem internal dalam pengelolaannya.
- b. Reward and punishment, penerapan prinsip akuntabilitas, struktur organisasi yang disusun, dengan reward dan punishment yang dapat menjadikan operasional menjadi efisien dan efektif.

E. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

1. Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan merupakan aspek penting yang berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, termasuk rasa menjaga lingkungan. Dalam hal ini pendidikan lingkungan hidup dijadikan sebagai pendidikan yang dilandasi rasa cinta



terhadap alam dan lingkungan hidup untuk menanamkan rasa menjaga lingkungan pada diri peserta didik. Karakter sadar lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berusaha mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Selain itu, pendidikan lingkungan hidup juga merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku wajar dan bertanggung jawab terhadap alam serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan lingkungan hidup dijadikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri atau sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang berbeda dalam kurikulum (Halidah, 2018).

Permasalahan lingkungan seperti banjir, penggundulan hutan, pencemaran air dan penyebaran penyakit terus mewarnai kehidupan manusia saat ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa pihak berusaha untuk mencegah permasalahan lingkungan yang akan timbul dan memperbaiki permasalahan lingkungan yang ada saat ini (Fua, 2013). Pemerintah, organisasi sosial, dan individu telah



melakukan berbagai cara dan upaya, seperti merumuskan kebijakan terkait lingkungan hidup dan gerakan lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian lingkungan dengan mengajak pihak lain untuk peduli terhadap lingkungan. Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus karena tidak adanya kesamaan makna dan tujuan antara pihak-pihak yang mencari solusi permasalahan lingkungan hidup dengan pihak yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, memulihkan ketidakseimbangan lingkungan hidup (Widaningsih, 2012).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dengan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, dan profitabilitas, pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Oleh karena itu, dalam pembangunan lingkungan hidup, tujuan pokoknya adalah tercapainya perubahan perilaku setiap anggota masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, agar memiliki pola tindakan dan perilaku yang



seimbang dengan potensi beban lingkungan hidup.

Pendidikan lingkungan hidup perlu mengubah cara berpikir, berperilaku dan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Berpikir mengubah cara berpikir kita tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan tanpa mempengaruhi lingkungan lain sehingga kita dapat menyelesaikannya tanpa menimbulkan permasalahan baru. Sikap dan pemahaman terhadap lingkungan diharapkan dapat mengubah sikap siswa, peduli terhadap lingkungan dan selalu berpikir untuk berdampak pada lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup dapat memperluas pemahaman siswa terhadap kondisi lingkungan hidup (Astriayulita, 2017).

Kajian kesadaran lingkungan hidup penting dilakukan, karena aspek kognitif penting bagi siswa untuk mengembangkan kesadaran aspek lingkungan hidup dan langsung menerapkan nilai-nilai dalam kehidupannya. Manfaat dari kesadaran lingkungan adalah perhatian yang lebih besar terhadap penyebab permasalahan lingkungan hidup, sehingga siswa dapat lebih mempertimbangkan dan menganalisis dampak perilakunya terhadap lingkungan, pada akhirnya mencapai kehidupan yang



harmonis dan seimbang antara seluruh elemen. Meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, khususnya pelajar, merupakan cara terbaik, karena mereka adalah pemimpin masa depan, perencana, pengambil kebijakan, dan pendidik lingkungan hidup (Dasrita et al., 2015).

Pendidikan lingkungan hidup adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pada anak atau peserta didik pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku yang wajar dan bertanggung jawab mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan lingkungan hidup merupakan program pendidikan yang berupaya melatih seseorang, dalam hal ini peserta didik, untuk berperilaku rasional dan bertanggung jawab ketika menghadapi permasalahan demografi dan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup yang timbul saat ini sangatlah mendesak dan perlu segera diselesaikan dan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Harapan kami dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, kita dapat menanamkan pada generasi muda pewaris



bumi kecintaan terhadap lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup di bumi dan dengan adanya pendidikan lingkungan hidup, kita berharap mampu menciptakan sekolah hijau (Afandi, 2013).

Pendidikan lingkungan hidup dapat membantu anak mengatasi permasalahan lingkungan hidup, penerapan pendidikan lingkungan hidup dapat mengembangkan pola pikir, tingkah laku, dan tindakan serta membantu anak berperilaku sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa konsep yang perlu diketahui dalam pendidikan lingkungan hidup antara lain:

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi kekuatan keagamaan, kemandirian, budi pekerti, kecerdasan, etika kemanusiaan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi masyarakat. pemerintah.
- b. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.



- c. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya perubahan perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai lapisan atau sektor masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dan lingkungan hidup, pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam konservasi. upaya dan keamanan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- d. Pendidikan lingkungan hidup formal meliputi kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui madrasah, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara terstruktur dan desentralisasi dengan pendekatan kurikulum terpadu atau monolitik (terpisah).
- e. Pendidikan lingkungan hidup nonformal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan di luar madrasah dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terdesentralisasi (misalnya pelatihan: AMDAL , ISO 14000, PPNS).



- f. Pendidikan lingkungan hidup nonformal meliputi kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan di luar madrasah dan dilaksanakan secara tidak terstruktur atau tidak berjenjang.
- g. Lembaga pendidikan lingkungan hidup menghimpun seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku, penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup, baik secara formal, informal maupun tidak resmi.

Pendidikan lingkungan hidup mempunyai tujuan yang tertuang pada Konferensi Federal tentang Pendidikan Lingkungan Hidup tahun 1975 di Tbilisi, kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut (Astriayulita, 2017).

sebuah.

a. Bidang Pengetahuan

Membantu individu, kelompok, dan komunitas memperoleh berbagai pengalaman dan memperoleh pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang berkelanjutan.

b. Bidang kesadaran

Membantu kelompok sosial dan individu untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang



menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan.

c. Bidang perilaku

Membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan.

d. Bidang ketrampilan

Membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk mendapatkan ketrampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan.

e. Bidang Keterlibatan

Memberikan peluang dan insentif bagi individu, kelompok, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan pendidikan lingkungan hidup yang diluncurkan pada konferensi Asia-Afrika adalah untuk membantu individu meningkatkan kesadaran lingkungan, memperoleh pengetahuan melalui berbagai jenis pengalaman, mengubah perilaku, memberikan keterampilan manajemen masalah serta kesempatan dan motivasi



untuk menjadi lebih proaktif. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

“The Belgrade Character-a Global Framework for Enviroment Education” adalah pernyataan hasil konferensi internasional di Beograd, Yugoslavia yang membahas pendidikan lingkungan hidup. Dari konferensi ini diambil tujuan pendidikan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan di bidang ekonomi, sosial, politik dan ekologi, baik di perkotaan maupun pedesaan.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, motivasi dan komitmen yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk memecahkan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru.
- c. Menciptakan kesatuan model perilaku baru bagi individu, kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan (Daryanto & Suprihatin, 2013).

Tujuan pendidikan lingkungan hidup pada konferensi internasional di Beograd adalah untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan peluang bagi masyarakat untuk



memperoleh pengetahuan guna memecahkan masalah lingkungan saat ini dan menciptakan model perilaku yang mendukung kelestarian lingkungan.

2. Kesadaran Lingkungan Hidup

Kesadaran merupakan kewaspadaan individu terhadap peristiwa di lingkungannya serta peristiwa kognitif, termasuk ingatan, pikiran, emosi, dan sensasi fisik. Menurut penafsiran lain, kesadaran diartikan sebagai keadaan sadar atau sadar akan perilaku seseorang, khususnya pikiran sadar yang mengatur akal dan dapat menentukan pilihan mengenai apa yang diinginkan orang (Here & Priyanto, 2014).

Kesadaran lingkungan hidup adalah keadaan terilhami oleh sesuatu, dalam hal ini lingkungan hidup, yang terlihat dari tingkah laku dan tindakan individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan hidup adalah suatu bidang atau kewaspadaan individu terhadap kondisi lingkungan hidup, baik lingkungan mati (abiotik) maupun lingkungan hidup (biotik) agar individu dapat memantau dan mengendalikan lingkungan hidup. Ada lima aspek kesadaran lingkungan, yaitu: kesadaran akan penyebab pencemaran, kesadaran terhadap bumi dan



udara, kesadaran akan perlindungan energi, kesadaran akan perlindungan biota laut dan perlindungan lingkungan hidup, kepunahan satwa, dan kesadaran terhadap satwa liar dan hewan. perlindungan. kepunahan (Here dan Priyanto, 2014).

Kesadaran lingkungan adalah tindakan atau sikap pemahaman akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih, dan sebagainya. Kesadaran lingkungan dapat dilihat melalui perilaku dan tindakan seseorang dalam situasi dimana ia merasa bebas dari tekanan. Diperlukan upaya tindakan sadar sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan baik. Ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan (Sugiarto dan Gabriella, 2020).

a. Faktor Ketidaktahuan

Didasarkan pada rasa ingin tahu. Kesadaran dapat dipahami sebagai pengetahuan. Jika kita mengatakan seseorang tidak sadar, berarti dia tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran lingkungannya.



b. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang akan memberikan tekanan terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menjadi sumber permasalahan sosial karena mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sendiri dibandingkan penyelesaian permasalahan lingkungan.

c. Faktor Manusia

Kemanusiaan artinya manusia atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk cerdas yang mampu memilih yang baik dan yang jahat. Jika seseorang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, maka ia akan memperhatikan hal-hal yang dapat menyelamatkan banyak orang dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi akan lebih sadar lingkungan untuk dapat menjaga lingkungan demi kebaikan bersama.

d. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran lingkungannya. Jika seseorang menjalani gaya hidup ramah lingkungan, maka ia akan berhati-hati dalam berbuat terhadap



lingkungan. Kepedulian mereka akan fokus pada segala sesuatu yang menghormati lingkungan dan pendapat mereka juga bertujuan untuk melindungi lingkungan

F. Peran Sektor Swasta

3. Konsep Investasi Hijau

Pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan telah menjadi komitmen hampir setiap negara di dunia sejak ratifikasi pertama Konsensus Kemitraan Global mengenai Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada tahun 2000. Konsensus yang disimpulkan pada tahun 2015 adalah bahwa kesepakatan kerangka kerja yang lebih luas berupa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) akan menyusul berakhir pada tahun 2030. Jika MDGs memiliki 8 tujuan utama, sedangkan SDGs memiliki tujuan yang lebih luas, maka terdapat hingga 17 tujuan dengan jargon utama “Tidak ada yang tertinggal”. SDGs adalah perjanjian pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Kesepakatan ini harus diimplementasikan oleh setiap negara



yang meratifikasi, sehingga praktek-praktek kebijakan dan perencanaan pembangunan selalu mempertimbangkan pencapaian tujuan SDGs. Implementasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dari level pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah.

Dalam implementasi pembangunan yang ramah lingkungan, baik dalam kerangka MDGs maupun SDGs, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan di bidang investasi atau penanaman modal yang menjadi mandat bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah payung hukum yang menjadi petunjuk kebijakan dan implementasi penanaman modal baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan investasi berkembang semakin dinamis setelah Pemerintah mengeluarkan undang-undang berskala besar (Omnibus Law) atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengefektifkan persoalan birokrasi dan kelembagaan yang selama ini terabaikan. dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peraturan yang berasal dari undang-undang



tersebut salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Investasi Portofolio Aktif (DPI). Perpres ini mengubah Daftar Negatif Investasi (DNI) model lama yang sebelumnya dijelaskan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada investasi dan depresiasi. Menerapkan perspektif teori pertumbuhan neoklasik, untuk menciptakan pertumbuhan hijau (green investment) diperlukan investasi dan penyusutan hijau, yang tidak hanya memperhitungkan penyusutan modal fisik tetapi juga penyusutan lingkungan. Investasi ramah lingkungan merupakan salah satu alat dan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan menghindari keterbatasan pertumbuhan. Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda mengenai investasi hijau, namun jelas bahwa definisi operasional investasi hijau, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan dituangkan dalam prinsip-prinsip pengelolaan, harus ditempatkan dalam suatu kerangka pertumbuhan berkelanjutan. Namun, tidak mudah untuk menerapkan pembatasan



karena luasnya cakupan dan aktivitas yang berasal dari investasi ramah lingkungan, misalnya bank ramah lingkungan, obligasi ramah lingkungan, dana ramah lingkungan, dan transaksi ramah lingkungan lainnya.

Investasi ramah lingkungan mencakup makna tersurat maupun tersirat serta makna luas atau umum yang berkaitan dengan minimalisasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. Namun, ada pula yang menjelaskan investasi ramah lingkungan pada tingkat yang lebih teknis dan spesifik. Misalnya rendahnya emisi gas rumah kaca, hemat energi. Investasi ramah lingkungan juga dapat diidentifikasi dengan menghubungkannya dengan sektor tertentu. Eyraud dkk. (2013), misalnya, mendefinisikan investasi hijau sebagai “investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara tanpa mengurangi produksi dan konsumsi barang-barang non-energi. Definisi ini mencakup investasi pemerintah dan sektor swasta. Ada tiga komponen utama investasi hijau:

Pasokan energi rendah emisi (termasuk energi terbarukan, bioenergi dan nuklir); efisiensi energi (produksi dan konsumsi energi); dan penangkapan dan penyerapan karbon (termasuk deforestasi dan pertanian).



Orientasi kebijakan investasi berwawasan lingkungan (green investment) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlunya koordinasi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah. serta program yang bertujuan mencegah kerusakan keanekaragaman hayati
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan
- c. Pembangunan Ekonomi Hijau
- d. Penyediaan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif investasi diberikan untuk investasi yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup, termasuk pencegahan pencemaran, mengurangi pencemaran lingkungan hidup, dan mendorong perdagangan karbon.
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi, dari hulu hingga hilir
- f. Pembangunan wilayah yang memperhatikan perencanaan wilayah dan kapasitas lingkungan atau daya dukung



4. Prinsip-Prinsip Investasi Hijau

Prinsip-prinsip Investasi Hijau penting dalam perancangan kebijakan atau peraturan, karena prinsip-prinsip ini secara praktis diterapkan dalam praktik investasi baik di tingkat sektor swasta maupun publik, tingkat politik negara atau daerah. Namun, belum ada kesepakatan baku mengenai prinsip-prinsip tersebut⁴. Mengutip Green Investment Group (GIG), ada beberapa prinsip dasar penerapan investasi hijau yang diterapkan dalam kegiatan investasi. Prinsip-prinsip tersebut dirangkum secara lengkap sebagai berikut:

a. Prinsip 1 Berkontribusi secara positif terhadap tujuan-tujuan ramah lingkungan/hijau yang diakui.

Investasi atau kegiatan yang dilakukan hanya memberikan kontribusi positif terhadap tujuan hijau (berkelanjutan). Terdapat lima destinasi ramah lingkungan:

- a. Mengurangi emisi gas rumah kaca
- b. Memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam
- c. Melindungi lingkungan alam
- d. Melindungi keanekaragaman hayati



- e. Mempromosikan kelestarian lingkungan
- b. Prinsip 2 Mengurangi emisi gas rumah kaca global Memastikan bahwa investasi atau kegiatan yang dilakukan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca global.
- c. Prinsip 3 Dampak Hijau Berkelanjutan Memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki dampak lingkungan yang berkelanjutan/berkelanjutan.
- d. Prinsip 4 Kriteria investasi yang jelas dan tepat Harus ada kriteria investasi yang jelas dan tepat serta memenuhi standar ramah lingkungan. Investasi yang dilakukan harus mematuhi seluruh peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
- e. Prinsip 5 Penilaian dampak lingkungan yang ketat. Sebelum investasi dilakukan harus dilakukan penilaian potensi dampak lingkungan berdasarkan pada proses dan pendekatan evaluasi yang kuat (robust) dan transparan.
- f. Prinsip 6 Perjanjian, pemantauan dan keterlibatan yang efektif. Menjamin perjanjian investasi yang benar, pemantauan dan keterlibatan yang terus menerus dan intens, untuk memastikan dampak investasi yang ramah terhadap lingkungan (green impacts).



- g. Prinsip 7 Pelaporan yang transparan
Pelaporan berkala untuk menjamin setiap investasi memenuhi prinsip-prinsip green investment.





INSTRUMEN TATA KELOLA LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA

A. Sertifikasi Lingkungan dalam Industri Pariwisata

1. Gambaran Umum Sertifikasi

International Organization for Standardization (ISO), mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) internasional yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Ini mencakup lebih dari 100 organisasi atau negara, termasuk Indonesia. ISO sering dianggap sebagai akronim (singkatan). Faktanya, ISO adalah kata Latin yang berarti “SAMA”. Oleh karena itu, tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan standardisasi



serupa di tingkat internasional. Upaya standarisasi standar yang sama di seluruh dunia memiliki nilai teknis yang besar dan telah berlangsung sejak lama karena berhasil memperkuat upaya bisnis internasional, berupa diversifikasi kualitas produk dan konektivitas yang tinggi.

a. Tujuan Sertifikasi

Saat ini pengelolaan bisnis dilakukan dengan berbagai cara untuk menciptakan keuntungan dan mempunyai daya saing yang baik. Perusahaan yang ingin bersaing secara global harus memiliki standar ISO agar kualitas produk yang dihasilkannya lebih dapat diandalkan.

Mengingat hal ini, ISO penting untuk digunakan dan memiliki tujuan yang baik dalam manajemen bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tujuan dan pentingnya ISO, simak informasi berikut ini.

1) Meningkatkan reputasi perusahaan

Penggunaan ISO dapat meningkatkan reputasi perusahaan, hal ini terutama penting jika ingin bersaing di pasar global. Calon pelanggan atau pelanggan bisnis Anda memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap merek Anda jika produk dan layanan



yang mereka gunakan memenuhi standar saat ini.

- 2) **Mengoptimalkan kinerja karyawan**
Perusahaan yang memiliki visi, misi dan kaidah mutu yang memenuhi standar dapat menjadikan kontennya optimal dan efektif. Karyawan yang bekerja pada perusahaan akan ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan standar perusahaan.
- 3) **Meningkatkan goodwill perusahaan**
Goodwill dalam bisnis merupakan suatu citra yang baik bagi setiap perusahaan di mata perusahaan. Dengan menggunakan sertifikat ISO yang diraih perusahaan akan membuat nilai perusahaan menjadi lebih positif. Cara ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan, sehingga banyak mitra bisnis yang mengajak kerjasama.
- 4) **Pencegahan Pemborosan**
Ketika suatu bisnis yang ada mengalami masalah pada suatu produk atau jasa, tentunya Anda perlu mengambil tindakan terlebih dahulu. Memiliki ISO tentunya akan memudahkan Anda dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Penggunaan “standar” merupakan suatu prediksi atau cara



untuk mencegah terjadinya masalah pada produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen.

b. Jenis Sertifikasi

Ada banyak jenis standar ISO dan oleh karena itu banyak pula jenis sertifikasi ISO. Berikut beberapa contoh sertifikasi ISO yang populer:

1) ISO 9001 (manajemen mutu):

Organisasi bersertifikat ISO 9001 memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengelola proses dan produk mereka dengan kualitas tinggi.

2) ISO 14001 (Pengelolaan lingkungan):

Standar ini membahas pengelolaan lingkungan dan praktik berkelanjutan. Organisasi bersertifikasi ISO 14001 berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka.

3) ISO 27001 (Manajemen keamanan informasi):

Standar ini berfokus pada perlindungan informasi dan data penting dalam organisasi. Ini mencakup aspek keamanan informasi, kebijakan, prosedur dan manajemen risiko.



4) ISO 45001 (Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja):

Standar ini berkaitan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Hal ini berkomitmen untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

5) ISO 50001 (Manajemen energi):

Ini adalah standar manajemen energi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam organisasi. Organisasi bersertifikat ISO 50001 berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan.

2. Sertifikasi Lingkungan

Proses bisnis yang dijalankannya dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Pada prinsipnya dampak yang ditimbulkan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak biokimia dan fisik, serta dampak sosial. Dampak fisiologis dan kimia antara lain pencemaran air, pencemaran udara, perusakan keanekaragaman hayati atau berkurangnya cadangan air tanah. Semua jenis dampak tersebut akan menimbulkan risiko yang mempengaruhi aktivitas yang dikelola perusahaan. Misalnya, pencemaran



air yang disebabkan oleh operasional perusahaan menimbulkan risiko pertanggungjawaban dalam bentuk tuntutan pidana dan perdata, baik tuntutan yang datang dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

a. Tujuan Sertifikasi Lingkungan

1) Mengukur Kinerja Lingkungan:

Salah satu tujuan utama sertifikasi lingkungan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau produk mematuhi praktik berkelanjutan. Hal ini mencakup pengukuran dampak lingkungan, seperti penggunaan sumber daya, pembuangan limbah, dan emisi.

2) Mendorong Keberlanjutan:

Sertifikasi ini bertujuan untuk mendorong organisasi dan produsen untuk mengadopsi praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Dengan sertifikasi, akan ada insentif untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan.

3) Membangun kepercayaan:

Sertifikasi membantu membangun kepercayaan di antara konsumen, pemangku kepentingan, dan



masyarakat umum. Organisasi atau produk tersertifikasi dapat menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar lingkungan yang ketat.

b. Jenis Sertifikasi Lingkungan

1) Sertifikasi Produk:

Sertifikasi produk berfokus pada produk yang memenuhi standar lingkungan tertentu. Contoh sertifikasi produk antara lain ecolabel untuk produk pertanian organik atau label efisiensi energi untuk perangkat elektronik.

2) Sertifikasi Organisasi

Sertifikasi Organisasi mengevaluasi seluruh aktivitas organisasi dalam konteks keberlanjutan. Contoh yang terkenal adalah standar ISO 14001, yang mengatur sistem manajemen lingkungan.

c. Manfaat Sertifikasi Lingkungan

1) Peningkatan keberlanjutan

Sertifikasi lingkungan mengarah pada peningkatan praktik lingkungan, termasuk pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi.

2) Kepercayaan publik



Konsumen dan pemangku kepentingan cenderung lebih percaya pada produk atau organisasi bersertifikat karena mereka tahu bahwa standar lingkungan telah dipenuhi.

3) Keunggulan pasar

Sertifikasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau produk, membantu mereka memasarkannya kepada pelanggan dengan perspektif berkelanjutan.

d. ISO 14001

ISO 14001 merupakan standar internasional tentang pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan penerapan standar ini bersifat sukarela. Rangkaian standar ISO 14001 diperkenalkan pada awal tahun 1990-an, mewakili perkembangan beberapa aspek manajemen atau manajemen mutu. Bukan hanya aspek teknis atau ekonomi. Tujuan ISO 14001 meliputi:

- 1) Untuk mendorong upaya dan pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta memastikan manajemen mutu yang konsisten secara global. Memperkuat



kapasitas organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lingkungan dan sumber daya alam.

- 2) Memberikan kemampuan dan sarana bagi kegiatan perekonomian dan industri agar bebas dari hambatan dalam berusaha.

Manfaat memperoleh sertifikasi ISO 14001 sangat penting bagi produsen, sebagai berikut:

- 1) Meminimalkan potensi konflik antara pekerja dan pengusaha dengan menyediakan lingkungan kerja yang baik dan sehat, sekaligus meningkatkan produktivitas pekerja dari segi waktu dan keuntungan.
- 2) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup secara lebih terencana dan terstruktur.
- 3) Memanfaatkan sumber daya alam secara lebih rasional untuk menciptakan efisiensi ekologis.
- 4) Menjaga citra perusahaan industri yang seringkali dikaitkan secara negatif dengan pencemaran lingkungan.

Manfaat memperoleh sertifikasi ISO 14001 antara lain bagi lingkungan:

- 1) Mengurangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia beracun.



2) Mengurangi limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial yang timbul dari keberadaan industri itu sendiri, misalnya dengan mengurangi kebisingan, pencemaran air, pencemaran udara, kemacetan dan tanggung jawab sosial.

Keuntungan diperolehnya sertifikasi ISO 14001 khususnya bagi konsumen adalah membantu mendukung perlindungan lingkungan melalui pembelian produk ramah lingkungan.

3. Sertifikasi Lingkungan dalam Pariwisata

Sertifikasi lingkungan dalam industri pariwisata merupakan suatu pendekatan untuk mengukur, mengelola dan meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Hal ini mencakup penilaian independen oleh lembaga sertifikasi terkemuka untuk memastikan bisnis pariwisata memenuhi standar tertentu untuk operasional berkelanjutan dan perlindungan alam. Tujuan utama sertifikasi lingkungan hidup dalam pariwisata adalah untuk memastikan pelaku usaha pariwisata mematuhi praktik berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan pengalaman positif bagi wisatawan.



a. Jenis Sertifikasi Lingkungan Hidup dalam Pariwisata

1) Sertifikasi Green Hotel

Merupakan sertifikasi yang dikeluarkan untuk perusahaan penginapan, seperti hotel dan resor, yang mematuhi standar keberlanjutan tertentu, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah ramah lingkungan.

2) Sertifikasi Taman Nasional Berkelanjutan

Beberapa taman nasional dan kawasan berpenduduk jarang menjalani sertifikasi untuk memastikan kelestarian ekosistem dan pengelolaan dampak pariwisata yang tepat.

3) Sertifikasi Operator Wisata Berkelanjutan

Perusahaan pemandu wisata dan penyedia transportasi, dapat menerima sertifikasi untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

b. Manfaat sertifikasi lingkungan hidup dalam pariwisata

1) Peningkatan keberlanjutan

Sertifikasi lingkungan mendorong bisnis pariwisata untuk meminimalkan



dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya dan pengolahan limbah secara tepat.

2) Kepercayaan Masyarakat

Wisatawan cenderung memilih perusahaan perjalanan bersertifikat karena mereka tahu perusahaan tersebut berkomitmen terhadap keberlanjutan dan melindungi lingkungan.

3) Keunggulan pasar

Sertifikasi lingkungan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis pariwisata dengan membantu mereka menjual kepada pelanggan dengan perspektif berkelanjutan.

c. ISO 21401

ISO 21401 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keberlanjutan dalam sektor akomodasi pariwisata. Standar ini, yang disebut "*ISO 21401: 2018 - Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments*," bertujuan untuk membantu akomodasi pariwisata dalam mempromosikan praktik berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan



memberikan pengalaman yang berkelanjutan bagi tamu. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai ISO 21401:

1) Tujuan ISO 21401

a) Meningkatkan Keberlanjutan, ISO 21401 bertujuan untuk membantu akomodasi pariwisata dalam meningkatkan praktik berkelanjutan mereka, termasuk manajemen energi, pengelolaan limbah, dan praktik pelestarian lingkungan.

b) Peningkatan Kualitas Layanan, Standar ini membantu akomodasi dalam memberikan pengalaman yang lebih baik kepada tamu dengan memastikan kualitas layanan yang tinggi.

c) Memenuhi harapan pelanggan, ISO 21401 membantu properti memenuhi harapan pelanggan yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan dan lingkungan.

2) Komponen utama ISO 21401

a) Manajemen berkelanjutan, Standar ini membahas manajemen berkelanjutan termasuk perencanaan, penerapan,



pemantauan, dan peningkatan kegiatan berkelanjutan.

- b) Manajemen energi, ISO 21401 mensyaratkan proyek pengembangan untuk mengelola energi secara bijaksana dan mengurangi konsumsi energi yang tidak diperlukan.
 - c) Pengelolaan limbah, Standar ini mensyaratkan tindakan untuk meminimalkan limbah dan mengelola limbah dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
 - d) Pelestarian Lingkungan, ISO 21401 mencakup praktik pelestarian lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam secara bijak dan upaya konservasi.
- 3) Manfaat Sertifikasi ISO 21401
- a) ISO 21401 membangun kepercayaan tamu bahwa akomodasi mematuhi standar keberlanjutan dan akan memberikan pengalaman berkelanjutan.
 - b) Akomodasi yang telah disertifikasi cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan dapat menarik tamu yang peduli tentang keberlanjutan.



- c) ISO 21401 membantu akomodasi dalam mengelola energi dan sumber daya dengan lebih efisien, yang dapat mengurangi biaya operasional.

- d. **Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE)**
Risiko kesehatan yang timbul di sektor pariwisata dikaitkan dengan peningkatan potensi risiko kesehatan yang akan dihadapi wisatawan saat melakukan perjalanan dan berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata (Olya dan Al-Ansi, 2018). Sehubungan dengan upaya meningkatkan kepercayaan pariwisata di kalangan wisatawan nusantara dan mancanegara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan sertifikasi CHSE yang dapat dicapai oleh penyelenggara kegiatan pariwisata dalam beberapa tahapan sebagai berikut.
 - 1) Tahap self-assessment, yaitu penilaian mandiri terhadap usaha pariwisata yang dikelola badan usaha
 - 2) Tahap self-declaration, yaitu meliputi pernyataan jujur pelaku usaha pariwisata kalender hasil self-assessment, memenuhi kriteria CHSE tergantung jenis usaha yang terdaftar,



pernyataan kesediaan untuk mengikuti proses penilaian sertifikasi dan pernyataan kesiapan untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai CHSE.

- 3) Tahap evaluasi adalah tahap verifikasi dan pelabelan setelah kontraktor dinyatakan memenuhi persyaratan.
- 4) Tahap sertifikasi adalah tahap akhir pemberian sertifikasi CHSE dan label I Do Care terhadap kegiatan perdagangan perjalanan wisata yang telah melewati seluruh tahapan dan dianggap telah memenuhi persyaratan.

Sertifikasi CHSE bersifat sukarela, artinya pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif berpeluang mendapat sertifikasi setelah menyelesaikan tahapan yang ditentukan. Sertifikat ini diterbitkan untuk memastikan produk dan layanan yang diberikan memenuhi kriteria kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat umum (Kemenparekraf, 2021). Tujuan penerapan protokol CHSE adalah sebagai berikut (Tandilino, 2020).

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan, kesehatan,



- keselamatan dan kelestarian lingkungan.
- 2) Mempersiapkan dunia perjalanan dengan memberikan jaminan CHSE atas produk dan layanan kepada wisatawan.
 - 3) Mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata yang telah menerapkan Protokol CHSE.
 - 4) Merupakan panduan praktis bagi penyelenggara atau pengusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya menyiapkan produk dan jasa pariwisata sesuai standar CHSE.

B. Regulasi Lingkungan dalam Pariwisata

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam industri pariwisata erat kaitannya dengan perkembangan pariwisata yang juga berdampak pada lingkungan. Dengan dampak yang ditimbulkan maka diperlukan upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, terdapat dua aspek penting dalam orientasinya, yaitu industri pariwisata yang berorientasi pada lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada fungsi



lingkungan hidup. Promotor harus kompeten dalam melakukan pendekatan lingkungan dan menilai dampaknya terhadap lingkungan, sehingga perlu memahami dampak dan cara mencegah atau meminimalkannya. Perkembangan pariwisata yang seiring dengan berkembangnya industri pariwisata ibarat pedang bermata dua: di sisi positifnya membantu meningkatkan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif terhadap lingkungan. Ada penjelasan mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya.

1. Dampak Positif

- a. Infrastruktur ditingkatkan, pembangunan pariwisata selalu mengikuti tren modern, tentunya harus dibarengi dengan infrastruktur pendukung seperti hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dll. Dampaknya, masyarakat lokal mempunyai akses yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menciptakan lapangan kerja, ketika wisatawan berkunjung tentunya membutuhkan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut dapat membuka peluang bagi warga lokal membuka usaha dan mengais rejeki

2. Dampak Negatif

- a. Polusi udara, industri pariwisata sering dianggap merupakan industri bersih akan



tetapi polusi udara yang diakibatkan yakni pada pembakaran bahan bakar bus, mobil dan sepeda motor. Transportasi merupakan komponen penunjang utama pariwisata, diambil berdasarkan pengertian berwisata yakni berpindah dari satu tempat ketempat lainnya maka transportasi adalah alat yang digunakan.

- b. Polusi suara, polusi ini berbanding lurus dengan akibat yang timbul dengan banyaknya transportasi yang digunakan parawisatawan, yang mana kala tak jarang menimbulkan kebisingan.
- c. Dampak terhadap air, banyaknya akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran yang menggunakan atau mengkonsumsi air yang mana melebihi dari penggunaan masyarakat lokal dapat menyebabkan pendeknya masa ketersediaan air. Selain itu, banyaknya perumahan yang ada membuatnya rentan terhadap pembuangan limbah cair.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, beserta peraturan yang menyertainya, tampak sudah ada semangat dan keinginan pemerintah dalam memberi perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam dan budaya dari pengaruh pembangunan pariwisata.



Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata juga memberi perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya hal ini terlihat dari bunyi Pasal 2 (huruf a) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan adalah bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 3 (huruf c) menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. Pasal 29 menyatakan bahwa usaha jasa impresariat wajib melestarikan seni budaya Indonseia, memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 44 Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib: (huruf a) menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan dan (huruf c) menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.

Pasal 50 juga mengatur bahwa pengelolaan daya tarik dan benda wisata budaya diperlukan untuk menjaga kelestarian daya tarik dan benda wisata budaya serta pengelolaan lingkungannya. Lebih lanjut, Pasal 97 (huruf b) mengatur bahwa badan usaha di kawasan wisata wajib



mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan hidup.

1. Fungsi Undang-undang Pariwisata dalam melindungi wisatawan

Faktor yang sangat penting dalam mendukung industri pariwisata meliputi keselamatan dan pelayanan yang sesuai dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi terhadap ras, agama atau kebangsaan tertentu. Pelayanan yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pelayanan fisik saja, namun juga pelayanan yang menghadirkan rasa damai dan nyaman bagi wisatawan.

Apabila wisatawan berkunjung ke suatu negara, besar kemungkinannya akan menghadapi kejadian-kejadian yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta bendanya, misalnya menjadi korban pencurian, penipuan, perlakuan tidak adil yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . standar manusia. martabatnya, baik karena alasan politik atau lainnya.

Jika wisatawan mengalami kejadian di atas, mereka akan merasa haknya tidak dilindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan mereka. Atas kejadian yang



dialami tersebut setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi. Perlindungan maksudnya adalah mempunyai arti perlindungan atas keamanan dan keselamatan baik jiwa, martabat maupun harta miliknya.

Wisatawan sebagai individu adalah merupakan subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat padanya. Hak dan kewajiban tersebut haruslah dihormati dan dilindungi. Global Code menyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan perlindungan wisatawan dan properti mereka karena kerentanan mereka terhadap kekerasan, kejahatan, atau perilaku berbahaya lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, masalah perlindungan wisatawan tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, untuk menghadirkan kenyamanan dan kenikmatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, pemerintah perlu segera menyiapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan keselamatan jiwa dan harta benda wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Aturan perlindungan tersebut misalnya



menyangkut perlindungan keamanan dan kepastian hukum berupa asuransi perjalanan, keamanan dan perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pelecehan terhadap wisatawan asing selama berada di Indonesia. Peraturan tersebut bisa berupa keputusan presiden, perintah menteri atau bisa juga dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

2. Regulasi terkait penggunaan lahan Pariwisata Kebijakan hukum/peraturan (legal policy) mencakup bagaimana peraturan dibuat dan diterapkan, dan memberikan pelatihan bagi mereka yang bertanggung jawab atas penerapannya. Kebijakan pengelolaan ruang mengatur proses sistem perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Secara lebih sederhana kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Penataan ruang wilayah, terdapat model interaksi yang serasi, serasi, seimbang antara lingkungan hidup dan aktivitas manusia secara adil dan berkelanjutan
- b. Pemanfaatan ruang sebagai sarana mewujudkan pembangunan , dan
- c. pengendalian, berupa kewenangan dan ketertiban

Permasalahan yang timbul disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:



- a. Komitmen politik terhadap pengembangan kebijakan ruang terbuka hijau harus diwujudkan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah kota yang lebih ringan dan mudah diterapkan. Dukungan finansial dari perkotaan dan politik juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya ruang hijau di perkotaan.
- b. Sinkronisasi visi organisasi pengembangan hutan wisata dalam rangka ruang terbuka hijau harus dilakukan dengan memenuhi syarat menggunakan visi, misi dan tujuan organisasi yang ada, mengatur dan mendukung pelaksanaan misi asosiasi. Implementasi optimal dari visi, misi dan tujuan organisasi dapat meningkatkan daya tarik ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan publik harus diintegrasikan ke dalam tawaran jangka panjang untuk mematuhi langkah-langkah lingkungan sebagai sasaran dan daya tarik utama.
- c. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan ruang hijau harus menunjukkan inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, meskipun hanya berfungsi secara fungsional dan tidak secara konseptual. Penerapan yang



tetap sesuai peraturan juga harus dilakukan.

- d. Koordinasi antar berbagai sektor dalam pengembangan RTH masih belum cukup jelas mengenai pembagian bagian dan jenis RTH antar konfigurasi, namun peraturan lain yang terkait dengan perbaikan dan pengembangan RTH belum dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. ke mereka. .
- e. Budaya kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap kebebasan hijau harus diperkuat melalui upaya kolaboratif dan komunikasi yang baik sesuai dengan misi, prinsip dan fungsinya masing-masing. Sosialisasi formal dan informal dapat menjadi isu dalam perencanaan kota.
- f. Mengembangkan investasi pemanfaatan ruang hijau terikat pada keterbatasan anggaran pemerintah dan memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ruang hijau bagi masyarakat dengan tetap dikaitkan dengan perlindungan lingkungan dan dikelola secara ketat untuk menciptakan “kota hijau”.
- g. Perencanaan dan penganggaran program ruang hijau merupakan proses yang senantiasa disesuaikan dengan situasi dan



permasalahan terkini. Kemajuan teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, namun tidak semua ruang hijau dapat dimanfaatkan oleh departemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, alternatif penghematan anggaran harus dipertimbangkan dengan mengalokasikan berbagai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau dan menciptakan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat (Zuhaidha et al., 2014).

Beberapa elemen kunci perencanaan tata ruang merupakan topik yang perlu dipertimbangkan untuk memahami berbagai situasi yang terjadi di Indonesia (Zuhri, 2012):

- a. Pertama, ketika mengelola dan merencanakan kota, pengambil kebijakan selalu memperhatikan perencanaan penggunaan lahan dokumen. Dokumen ini menjelaskan berbagai tingkat perencanaan menurut kedalamannya dan mencakup:
 - 1) Indikasi kegiatan (yang direncanakan) di masa depan
 - 2) Program kegiatan yang berkaitan dengan Upaya mencapai perencanaan penggunaan lahan



- 3) Pihak-pihak yang (mungkin) bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan di atas
 - 4) Peta penggunaan lahan sebagai dasar pemberian izin mendirikan bangunan
- b. Kedua, setelah peraturan daerah (qanun) tentang perencanaan penggunaan lahan telah dirumuskan, yang perlu diperhatikan adalah kelayakan pelaksanaannya. Sebagai produk hukum, peraturan daerah (qanun) tentang perencanaan penggunaan lahan harus dilaksanakan secara konsisten. Agar implementasi peraturan daerah tidak menemui hambatan yang besar, maka perdebatan mengenai peraturan daerah tersebut juga harus dikaitkan dengan efektivitasnya.
- 3) Ketiga, faktor perubahan perencanaan penggunaan lahan merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus setelah dokumen perencanaan penggunaan lahan disetujui dan juga memerlukan perhatian khusus dari lembaga legislatif. Legislator harus mengembangkan sistem kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Kegiatan pengawasan yang selama ini lebih menekankan pada pelaksanaan program-program pembangunan perlu diperluas ke dalam elemen ini. Rencana pengawasan



yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Regulasi pengadaan tanah selalu mengikuti perubahan politik hukum terkini, terutama setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Fokus pemerintahan saat ini juga terarah pada kawasan pariwisata. Salah satu tindakan yang diambil adalah mempromosikan destinasi wisata yang sangat penting. Meskipun hal ini dapat memfasilitasi pembebasan lahan, yang seringkali menjadi hambatan, perubahan ini juga dipandang mempunyai dampak negatif. Salah satunya disampaikan oleh Asosiasi Reforma Agraria, dimana investor mendapatkan keuntungan dari perlakuan istimewa. Senada dengan itu, Forum Lingkungan Hidup juga menyatakan keprihatinannya atas ancaman UU Cipta Kerja terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik pertanian. (Cahyani dkk., 2021)

Namun UU Cipta Kerja menuai kontroversi karena banyaknya protes dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia yang menilai UU tersebut memadukan banyak aspek seperti undang-undang, perekonomian, perizinan, dan lain-lain. Hal ini mengundang kontroversi. Fokus utama dalam Rencana



Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru adalah untuk:

- a. Menyediakan zona hunian;
 - b. Menyediakan zona baru untuk kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa;
 - c. Menyediakan zona untuk layanan pemerintahan; dan/atau
 - d. Menyediakan kawasan untuk membangun pusat kegiatan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
3. Regulasi pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata harus terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan memperkaya kebudayaan, dengan tetap menjaga jati diri bangsa dan nilai-nilai agama, serta membayar wisatawan. berkaitan dengan pelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata juga bertujuan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran produk daerah. Dalam kaitan ini, pariwisata dipandang sebagai sektor pilar yang mampu mengembangkan dan meningkatkan daya saing pariwisata serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dan swasta.



Rencana induk pengembangan pariwisata daerah adalah dokumen pedoman pengembangan destinasi wisata di daerah, termasuk dokumen pokok peraturan program pariwisata daerah, serta merupakan rencana induk konsep umum dan pedoman desain, rencana penanaman modal, peraturan dan pedoman pengendalian perencanaan dan pelaksanaan daya tarik wisata/pembangunan kawasan. Disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan suatu titik tolak yang sangat strategis yang memungkinkan optimalisasi, eksplorasi, pengembangan dan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk itu setiap daerah harus memperhatikan pengembangan industri-industri yang strategis dan potensial agar efektif dan bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah, membawa manfaat yang berharga dan menciptakan produktivitas yang tinggi bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal

Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 mengatur bahwa pengembangan pariwisata menitikberatkan pada empat



muatan utama, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Menyusul berlakunya undang-undang ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPRNAS) sebagai landasan strategi pengembangan pariwisata nasional.

Mengingat pembangunan pariwisata pada masa yang akan datang akan menjadi industri strategis, apalagi dalam kerangka otonomi daerah, maka pengembangan industri pariwisata perlu memperhatikan kepentingan lokal, daerah, dan nasional sebagai berikut:

- a. Kepentingan daerah, khususnya perencanaan pembangunan pariwisata, harus mencerminkan otonomi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan daerah dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pengembangan pariwisata daerah juga perlu memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- b. Kepentingan daerah, khususnya upaya pengembangan pariwisata antar daerah, perlu diarahkan pada keterkaitan antar daerah yang saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga terjadi persaingan yang sehat dan dapat diminimalisir konflik



yang timbul akibat perbedaan potensi pariwisata daerah.

- c. Kepentingan nasional yaitu dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata nasional bertujuan untuk mengoptimalkan dan memenuhi selera pasar pariwisata nasional dan global, didukung oleh kegiatan promosi internasional yang profesional dan terpadu.

Strategi pengembangan pariwisata tidak lepas dari prioritas peningkatan ekspor sebagai berikut:

- a. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan investasi dan pertumbuhan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan, pengentasan kemiskinan dan daya tarik tenaga kerja
- b. Mengembangkan destinasi wisata dengan mendorong peningkatan dan kualitas jaringan infrastruktur dan fasilitas pendukung dolar pariwisata, memperkuat akses negara transportasi internasional dan internasional dan mengembangkan kawasan strategis dan destinasi pariwisata berbasis maritim, alam, dan budaya
- c. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan secara bertahap



meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, memperkuat penyelarasan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta beradaptasi dengan pasar.

- d. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat kualitas layanan dan manajemen hotel yang kompetitif di kawasan Asia, sekaligus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pariwisata. Strategi harus didukung oleh peningkatan koordinasi sektor yang berkualitas dalam kebijakan, program dan kegiatan pariwisata, khususnya di bidang:
- 1) pelayanan imigrasi dan karantina;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) infrastruktur publik termasuk jalan, air minum, listrik, komunikasi dan kesehatan lingkungan;
 - 4) angkutan darat, laut dan udara; dan
 - 5) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.



Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Indonesia dalam peta Kepariwisata regional maupun internasional. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

- d. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- e. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat



mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu

C. Audit Lingkungan

Audit lingkungan baru mulai dikenal secara terbatas pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an di Amerika, ketika masyarakat mulai lebih peduli terhadap lingkungan setelah KTT Dunia Stockholm tahun 1972 yang membahas tentang degradasi lingkungan dan berujung pada pembentukan PBB untuk melindungi lingkungan The United Nation of Environment Programme (UNCEP). Hasil pertemuan UNCHE tersebut dinamakan Deklarasi Stockholm yang menetapkan dua standar:

1. Prinsip 21 terkait kerusakan lingkungan hidup lintas batas internasional dan
2. Prinsip 24 terkait makna layanan kerjasama.

Hasil luar biasa dari pertemuan ini adalah dibentuknya United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1975, untuk mendorong kerja sama lingkungan internasional. Sementara itu, di Amerika, dengan adanya US National Environmental Policy Act (NEPA) atau Undang-undang Perlindungan Lingkungan tahun 1969 dan penerapannya pada tahun 1970, perkembangan



alat pengelolaan lingkungan hidup mulai berkembang pesat.

Audit lingkungan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menilai risiko lingkungan yang timbul dari pengembangan industri. Lebih lanjut, audit lingkungan hidup merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap penting dan efektif bagi dunia usaha untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup. (Susanto dan Purnama, 2017). Permasalahan lingkungan hidup saat ini mendapat perhatian khusus dan dianggap penting. Banyak kasus kerusakan lingkungan terjadi tanpa kita sadari kini mulai merasakan dampaknya (Ade Irva Nursamsiah et al., 2019). Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus peduli terhadap lingkungan alam khususnya perairan pesisir. Masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam pesisir dan laut sangat bergantung pada potensi dan kondisi sumber daya alam pesisir, sehingga menyebabkan tingginya tingkat aktivitas masyarakat.

1. Definisi Audit Lingkungan

Definisi Audit Lingkungan Dua definisi audit lingkungan yang dikembangkan oleh Thomson dan Simpson (1993), yaitu:

- a. Sistem manajemen lingkungan adalah struktur akuntabilitas dan kebijakan serta



praktik Perusahaan, prosedur, proses, dan sumber daya untuk melindungi lingkungan hidup. lingkungan hidup dan mengelola permasalahan lingkungan hidup.

- b. Audit lingkungan hidup merupakan bagian integral dari sistem manajemen lingkungan hidup yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan apakah sistem pengendalian lingkungan hidup suatu perusahaan cukup menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pembukuan internal atau tidak. Oleh karena itu, audit lingkungan internal dianggap sebagai proses penilaian mandiri yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi tujuan hukum dan kebijakan internal.

2. Jenis Audit Lingkungan

Audit lingkungan disertakan dalam berbagai program industri untuk memastikan pengendalian kualitas dan merupakan bagian dari tanggung jawab audit internal. Audit lingkungan mempunyai tujuan internal dan eksternal. Audit lingkungan internal berguna dalam memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasional perusahaan telah mematuhi peraturan, apakah kontrak pembuangan limbah



dilaksanakan dengan kompeten atau tidak, dan apakah keputusan pengelolaan lingkungan dibuat berdasarkan fakta yang ada.

Audit lingkungan eksternal memberikan jaminan kepada pihak eksternal seperti kreditor, investor atau pengguna laporan eksternal atas kinerja atau kegiatan yang dilakukan perusahaan. Berbagai kegiatan yang tergolong Audit Lingkungan Eksternal mencakup jasa yang diberikan oleh konsultan, pengacara serta penerapan dan pemantauan sistem manajemen lingkungan. Thomson mengidentifikasi enam jenis kegiatan yang diklasifikasikan sebagai audit lingkungan:

a. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Ini merupakan investigasi yang fokus utamanya adalah operasional perusahaan. Audit ini mengevaluasi apakah operasi berada dalam batas hukum yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Audit kepatuhan diperlukan ketika kreditor atau investor memerlukan informasi tentang apakah kegiatan perusahaan telah menghasilkan atau mungkin mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Jenis audit ini merupakan jenis audit lingkungan hidup



yang paling umum dilakukan. Audit kepatuhan diklasifikasikan menurut tingkat rincian upaya yang diperlukan dalam audit, khususnya:

- 1) Penilaian pendahuluan (Preliminary assesment), disebut juga tinjauan dokumen atau pemeriksaan dokumen, digunakan untuk memberikan informasi mengenai potensi permasalahan, terutama permasalahan yang mempunyai perkiraan mengenai kondisi masa depan yang perlu dipertimbangkan, dan perlunya tinjauan atau evaluasi lebih lanjut.
- 2) Audit lingkungan (Environment audit) merupakan audit yang lebih rinci yang berfokus pada operasional perusahaan. Jenis audit ini termasuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, auditor harus memantau proses kepatuhan suatu perusahaan melalui laporannya untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan.
- 3) Investigasi lingkungan (Environmental investigation) adalah proses peninjauan yang panjang dan melelahkan, dilakukan ketika langkah-langkah sebelumnya menunjukkan potensi risiko kontaminasi atau dugaan ketidakpatuhan lainnya. Laporan audit



mencakup interpretasi analitis teknis, seperti laporan laboratorium.

b. Transactional Audit

Merupakan alat manajemen untuk menilai risiko lingkungan perusahaan bagi bank, agen, kreditur, yayasan, serta investor. Audit ini menentukan apakah tanah mengandung bahan atau buangan beracun. Pihak-pihak eksternal perlu memahami risiko lingkungan perusahaan.

c. Environmental management System

Audit lingkungan ini memiliki fokus pada keseluruhan sistem manajemen lingkungan perusahaan. Audit ini memberikan informasi dan keyakinan kepada manajemen tentang efektivitas sistem, pengendalian, dan prosedur kepatuhan kebijakan lingkungan perusahaan. Proses audit jenis ini dilakukan secara internal setelah proses audit lingkungan selesai dan perusahaan yakin akan kemampuannya untuk mematuhi peraturan.

d. Audit Pencegahan Pencemaran (Pollution Prevention Audit)

Penilaian kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang meminimalkan limbah dan mengurangi polusi. Pencegahan polusi mencakup berbagai fasilitas industri yang dapat mencemari



lingkungan berbeda pada berbagai tahap operasi.

- e. Audit atas kewajiban lingkungan hidup kumulatif (Environmental Liability Accrual Audit)

Audit lingkungan hidup ini merupakan suatu tinjauan teknis hukum dan akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan kewajiban yang terkait dengan tanggung jawab lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup.

- f. Audit Produk (Product Audit)

Merupakan kegiatan evaluasi proses produksi terhadap fasilitas (mesin) perusahaan. Tujuan dari penilaian jenis ini adalah untuk memastikan bahwa produk memenuhi ambang batas kimia dan memenuhi standar lingkungan.

3. Manfaat Audit Lingkungan

Tujuan utama audit lingkungan hidup adalah untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kepatuhan terhadap proses produksi, undang-undang dan peraturan, dan untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkannya sehubungan dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan program audit atau desain sistem yang baik. Merancang program audit



lingkungan hidup yang baik akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan, yaitu:

a. **Liability Reduction**

Mengurangi tanggung jawab Yang terbaik adalah memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh prosedur operasi perusahaan sebagai tindakan pencegahan terhadap klaim pelanggaran undang-undang lingkungan hidup.

b. **Legal Protection**

Dengan melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standara lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil kemungkinannya.

c. **Cost reduction**

d. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan konsekuensi dari aktivitasnya. Hal tersebut akan berakibat pada perbaikan ke bawah melalui pengurangan biaya langsung.

e. **Insurance Premium Reduction**

Suatu perusahaan akan melakukan audit lingkungan jika memenuhi persyaratan



asuransi dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan hidup akan menghadapi risiko yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan audit lingkungan hidup.

f. **Company Image**

Citra Perusahaan Perusahaan yang melakukan audit lingkungan hidup dapat membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri secara keseluruhan.

4. **Tujuan Audit Lingkungan**

Tujuan audit lingkungan hidup Tujuan audit lingkungan hidup menurut Kuhre (1996) adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan utama audit lingkungan adalah untuk membantu organisasi mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.
- b. Menentukan kesalahan potensial. Audit lingkungan sangat bermanfaat untuk menentukan masalah potensial sebelum menjadi masalah besar.
- c. Meningkatkan persepsi masyarakat. Audit dan koreksi kelemahan-kelemahan mengenai lingkungan hidup dapat membantu mengurangi kesan negatif masyarakat terhadap perusahaan. Jika



dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi maka kesan positif terhadap organisasi dapat meningkat.

- d. Terus menerus memperbaiki lingkungan hidup. Perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Audit akan membantu organisasi terus memperbaiki lingkungannya.

5. Akuntan dalam Audit Lingkungan

Tim audit lingkungan suatu perusahaan jarang memiliki anggota akuntansi. Anggota tim audit seringkali merupakan ahli kimia/ilmuwan yang mengukur dampak limbah/polusi yang dihasilkan perusahaan terhadap lingkungan.

Audit lingkungan dapat dilakukan oleh komite internal atau konsultan eksternal sesuai dengan pertimbangan manajemen mengenai biaya dan manfaat. Manajemen dapat memilih untuk menggunakan auditor independen atau personel internal perusahaan. Audit lingkungan memerlukan tenaga ahli di bidang kimia, teknik, dan hukum, tergantung pada jenis industri dan operasional perusahaan. Kebanyakan perusahaan tidak memiliki tenaga ahli khusus untuk melaksanakan pekerjaan terkait pengukuran dampak pencemaran



terhadap lingkungan sesuai peraturan pemerintah.

Pendekatan terbaik dalam melaksanakan dan mengembangkan audit lingkungan hidup adalah kombinasi auditor eksternal independen dan audit internal. Kontribusi akuntansi terhadap perusahaan yang memiliki rasa perlindungan lingkungan, khususnya:

- a. Memodifikasi sistem akuntansi
- b. Menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dari sistem akuntansi
- c. Merencanakan dampak finansial dari program lingkungan hidup
- d. Memasukkan kinerja lingkungan dalam pelaporan eksternal
- e. Mengembangkan sistem informasi informasi dan akuntansi baru

6. Cakupan Audit Lingkungan

Cakupan Audit Pariwisata mencakup berbagai aspek industri pariwisata, termasuk:

a. Pelayanan Wisata

Auditor akan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh industri pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan atraksi wisata. Auditor akan menilai keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan yang diberikan, serta memastikan bahwa industri pariwisata



mematuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.

b. Kebersihan Lingkungan

Auditor akan menilai kebersihan lingkungan pariwisata, termasuk pantai, jalan-jalan, dan tempat-tempat umum lainnya. Auditor akan memeriksa limbah atau sampah apa pun yang berserakan dan memastikan lingkungan tetap bersih dan terawat.

c. Keamanan

Auditor akan mengevaluasi langkah-langkah keamanan dan keselamatan yang diambil oleh industri pariwisata untuk melindungi wisatawan dan masyarakat lokal. Auditor akan memeriksa apakah langkah-langkah keamanan yang memadai sudah diterapkan, seperti sistem keamanan di hotel atau pemantauan tempat-tempat wisata.

d. Regulasi

Auditor akan mengevaluasi kepatuhan industri pariwisata terhadap regulasi yang berlaku, seperti peraturan keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Auditor juga akan memeriksa apakah industri pariwisata mematuhi peraturan tentang pajak dan perizinan.

e. Promosi



Auditor akan mengevaluasi upaya promosi yang dilakukan oleh industri pariwisata untuk menarik wisatawan ke destinasi tersebut. Auditor akan memeriksa apakah promosi dilakukan dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan yang berlaku.

f. Dampak Lingkungan

Auditor akan menilai dampak industri pariwisata pada lingkungan dan masyarakat lokal. Auditor akan memeriksa apakah industri pariwisata memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat lokal.

g. Pengembangan Pariwisata

Auditor akan mengevaluasi program-program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah atau industri pariwisata. Auditor akan memeriksa apakah program pembangunan tersebut efektif dalam meningkatkan industri pariwisata dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat.





IMPLEMENTASI TATA KELOLA LINGKUNGAN DALAM PARIWISATA

A. Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Lingkungan Pariwisata

Pemerintah berhak mengambil segala keputusan strategis terkait pengembangan pariwisata. Suatu rencana yang akan atau telah disusun kemungkinan besar dipengaruhi secara politis oleh kebijakan pemerintah. Peran pemerintah adalah memobilisasi, memulai, memberdayakan dan dinamis. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa peran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Peran pemerintah sangat dominan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata



berkelanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian ekosistem, menjaga keunikan, kearifan lokal, dan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. North (1990) berpendapat bahwa mengembangkan daya saing perusahaan memerlukan institusi pemerintah untuk menciptakan kerangka aset produktif agar dapat berkembang guna memperoleh peningkatan pangsa pasar kompetitif dan perhatian pemerintah sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan di masa depan untuk tujuan ekonomi. , Aspek budaya dan sosial dapat dijadikan daya tarik untuk menjaga keutuhan keanekaragaman budaya pendukung sistem kehidupan (Yoeti, 2008). Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pariwisata. Lebih lanjut pada Pasal 14, pembangunan pariwisata bertujuan untuk mencapai dan memelihara kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata.

1. Kebijakan dan regulasi tata kelola

lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah Sesuai dengan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan



asas tanggungjawab, asas yang dimaksud adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, generasi sekarang dan mendatang.
- b. Negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara melarang keras kegiatan yang menggunakan sumber daya alam yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.

Sebagai salah satu aspek yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus berperan dalam manajemen perencanaan yang komprehensif.

a. Koordinator

Sebagai koordinator pemerintahan daerah, dapat menentukan kebijakan atau strategi pembangunan daerah dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Memahami peran pemerintah sebagai koordinator dan asosiasi industri pariwisata sebagai penyelenggara pariwisata, baik lokal,



regional, dan internasional. Industri ini biasanya menangani fungsi perencanaan dan manajemen untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi antara semua sektor industri pariwisata.

b. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator harus menciptakan kondisi yang mendukung bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bekerja di bidang dukungan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan seras di bidang keuangan atau permodalan bagi masyarakat otonom. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah bertugas memfasilitasi pengelolaan masyarakat secara umum. perjalanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal peralatan dan infrastruktur.

c. Stimulator

Pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya tarik wisata. Dinas kebudayaan dan daya tarik wisata menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangkai pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk



berjualan seperti kantin sehingga mendatangkan keuntungan baik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan. Pemerintah juga memberikan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan dalam mengelola tempat wisata. Namun, pemerintah belum memiliki peran serta pihak swasta, investor, dan dunia usaha dalam mengelola potensi wisata. Pemerintah tidak melibatkan investor karena pengambil kebijakan

d. Motivasi

Dalam pengembangan pariwisata, peran promosi pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang kelangsungan usaha pariwisata. Investor, masyarakat serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan



berbagai upaya seperti memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata hal ini diwujudkan melalui pemberian lahan kepada masyarakat tanpa memungut biaya, selain itu masyarakat juga di berikan motivasi melalui promosi pemasaran. Upaya pemerintah tersebut mendapat respon baik dari masyarakat

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam tata kelola lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan dan regulasi tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penerbitan izin lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Izin lingkungan



diberikan setelah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan industri, rumah tangga, dan sektor lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari dampak limbah B3.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Sektor Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai pedoman tata kelola lingkungan hidup pada sektor pariwisata. Pedoman ini mencakup pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan potensi pariwisata, implementasi konsep green tourism, dan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lingkungan, strategi pengelolaan lingkungan hidup, dan program pengelolaan lingkungan hidup

Dalam menerapkan kebijakan dan regulasi tata kelola lingkungan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan

2. Pengawasan oleh otoritas lingkungan

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pemberian perizinan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan untuk memastikan usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan



dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri dapat melakukan pengawasan lapis kedua yakni pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 73 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.



Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh petugas pemantauan lingkungan hidup untuk mengidentifikasi dan/atau menentukan 26 tingkatan Kepatuhan. penanggung jawab usaha dan/atau pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan izin usaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pengawasan langsung dilakukan melalui inspeksi rutin atau acak terhadap lokasi dan/atau operasional usaha. Pemantauan rutin dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemantauan secara acak dilakukan apabila terdapat tanda-tanda pelanggaran berulang dan terdeteksi adanya tanda-tanda pelanggaran, adanya pengaduan masyarakat, dan adanya laporan dari kepala daerah mengenai rincian pelanggaran pelaku usaha daerah. Pengendalian tidak langsung dilakukan dengan memeriksa data dari laporan manajer perusahaan dan/atau operasional dan/atau data dari sistem informasi lingkungan.



Apabila pengendalian tidak langsung mengakibatkan pelanggaran berulang atau menunjukkan adanya ancaman serius terhadap lingkungan, pengelola pengendalian lingkungan segera memulai pemantauan langsung.

a. Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Menteri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 1 dijesakan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- 1) Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau
- 2) Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.

b. Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Gubernur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 1 dijesakan bahwa Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelianggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:



- 1) Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
- 2) Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.

c. Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Bupati/Walikota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 1 dijesakan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelianggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- 1) Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
- 2) Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah Daerah jika:



- a. menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri: dan
- b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan.

B. Manajemen Destinasi Wisata Berkelanjutan

1. Konsep Destinasi Wisata Berkelanjutan

a. Gambaran Umum

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tetap menjamin terlindungnya nilai-nilai agama, budaya hidup masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Keuntungan. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Keberlanjutan khususnya keberlanjutan kualitas dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata.



Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, yang melibatkan peningkatan kapasitas akomodasi, penduduk lokal dan lingkungan hidup, dimana pengembangan pariwisata dan investasi baru di bidang pariwisata tidak akan menimbulkan dampak negatif dan dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan hidup, jika ada. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida, 2017). Prinsip-prinsip keberlanjutan membahas aspek lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya pengembangan pariwisata dan keseimbangan yang tepat harus ditetapkan antara ketiga aspek ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang (World Tourism Organization, 2005). Dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya dalam pengembangan pariwisata dan terdapat kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara ketiga aspek ini untuk menjamin keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan muncul dari konsep



pembangunan berkelanjutan yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) menyatakan bahwa lingkungan hidup dan pembangunan saat ini tidak berkelanjutan dan diperlukan langkah-langkah baru untuk menjamin keberlanjutan global di masa depan. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (Sutiarso, 2018).

Mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pariwisata berkelanjutan yang digagas oleh W United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini dan masa depan (Fennel dalam Yoga Pratama, 2019). Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dituangkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan layak secara ekonomi serta pergaulan yang adil secara etika dan sosial (termasuk budaya) bagi masyarakat



(Haryanto, 2014). Selain itu, menurut (Mowforth dan Munt dalam Waimbo, 2012), konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga komponen yang saling berhubungan, antara lain:

1) Keberlanjutan ekologi (*Ecological Sustainability*)

Pembangunan pariwisata tidak disebabkan oleh perubahan ekosistem yang ada yang tidak dapat diubah lagi dan telah menjadi aspek yang diterima secara luas karena perlunya melindungi sumber daya alam dari dampak negatif kegiatan pariwisata terhadap lingkungan.

2) Kemampuan Beradaptasi Sosial (*Social Adaptability*)

Mencocokkan kemampuan kelompok dalam menarik wisatawan tanpa menimbulkan perselisihan dalam hubungan sosial, antara anggota kelompok masyarakat dengan wisatawan, atau antar anggota kelompok masyarakat.

3) Keberlanjutan budaya (*Cultural Sustainability*)

Dalam konteks ini dikemukakan bahwa dampak kehadiran wisatawan tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan budaya lokal,



melainkan harus dipertahankan untuk generasi mendatang.

Pariwisata berkelanjutan harus memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal sebagai elemen kunci pembangunan pariwisata, menjaga proses ekologi yang penting dan berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, menghormati keaslian sosio-kultural masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan budaya hidup mereka, dan tradisi. menghargai dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya, dan Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang dapat berjalan dan memberikan manfaat sosio-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang didistribusikan secara adil, termasuk kesempatan kerja dan pendapatan yang stabil serta layanan sosial bagi masyarakat tuan rumah, sekaligus berkontribusi terhadap kemiskinan pengurangan (World Tourism Organization, 2005). Dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan (sustainable Tourism) harus memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata,



memelihara proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang dibangun dan hidup adil, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya dan memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang menusuk dia dan peluang memperoleh pendapatan dan layana sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting demi pengembangan pariwisata jangka panjang. Hal ini perlu menjadi perhatian dan catan penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Terkait dengan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) terdapat aturan hukum yang mengatur terkait dengan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.



Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan disusun dengan tujuan tidak mengabaikan kebutuhan masa depan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pengembangan pariwisata didasarkan pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhususan budaya dan alam, sehingga pengembangan destinasi pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai kriteria. Berdasarkan pedoman destinasi pariwisata tersebut, terlihat bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas lokal serta dapat diterapkan pada semua kegiatan pariwisata di semua jenis daerah tujuan wisata, termasuk pariwisata massal dan jenis kegiatan pariwisata lainnya. Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, terlihat ruang lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan antara lain mencakup pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. destinasi pariwisata



berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Keempat elemen tersebut masuk dalam kriteria pariwisata berkelanjutan. Kemudian keempat bagian kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut diperjelas melalui 3 elemen yaitu kriteria, indikator dan bukti pendukung. Panduan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan juga menjelaskan bahwa kriteria adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi atau menentukan sesuatu tentang suatu destinasi pariwisata yang mempraktikkan pariwisata berkelanjutan. Indeks adalah sesuatu yang dapat memberikan pedoman atau informasi mengenai kriteria destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan bukti pendukung adalah sesuatu yang menegaskan keaslian suatu peristiwa, informasi atau tanda nyata, baik fisik maupun tertulis, pada suatu destinasi wisata yang mempraktikkan pariwisata berkelanjutan..

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata



Berkelanjutan dengan ini menetapkan bahwa:

Tabel 4.3 Kriteria Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

No	Perencanaan	Pengelolaan	Pemantauan	Evaluasi
1	Strategi destinasi yang berkelanjutan	Organisasi manajemen destinasi	Monitoring	Adaptasi perubahan iklim
2	Pengaturan perencanaan	Pengelolaan pariwisata musiman	Inventarisasi aset	Kepuasan pengunjung
3	Standar keberlanjutan	Akses untuk semua	Atraksi pariwisata	
4		Akuisisi properti		
5		Keselamatan dan keamanan		
6		Manajemen krisis dan kedaruratan		

Sumber : *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016*

Perencanaan memegang peranan yang penting juga terkait dengan penyusunan



dan penerapan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang tersedia untuk umum, dan sesuai dengan skalanya yang harus mempertimbangkan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika yang dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berkelanjutan dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan persoalan atau isu lingkungan saja namun juga persoalan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

b. Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan akan disusun berdasarkan pengembangan pariwisata termasuk industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan organisasi pariwisata. Strategi yang dikembangkan mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada lingkungan. Pemerintah harus



menciptakan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong sektor swasta, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah keberlanjutan. Hal ini paling baik dicapai dengan menetapkan dan menerapkan serangkaian kebijakan pengelolaan dan pembangunan pariwisata, yang dikembangkan melalui koordinasi dengan kebijakan lain, dengan mengutamakan keberlanjutan (World Tourism Organization, 2005). Pemerintah harus menyediakan lingkungan yang mendukung dan mendorong sektor swasta, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah keberlanjutan. Hal ini paling baik dicapai dengan menetapkan dan menerapkan serangkaian kebijakan pengelolaan dan pembangunan pariwisata, yang dikembangkan bersama pihak lain, yang menempatkan keberlanjutan sebagai intinya.

Pemerintah juga berperan dalam menentukan arah pengembangan pariwisata khususnya di provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu dibangun dan dimasukkan dalam rencana



induk pengembangan pariwisata provinsi dan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan pariwisata. Adapun peran dan wewenang Pemerintah Daerah adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, menetapkan destinasi pariwisata strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*). Pemerintah Daerah menetapkan daya tarik wisata provinsi, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

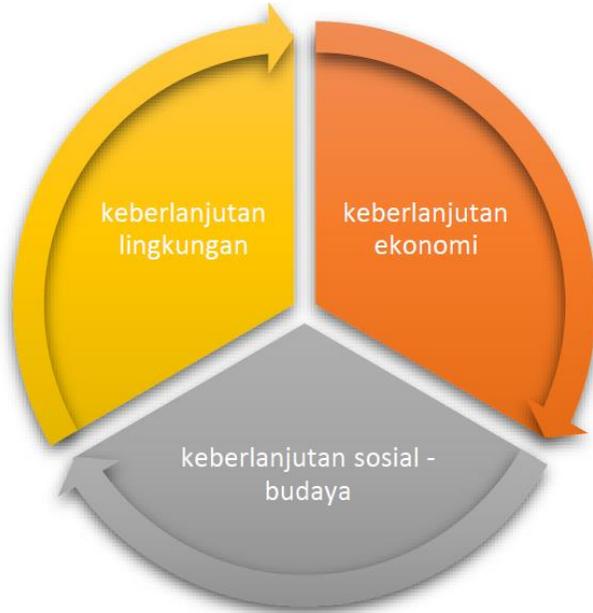
Strategi Destinasi Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14



Tahun 2016 didasarkan dari adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenities kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan. Jika prinsip sustainability betul-betul diterapkan dalam penyusunan rencana strategis serta penerapan yang sustainable, maka tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara maksimal yang berdampak pada kemampuan suatu wilayah meningkatkan perekonomian masyarakatnya (Ilham Junaid, 2014). Pariwisata berkelanjutan merupakan isu penting yang perlu diteliti dan diterapkan dalam praktik. Persoalan ini tidak hanya menjadi perbincangan di tingkat nasional namun juga internasional, terbukti dengan adanya badan independen yang



mempunyai kewenangan menetapkan dan mengatur standar pariwisata global.



Gambar 2. 2 Aspek-Aspek Dalam Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016

Indonesia meluncurkan Program Sustainable Tourism for Development (STDev) (STDev) pada tahun 2016, yang diatur melalui Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2016, Terkait Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, standar internasional *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) yang berlaku. Peraturan

tersebut menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada tiga aspek: aspek keberlanjutan lingkungan, aspek keberlanjutan ekonomi, dan aspek keberlanjutan sosial budaya.

2. Pengelolaan Tata Ruang Dan Infrastruktur Pariwisata

Sejak awal abad ke-20, perencanaan wilayah di Indonesia telah mengalami perubahan administratif melalui penerapan Undang-Undang Desentralisasi yang baru (Tarigan, 2021). Klasifikasi administrasi baru diperkenalkan, mengakhiri kegiatan pemerintah pusat tahun 1903 yang berkedudukan di Batavia, khususnya Pemerintah Hindia Belanda. Pendekatan terpadu lintas sektor, sumber keuangan serta antara perencanaan dan pembiayaan mulai diterapkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan.

Mengembangkan infrastruktur dan melaksanakan pemerintahan daerah di wilayah tersebut. Konsep penataan ruang yang tidak lagi terbatas pada pembangunan tetapi juga mencakup pemanfaatan penataan ruang dan wilayah untuk mencapai mentalitas yang holistik dan terpadu, dimana penataan ruang berperan sebagai perantara dan dikaitkan dengan pengelolaan.



pengetahuan, terutama dalam pembangunan ekonomi perkotaan dan pengelolaan lingkungan. Kehidupan Sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia dalam menyusun program pembangunan perkotaan. (Parma, 2013).

Penataan ruang adalah suatu bentuk perencanaan pusat kependudukan dan jaringan prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur tata ruang), tujuannya terbagi dalam fungsi pelindung dan fungsi budaya (pola ruang). Perencanaan penggunaan lahan sangat erat kaitannya dengan kegiatan perencanaan penggunaan lahan di setiap negara. Inilah sebabnya mengapa pemerintah Indonesia juga mempunyai kebijakan perencanaan pertanahan. Kebijakan didasarkan pada hukum. Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah juga menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang angkasa luar, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, di mana Manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara.



kelangsungan hidupnya. Melihat kebijakan-kebijakan di atas, ruang merupakan faktor terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses kehidupan manusia, terutama dalam menjalankan aktivitasnya. Padahal, dapat ditegaskan bahwa tanpa ruang yang memadai dan berkualitas, masyarakat tidak akan bisa merasa aman dan nyaman dalam bertempat tinggal. Oleh karena itu, mengingat pentingnya ruang bagi keberadaan manusia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, maka diperlukan penataan ruang sebagai salah satu bentuk kegiatan yang mengatur pemanfaatan ruang, khususnya ruang yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan berkelanjutan. pengembangan industri pariwisata.

Penataan ruang dan pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah dua hal yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain, sebab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan tentu membutuhkan penataan ruang yang baik agar pengembangan sektor pariwisata ini tetap memperhatikan keberlangsungan dari lingkungan alam. Artinya di masa kini tetap terus membangun tetapi dengan tidak mengganggu prospek pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.



Untuk mewujudkan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 3 tentang tujuan penataan ruang yaitu Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Melaksanakan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka setiap daerah otonom mempunyai tugas dan tanggung jawab menata ruang wilayahnya untuk mencapai tujuan perencanaan wilayah nasional, khususnya perencanaan wilayah daerah, untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Pelaksana Peraturan Rencana tata ruang wilayah untuk kawasan pariwisata dilakukan oleh pemerintah dengan mengerahkan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan



kepada pihak donator/swasta. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tidak bersifat kaku yaitu tidak selalu dari pemerintah, tetapi dapat disediakan oleh masyarakat itu sendiri dan swasta.

Keberhasilan tata ruang wilayah untuk kawasan pariwisata, ditentukan juga berdasarkan 3 (tiga) lingkungan kebijakan, yaitu

- a. Power, interest, and strategies of actors involved (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Implementasi kebijakan penataan ruang khususnya kawasan pariwisata membutuhkan partisipasi dari Pemerintahan Daerah, baik itu kalangan birokrat, swasta, maupun masyarakat. Keseluruhan aktor tersebut secara intensif ataupun tidak, tergantung konten dari kebijakan dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan akan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan, dan setiap masing-masing aktor memiliki kepentingan tertentu terhadap kebijakan tersebut dan mereka berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan-ketentuan dalam prosedur alokasinya.

- b. 2. Institution, and Regime characteristics (Karakteristik lembaga dan penguasa)



Karakteristik lembaga dan penguasa menentukan sejauhmana kebijakan tersebut dapat diimpelentasikan. Dari hasil observasi lapangan, partisipasi dari masyarakat dengan adanya kebijakan ini sudah cukup tetapi masih terkendala dengan fasilitas sarana dan prasarana serta SDM yang ahli dibidang penataan ruang kawasan pariwisata. Serta belum adanya sumber daya manusia tenaga khusus yang sesuai dengan bidang penataan ruang kawasan pariwisata.

c. Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap).

Kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang dalam pengembangan pariwisata dapat dikatakan baik, proses implementasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dengan memberikan sanksi bagi ada yang melanggar. tapi pada kenyataannya kepatuhan dan daya tanggap masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang khususnya sektor pariwisata belum mulai tumbuh, hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pariwisata dan melakukan perkebunan sawit diarea objek wisata ini



sangat mengganggu pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Alternatif strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan penataan ruang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut

- a. Menyegerakan penetapan Peraturan daerah yang telah dirancang yaitu peraturan daerah yang menyangkut penataan ruang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- b. Peningkatan koordinasi antar sektor dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik dan tekanan terhadap penataan ruang pariwisata.
- c. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan agar pariwisata dapat dikelola dengan baik khususnya pantai dan air terjun.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan penerapan sanksi tegas terhadap tata ruang pariwisata untuk meningkatkan potensi daerah.

3. Pelestarian Lingkungan Dan Keanekaragaman Alam pada Destinasi Wisata



Sebagai makhluk hidup yang menghuni bumi, masyarakat harus bahu-membahu menjaga kelestarian alam. Sebab sebagian besar kerusakan lingkungan yang terjadi tidak lain adalah akibat atau perbuatan manusia yang tidak peduli terhadap kelestarian alam. Melestarikan alam sekitar juga merupakan bagian dari upaya berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam pariwisata berkelanjutan, tidak hanya faktor ekonomi yang diperhitungkan, namun juga kelestarian alam dan budaya. Oleh karena itu, dapat menjamin stabilitas pariwisata di masa depan tanpa menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Perlindungan lingkungan juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan pariwisata, sesuai Peraturan Menteri Pariwisata no. Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Melestarikan lingkungan alam bukan hanya tugas satu atau dua orang saja melainkan melibatkan seluruh aspek masyarakat dan wisatawan juga bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

a. Langkah-langkah menjaga lingkungan

Ada beberapa upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Kesadaran datang dari kesadaran diri



sendiri, namun untuk melakukan upaya tersebut kita juga memerlukan kesadaran kolektif. Menjaga alam sekitar merupakan bagian dari upaya membangun pariwisata berkelanjutan.

1) Jangan membuang sampah sembarangan

Upaya sederhana yang bisa diterapkan untuk menjaga kelestarian alam sekitar adalah dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Sebab hingga saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Bahkan ada wisatawan yang datang ke pantai dan membuang sampah ke laut, jika keadaan ini berlangsung lama maka akan terjadi pencemaran lingkungan.

2) Mengurangi penggunaan plastik

Persoalan sampah di destinasi wisata masih menjadi topik penting dalam dunia pariwisata. Banyak juga sampah plastik yang sulit terurai. Pengurangan penggunaan plastik tetap harus didorong untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada. Mengurangi sampah plastik adalah langkah yang baik untuk kelestarian lingkungan.

3) Menanam pohon



Menanam pohon secara rutin dapat membantu menjaga lingkungan. Meski langkah ini tergolong sederhana, namun jika dilakukan bersama masyarakat akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi alam. Selain itu, kelangsungan hidup manusia di masa depan juga bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini, termasuk menanam pohon.

4) Penghematan energi listrik

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan listrik semakin meningkat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu dilakukan penghematan listrik agar sumber daya alam tidak habis. Anda bisa mematikan lampu di siang hari, tapi Anda bisa menggunakan sinar matahari untuk menerangi Anda di siang hari.

5) Dilarang melakukan illegal logging

Illegal logging merupakan salah satu faktor utama yang dapat merusak alam. Oleh karena itu, cara yang ditempuh adalah dengan tidak melakukan pembalakan liar. Jika logging diperlukan, Anda dapat menggunakan sistem logging selektif. Sistem ini tentu saja bisa menjadi solusi untuk



menghindari deforestasi yang berlebihan tanpa berupaya melakukan konservasi kembali.

6) Perlindungan ekosistem laut

Upaya pelestarian alam sekitar dapat dilakukan dengan menjaga ekosistem laut. Dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang limbah berbahaya ke laut, dan tidak merusak terumbu karang, kami berupaya menjaga ekosistem laut. Selain itu, mencegah nelayan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan juga merupakan salah satu langkah menjaga ekosistem laut.

7) Penggunaan transportasi umum

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dapat meningkatkan pencemaran udara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat bepergian. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan transportasi umum yang disediakan. Polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan pribadi merupakan masalah terbesar yang ditemui di beberapa kota besar.

b. Dampak Tidak Menjaga Lingkungan



Jika kita manusia tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka rusaknya alam akan berdampak sangat besar, beberapa dampak akibat dari kurangnya perlindungan terhadap lingkungan alam.

1) Bencana alam

Adanya pembalakan liar dan tidak ada upaya reboisasi atau reboisasi maka dapat menimbulkan bencana. Potensi bencana yang diakibatkan oleh pembalakan liar antara lain kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Jika tidak dilakukan tindakan, hal ini dapat merusak ekosistem. Kekeringan terjadi karena tidak adanya atau berkurangnya cadangan air di dalam tanah akibat hilangnya akar tanaman sebagai tempat menyimpan air.

2) Punahnya satwa dan tumbuhan

Jika kita tidak menjaga kelestarian alam sekitar maka dampak yang akan terjadi adalah punahnya berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Pencemaran lingkungan yang terjadi dapat merugikan hewan dan tumbuhan yang ada. Jika salah satu spesies punah maka akan berdampak pada banyak spesies lainnya karena berdampak pada rantai makanan yang ada.

3) Hilangnya Sumber Makanan



Sumber makanan manusia berasal dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Jika punah, tentu saja masyarakat akan kehilangan sumber makanannya sehingga kelaparan akan terjadi secara besar-besaran. Secara tidak langsung, punahnya hewan dan tumbuhan juga akan menyebabkan punahnya manusia.

4) Menipisnya sumber daya energi

Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan terkurasnya sumber daya energi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga sumber daya alam kita dengan hati-hati. Salah satu solusinya adalah dengan menghemat energi, Anda bisa mulai menggunakan panel surya untuk menghemat konsumsi listrik dari bahan bakar fosil.

Lingkungan pariwisata harus dilestarikan, karena mempunyai nilai sosial ekonomi seperti nilai pilihan dan nilai keberadaan. Nilai pilihan menunjukkan kesediaan individu untuk membayar kelestarian lingkungan untuk digunakan di masa depan. Sedangkan nilai keberadaan mewakili keinginan masyarakat untuk membayar kelestarian lingkungan tanpa mengkhawatirkan nilai guna (Dixon, 2016).



Keberadaan kawasan lingkungan wisata merupakan tanggung jawab bersama antara pengelola, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat sekitar kawasan wisata merupakan kunci utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, karena masyarakat sekitar lah yang mempengaruhi nilai kelestarian lingkungan kawasan objek wisata.

C. Partisipasi Masyarakat Lokal

1. Partisipasi Masyarakat

Secara umum konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara



efektif dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk aktif mengelola sumber daya yang ada, mengelola kemampuan mereka sendiri, menjadi subyek bukan sebagai obyek dalam pembangunan, berperan aktif dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang mempengaruhi tempat itu.

Menurut Sumarto (2003) bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat; sedangkan menurut Pitana (2002) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan “genuine participation” atau



dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan berperan aktif dalam mengembangkan suatu destinasi wisata. Partisipasi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata suatu destinasi. Partisipasi ini merupakan tujuan dari proses demokrasi, artinya berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat, yang tentunya memberikan peluang dan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pembangunan potensi yang ada pada suatu destinasi.

2. Teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)



Dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat, kegiatan masyarakat berbaur dengan kegiatan pariwisata sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai objek dan daya tarik pariwisata tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut. Natori (2001: 5) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat sebagai berikut Aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan untuk menciptakan sebuah komunitas yang penuh dengan energi oleh alam sepenuhnya, pemanfaatan budaya, sejarah, industri, orang-orang yang berbakat dan sumber daya lokal lainnya.

Pariwisata berbasis masyarakat difokuskan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan lokal sebagai daya tarik wisatanya, memelihara lingkungan tetap lestari, mencintai budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan



sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pengembangan sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999)

Tujuan utama pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yaitu:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara membagi ilmu dan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat lainnya.
- b. melestarikan berbagai aset budaya, sejarah, dan alam agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Manfaat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah terciptanya banyak lapangan kerja bagi masyarakat, mendukung pelestarian budaya, upaya pelestarian sumber daya masyarakat lokal dan manfaat ekonomi langsung, manfaat bagi masyarakat lokal.

Kelemahan pariwisata berbasis masyarakat adalah masyarakat setempat tidak mempunyai visi atau misi perencanaan jangka panjang dan tidak mempunyai modal yang cukup untuk berkembang pesat.



Kelemahan ini mencerminkan ketidakmampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang pariwisata (Pitana, 1996)

Pariwisata berbasis komunitas menitik beratkan pada memperhatikan peran serta masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak tercapainya pengembangan daya tarik wisata suatu negara. Dengan mengembangkan suatu daya tarik wisata dengan partisipasi masyarakat, diharapkan akan terjadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dalam banyak aspek, baik dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk itu pengembangan pariwisata yang dilakukan dapat membawa manfaat bagi sektor perekonomian, khususnya bagi masyarakat lokal di daerah tersebut. Masyarakat lokal yang dimaksud adalah masyarakat yang pengetahuan dan pengalamannya diwariskan secara turun-temurun serta segala upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh pengalaman tersebut. Dengan pengetahuan dan pengalaman, manusia mempunyai kesempatan dan kesadaran untuk mengembangkan berbagai hal terkait dengan menghargai lingkungan hidup, baik dari segi



sosial budaya maupun agama, sehingga semuanya mencapai keselarasan.

3. Pengembangan pariwisata dalam perspektif kemandirian lokal

Mengembangkan pariwisata dalam perspektif kemandirian lokal adalah untuk menunjukkan tatanan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap menjaga kelestarian alam, nilai-nilai budaya lokal, serta budaya lokal sebagai daya tarik wisata yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal baik dari sumber alam, sosial budaya maupun ekonomi untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan pariwisata saat ini menggunakan pendekatan komunitas atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat setempat secara langsung membangun, memiliki dan mengelola fasilitas dan pelayanan pariwisata, sehingga masyarakat akan menerima manfaat ekonomi secara langsung serta mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses



perencanaan pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (Sunaryo, 2013)

Partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam yang dimilikinya merupakan hal yang penting dan berpotensi untuk dijadikan daya tarik wisata. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses dan upaya pengembangan pariwisata agar masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab dalam melestarikan potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

Masyarakat sebagai komponen utama pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan pariwisata untuk mengembangkan potensi lokal baik dari alam, budaya, dan masyarakat atau perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya merupakan kontribusi penting dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Peran serta masyarakat penting dalam pengembangan desa wisata, agar tidak terputus dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga pengelolaannya Pariwisata dapat mewujudkan masyarakat sejahtera yang selaras dengan konservasi alam. Prinsip penerapan tata kelola



pariwisata yang baik pada dasarnya didasarkan pada koordinasi antara pemangku kepentingan yang ada dan pada implikasi keterlibatan aktif yang sinergis (terintegrasi dan saling memperkuat) antara pemerintah, sektor swasta atau industri pariwisata dan masyarakat lokal yang terkena dampak. Bentuk partisipasi masyarakat yang tepat adalah memantau dan mengendalikan perkembangan pariwisata saat ini dengan ikut serta dalam menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata.

Menurut Nasikun (1997) bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat memiliki ciri-ciri atau karakteristik sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas daerah dan sumber daya masyarakat lokal seperti:

- a. berskala kecil sehingga lebih mudah diorganisasikan, contohnya; penginapan atau akomodasi non bintang yang sumber daya manusianya tidak dituntut harus memiliki sertifikat khusus. Akomodasi berupa homestay umumnya dilengkapi dengan fasilitas yang sederhana dan pelayanannya yang bersifat kekeluargaan;



- b. lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat lokal. Pembangunan fasilitas pariwisata dengan menggunakan arsitektur lokal lebih dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat lokal daripada bangunan fasilitas pariwisata yang diadopsi dari daerah luar;
- c. lebih memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pengembangan dan evaluasi, dan
- d. budaya partisipasi masyarakat lebih diutamakan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang menjadi tuan rumah, dan untuk keberlanjutannya sosial budaya masyarakat lokal

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas bagi masyarakat lokal, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat setempat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yaitu proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi, sempurna dan berguna. Adanya pengembangan dapat juga mengembangkan pelayanan yang berkualitas terhadap pengembangan yang menyediakan



fasilitas bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang tentunya tetap memperhatikan aspek budaya, sosial, sejarah, lingkungan dan ekonomi

D. Tantangan dan Peluang Masa Depan

Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang penting di Indonesia. Sejuta keindahan alam, budaya dan warisan asli nenek moyang Indonesia menjadi nilai tambah yang harus terus kita gaungkan. Pariwisata menempati tempat yang strategis dalam meningkatkan devisa negara. Pariwisata merupakan industri jasa yang berbasis pada kreativitas, potensi pariwisatanya yang kaya dapat memaksimalkan potensinya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pariwisata merupakan industri yang lebih ramah lingkungan. Jika menjual keindahan alam saja sudah cukup, untuk apa merusak atau merampasnya.

Semua orang sadar akan potensi pariwisata Indonesia yang kaya dan beragam. Potensi suatu kawasan wisata tidak bisa disebut destinasi tanpa adanya 3A yaitu pertama *Attractive*, pariwisata adalah daya tarik atau faktor yang menjadikan suatu destinasi menarik bagi wisatawan. Destinasi wisata yang sukses mempunyai banyak unsur menarik yang menjadikannya unik dan menarik perhatian wisatawan. Di bawah ini adalah beberapa



penjelasan umum tentang apa yang membuat suatu destinasi wisata menarik. Kedua *Amenities*, dalam konteks pariwisata mengacu pada berbagai fasilitas, layanan, dan fitur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan selama perjalanannya. Fasilitas-fasilitas tersebut berperan penting dalam meningkatkan pengalaman dan kualitas wisata atau fasilitas wisata, dan Ketiga *Accessibilities*, konteks pariwisata mengacu pada kemudahan akses dan sarana transportasi yang tersedia bagi wisatawan yang ingin mengunjungi suatu destinasi. Kemudahan akses menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana pengunjung dapat menjangkau dan menjelajahi suatu destinasi.

1. Merebut Peluang

Peluang pariwisata banyak sekali, pemerintah harus mengelola dan memanfaatkannya. Pemerintah daerah dan pusat harus mampu menjalin kerjasama lintas sektoral, karena dalam pengembangan pariwisata, bagaimana menangkap peluang pengembangan pariwisata, antara lain:

- a. Bagi pemerintah, kondisi geografis dan alam Indonesia yang istimewa untuk pariwisata tidak boleh disia-siakan agar bisa dikembangkan untuk meningkatkan investasi Indonesia. Dengan adanya peluang investasi di sektor pariwisata,



Indonesia berpeluang meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah. Setidaknya industri pariwisata Indonesia masih sangat terbuka untuk menarik investasi asing. Namun jangan lupa perlunya mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan investasi di sektor pariwisata

- b. Memperkuat kredibilitas pemerintah terhadap lingkungan investasi, diharapkan investasi di sektor pariwisata meningkat menjadi
- c. Pemerintah memandang perlu memperkenalkan tempat-tempat wisata baru yang mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Masyarakat lokal harus diwajibkan melestarikan tempat wisata
- d. Pemerintah dapat secara aktif memberikan pengamanan berskala besar dan terorganisir di kawasan yang menjadi tujuan wisata.
- e. Pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan produksi iklan di banyak saluran televisi asing atau internasional. Periklanan merupakan salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Membuat iklan berupa event budaya dan pariwisata di



Indonesia dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

2. Tantangan

Seiring dengan peluang yang muncul, tantangan juga muncul, termasuk beberapa tugas mendesak yang harus diselesaikan. Tantangan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata meliputi:

a. Kondisi perekonomian global.

Tidak ada yang bisa memprediksi situasi perekonomian global. Hampir semua negara masih dalam tahap penyesuaian. Jika situasi ini terus berlanjut, tentu saja industri pariwisata akan terkena dampaknya.

b. Orientasi promosi pariwisata Indonesia

Saat ini adalah ke arah Asia pada umumnya dan ASEAN pada khususnya. Pasar ASEAN menjanjikan peluang yang besar, terutama sebelum Pasar Bersama ASEAN dilaksanakan. Namun situasi ini dapat memberikan tantangan yang cukup besar bagi Indonesia. Persaingan di pasar Asia mungkin akan semakin ketat. Beberapa negara ASEAN juga mempunyai potensi pariwisata yang sama pentingnya.

c. Infrastruktur dan aksesibilitas.

Harus diakui permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang



dihadapi industri pariwisata tanah air. Kekayaan pariwisata Indonesia selama ini belum didukung oleh ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta aksesibilitas. Wisatawan asing masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu, padahal destinasi lain mempunyai potensi yang kuat.

- d. Meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Pemerintah sebaiknya mulai memikirkan bagaimana industri pariwisata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Contoh spesifiknya adalah menciptakan kondisi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memanfaatkan momentum ini.

3. Strategi mengatasi tantangan dan peluang usaha pariwisata

Langkah-langkah strategis harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memberi manfaat bagi industri pariwisata dan seluruh industri yang terkait dengannya. Strategi tersebut harus digunakan untuk melakukan berbagai perbaikan sebagai persiapan untuk meningkatkan industri pariwisata melalui berbagai tahapan dan strategi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

- a. Strategi jangka pendek



Sebagai langkah strategis dan upaya penyelamatan industri pariwisata, beberapa strategi dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan dukungan terhadap pelaku usaha di industri pariwisata dan UMKM Hingga saat ini, pemerintah melalui kebijakannya berupaya meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha di industri pariwisata dan UMKM melalui program-program agenda kebijakan yang berbeda. Paling tidak terdapat lima paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari skema dalam upaya pemulihan ekonomi khususnya UMKM dan pelaku usaha pariwisata, yaitu:
 - a) paket pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha khususnya UMKM dan Pelaku usaha Pariwisata yang memiliki resistensi dan miskin;
 - b) Pemberian paket bantuan berupa insentif pajak bagi pelaku UMKM;
 - c) Paket bantuan berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha UMKM;
 - d) Paket bantuan perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; dan



- e) Pelatihan secara e-learning (Sugiri, 2020).
- 2) Memperkuat SOP dan kebijakan Mitigasi Bencana melalui standar protocol keselamatan dan kesehatan, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya adalah:
- a) Penerapan standar kesehatan secara disiplin terutama di tempat-tempat wisata tetap menjadi fokus utama untuk memnjaga supaya kemandan dan kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan dengan mempercepat proses sertifikasi CHSE khususnya di sentra-sentra destinasi wisata;
 - b) Menciptakan atraksi dan daya Tarik baru Indonesia
 - c) Memperbanyak events (MICE, Festival, Concert, dsb);
 - d) Strategi pemasaran yang tepat untuk membangun citra yang akan mencptakan rasa aman dan nyaman, sambil menunggu pulihnya kedatangan wisatawan asing maka tentu mempercepat proses pemulihan wisatwan domestik juga penting untuk dilakukan.
- b. Strategi jangka menengah



Strategi jangka menengah merupakan strategi kolaboratif (pentagonal) yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, khususnya akademisi, bisnis, pemerintah, konsumen dan media (ABGCM). Strategi ini akan berjalan maksimal jika masing-masing pihak mempunyai peran yang sesuai berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing untuk mampu berkolaborasi dengan baik dan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melatih sumber daya manusia dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam industri pariwisata. Selama ini peran perguruan tinggi masih terbatas pada proses pembelajaran, sedangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masih sangat terbatas. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dipromosikan secara masif dan berkelanjutan oleh perguruan tinggi, sedangkan pemerintah melalui kewenangan dan kebijakannya dapat fokus pada pembuatan peraturan dan peta jalan pengembangan industri pariwisata serta penyiapan anggaran. meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas



pada destinasi wisata. Agar pelaksanaan program yang direncanakan dapat berlangsung secara efektif, maka partisipasi pelaku ekonomi, konsumen, dan media tidak dapat dipisahkan.

c. Strategi Jangka Panjang

Dalam situasi yang tidak menentu akibat perkembangan yang terus pesat, upaya mengembangkan ide dengan tetap fokus pada potensi yang ada merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam kerangka kerangka strategis jangka pendek. Upaya jangka panjang untuk menjadikan pariwisata Indonesia sebagai “destinasi pilihan” di Asia Tenggara. Tahun 2022-2024 dikelompokkan sebagai periode untuk melanjutkan pertumbuhan awal pariwisata internasional dan mengupayakan kelanjutan pertumbuhan pariwisata dalam negeri. Kemudian pada tahun 2025-2030 akan terjadi masa pertumbuhan dan kebangkitan pariwisata Indonesia, baik internasional maupun domestik, hingga menjadi destinasi pilihan di Asia Tenggara dan diharapkan berdampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.





EVALUASI DAN MONITORING

A. Evaluasi Lingkungan dalam Pariwisata

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program karena melalui evaluasi dapat dinilai capaian pelaksanaan program. Menurut Usman (2011), evaluasi melibatkan penentuan tingkat pencapaian tinggi dari indikator kualitas yang diidentifikasi untuk pelaksanaan suatu program atau pekerjaan. Menurut Pramudyo (2013), evaluasi adalah cara sistematis belajar dari pengalaman untuk meningkatkan pelaksanaan program, pelaksanaan dan perencanaan melalui pemilihan yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Secara umum evaluasi adalah kegiatan membandingkan hasil yang



dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tingkat ideal yang diidentifikasi dalam pedoman untuk memperoleh umpan balik terhadap program atau pelaksanaan kegiatan yang berguna untuk menyusun rencana program dan kegiatan selanjutnya.

Wisata Alam menghadirkan tantangan utama dalam menciptakan bisnis yang berkembang untuk penghidupan masyarakat sekaligus melindungi budaya dan lingkungan sekitar (Simpson, 2009). Kualitas lingkungan penting bagi pariwisata tetapi ada hubungan yang kompleks antara pariwisata dan lingkungan. Perkembangan wisata memberikan dampak negatif terhadap lingkungan serta pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. Permasalahan terkait konsumsi energi, sanitasi, polusi suara dan udara serta tekanan terhadap flora dan fauna dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan (Susilawati, 2008). Dampak negatif dapat merusak sumber daya lingkungan konservasi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan risiko dan dampak selanjutnya. Evaluasi terhadap perkembangan kegiatan ekowisata perlu dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan, seperti pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya pemenuhan infrastruktur, transportasi, jasa pendukung informasi, dan lain-lain lain (Ardhana, 2018). Penilaian aspek



lingkungan perlu dilakukan secara berkala agar pembangunan pariwisata yang dilakukan sesuai dengan konsep ekowisata berkelanjutan yaitu memberikan dampak kecil terhadap lingkungan.

1. Identifikasi Dampak Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang menunjang kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. manusia dan organisme hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup yang kompleks, perilaku manusia terhadap lingkungannya selalu berkaitan. Perilaku ini mempunyai dampak positif namun juga dampak negatif. Berdampak positif apabila perilaku tersebut berdampak baik terhadap lingkungan dan apabila berdampak buruk terhadap lingkungan maka dapat dikatakan perilaku tersebut negatif.

Lingkungan pariwisata adalah lingkungan hidup karena banyak kegiatan masyarakat yang berlangsung di suatu tempat. menyenangkan dan umumnya tidak terkendali, lingkungan pariwisata sangat rentan terhadap dampak kegiatan masyarakat. Banyak masyarakat lokal dan wisatawan yang tidak peduli terhadap



lingkungan pariwisata, padahal lingkungan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.

Pariwisata, yang menghubungkan banyak aspek dunia usaha, mendorong semua pihak, terutama pemerintah, untuk menciptakan kondisi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Hal ini penting karena lingkungan pariwisata yang bertumpu pada alam, budaya, dan warisan budaya secara alami memiliki keterbatasan dalam menjaga kondisi fenomena kehidupan agar terus berkembang.

Pariwisata dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata berupa kerusakan lingkungan hidup. Menurut Oka dalam Rahman (2014), kegiatan wisata dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, yaitu:

- a. Pembuangan sampah yang sembarangan akibat kegiatan wisata selain menimbulkan bau yang tidak sedap juga menimbulkan kerusakan dan mematikan pepohonan disekitarnya.
- b. Pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau, dan laut.



- c. Kerusakan trumbu karang akibat nelayan tidak lagi “memiliki” pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun hotel dan restoran. Akibatnya para nelayan membom terumbu karang sehingga dampak yang lebih jauh yaitu tidak ada lagi daya tarik pantai.
- d. Perusakan sumber daya hayati yang tidak terkendali menyebabkan perambahan hutan bakau untuk dijadikan tambak udang.

Sedangkan menurut Suwena dan Widyatmaja (2017), pariwisata mempunyai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, yaitu:

Dampak positif pariwisata terhadap lingkungan antara lain:

- a. Melestarikan dan melestarikan kawasan alam seperti: cagar alam, kebun raya, suaka margasatwa.
- b. Melestarikan dan melestarikan peninggalan sejarah dan arkeologi seperti: candi Borobudur, Prambanan dan Tanah Lot
- c. Memperkenalkan pengelolaan dan penataan kawasan wisata atau kawasan yang dijadikan daya tarik wisata agar kawasan tersebut ditata dengan matang



dan banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri.

Dampak negatif pembangunan pariwisata terhadap lingkungan antara lain:

- a. Wisatawan membuang sampah sembarangan pada saat mendaki gunung
- b. Penggunaan api unggun secara sembarangan pada saat berkemah di bumi perkemahan atau kebun raya
- c. Wisatawan merusak terumbu karang dengan cara menahan dan menempati wilayah kecil bagian dari karang dengan dalih memuaskan rasa penasaran mereka.
- d. Pencemaran air laut disebabkan oleh tumpahan minyak dan lemak dari perahu motor serta pembuangan air limbah dalam jumlah besar dari hotel-hotel yang terletak di dekat pantai.
- e. Reklamasi
- f. Grafiti pada dinding, bagian monumen bersejarah dan dinding candi oleh orang yang berkunjung ke tempat tersebut.
- g. Ketidakmampuan prasarana (sarana) dalam menampung jumlah wisatawan pada musim tertentu sehingga menimbulkan pencemaran dan kemacetan di kawasan wisata.

Dampak pariwisata terhadap lingkungan mencakup delapan komponen, yaitu air, udara, pantai dan pulau, kawasan



pegunungan dan hutan belantara, vegetasi, satwa liar, situs sejarah dan budaya religi, serta kawasan pedesaan dan perkotaan (Ismayanti, 2010).

Tabel 4. 4 Dampak Positif

No	Dampak terhadap	Manfaat	Beban
1.	Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kebersihan dan penghematan air 2. Penggunaan alat transportasi air ramah lingkungan (seperti perahu dayung) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polusi pembuangan limbah (polusi air) 2. Sulit mendapatkan air bersih 3. Gangguan kesehatan masyarakat 4. Kerusakan vegetasi air 5. Estetika perairan berkurang
2.	Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polusi udara 2. Polusi suara



No	Dampak terhadap	Manfaat	Beban
		2. Penggunaan alat angkutan udara massal	3. Gangguan kesehatan masyarakat
3.	Pantai dan Pulau	1. Preservasi dan konservasi panati dan laut 2. Kegiatan wsata ramah lingkungan	1. Lingkungan tepian pantai rusak 2. Kerusakan karang laut 3. Hilangnya peruntukan lahan pantai tradisional
4.	Pegunungan dan area liar	1. Reboisasi 2. Peremajaan pegunungan	1. Tanah longsor 2. Eros tanah 3. Menipisnya vegetasi pegunungan 4. Polusi visual
5.	Vegetasi	1. Upaya biodiversitas 2. Reboisasi 3. Konservasi	1. Pembalakan liar 2. Pembabatan pepohonan 3. Bahaya kebakaran hutan



No	Dampak terhadap	Manfaat	Beban
			(akibat api unggun)
			4. Koleksi tanaman untuk cinderamata
6.	Kehidupan liar	1. Konservasi preservasi 2. Biodiversitas 3. Pembiakan satwa 4. Relokasi hewan ke habitat asli 5. Pembuatan peraturan tentang perburuan hewan	dan 1. Pemburuan sebagai cinderamata 2. Pelecehan satwa liar untuk fotografi 3. Eksploitasi hewan untuk pertunjukan 4. Gangguan reproduksi hewan 5. Perubahan insting hewan 6. Migrasi hewan
7	Situs sejarah, budaya, dan keagamaan	1. Konservasi preservasi 2. Renovasi	dan 1. Kepadatan di daera wisata 2. Alterasi fungsi awal situs



No	Dampak terhadap	Manfaat	Beban
		5. 3. Manajemen pengunjung	7. Komersialisasi daerah wisata
8	Wilayah perkotaan dan pedesaan	1. Penataan kota atau desa 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Manajemen pengunjung	1. Tekanan terhadap lahan 2. Perubahan fungsi lahan setempat tinggal menjadi lahan komersil 3. Kemacetan lalu lintas Polusi suara, polusi udara, polusi \ estetika

Sumber: Ismayanti (2010)

Pada dasarnya kegiatan pariwisata merupakan kegiatan semi lingkungan, masyarakat yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah tujuan wisata yang lain ingin menikmati lingkungan hidup seperti pemandangan alam, atraksi budaya, arsitektur, makanan dan minuman, karya seni dan lain-lain. lingkungan. Dimana mereka tinggal.

Dampak positif pariwisata dari segi lingkungan hidup:



- a. Memperkuat upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan alam, spesies hewan dan lingkungan pertanian
- b. Meningkatkan pemugaran monumen dan bangunan bersejarah
- c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan wisata
- d. Peningkatan penyediaan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur eksisting
- e. Perubahan karakter kawasan terbangun melalui pemekaran dan penataan kota
- f. Perubahan pembangunan atau struktur perkotaan dan pedesaan
- g. Meningkatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pembersihan lingkungan
- h. Perlindungan lingkungan hidup
- i. Mengutamakan suasana hidup yang tenang dan bersih
- j. Meningkatkan kenikmatan fisik & mental
- k. Menjauhi polusi, bersantai dapat memulihkan kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pembangunan merupakan upaya untuk menjaga lingkungan.
- l. Perolehan nilai tambah dari pemanfaatan saat ini dan lingkungan hidup
- m. Jika suatu destinasi wisata ingin menerima banyak pengunjung maka harus dijaga kebersihannya agar kita bisa



membiasakan diri menjaga dan melestarikan lingkungan agar selalu bersih.

Dampak negatif terkait aspek lingkungan hidup:

- a. Menyebabkan pencemaran air, udara, kebisingan dan tanah
- b. Peningkatan erosi dalam bentuk: Erosi pantai, tanah longsor, kerusakan geologi dan kerusakan tepian sungai
- c. Drainase sumber air bawah tanah dan udara
- d. Eksplorasi sumber mineral sebagai bahan konstruksi
- e. Eksploitasi sumber daya hayati secara berlebihan
- f. Peningkatan risiko kebakaran
- g. Munculnya perbedaan mencolok antara kawasan wisata dan pemukiman
- h. Kelebihan infrastruktur seperti kemacetan lalu lintas
- i. Terjadi penumpukan sampah dan limbah yang merusak ekosistem sekitar
- j. Terumbu karang dirusak oleh pihak-pihak yang penasaran karena permintaan meningkat dari
- k. Penebangan hutan untuk membangun infrastruktur pariwisata telah merusak habitat satwa liar dan menyebabkan tanah longsor



1. Terjadinya perusakan lingkungan, baik akibat pembangunan infrastruktur, fasilitas wisata, maupun ulah wisatawan atau ulah tangan-tangan jahil masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

B. Penilaian Risiko

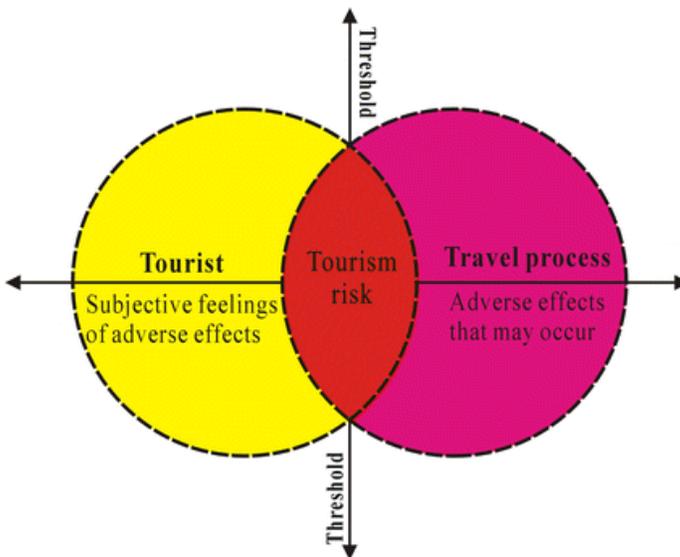
a. Gambaran Umum

Secara umum teori persepsi risiko pariwisata melibatkan psikologi, sosiologi, budaya, ekonomi dan banyak disiplin ilmu lainnya. Transmisi informasi risiko, persepsi risiko, dan respons risiko merupakan tiga elemen komunikasi risiko massal. Persepsi risiko adalah pengalaman psikologis dan pemahaman tentang pengaruh sosial terhadap kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Manajemen risiko dan kemampuan untuk menilai bahaya secara akurat memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi risiko dan memperkuat faktor-faktor negatif adalah dua isu penting. Sampai batas tertentu, interpretasi kolektif terhadap informasi risiko meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, yang juga dapat



menimbulkan rumor tentang bencana (Quarantelli 1983; Prashant dan Nicholas 2004; Carol 2015).

Sejak tahun 1990an, risiko pariwisata telah mendapat perhatian luas dari para peneliti di bidang psikologi kognitif dan perilaku konsumen (Sonmez dan Graefe 1998). Persepsi risiko sering digunakan untuk menggambarkan secara konseptual sikap masyarakat dan penilaian intuitif terhadap risiko.



Gambar 2. 3 Tiga pandangan konsep persepsi risiko pariwisata

Sejalan dengan itu, konsep “persepsi risiko pariwisata” juga dapat dibagi menjadi tiga aspek (Gambar 5.1), khususnya

- 1) Persepsi risiko pariwisata adalah perasaan subjektif wisatawan terhadap akibat atau dampak negatif yang mungkin timbul selama perjalanan;
- 2) Persepsi risiko pariwisata adalah penilaian obyektif wisatawan terhadap akibat atau dampak negatif yang mungkin terjadi selama perjalanan;
- 3) Perceived travel risk adalah persepsi wisatawan yang melebihi ambang batas akibat negatif atau dampak negatif yang mungkin terjadi selama perjalanan.

b. Faktor persepsi risiko pariwisata

1) Faktor Subyektif

Faktor subjektif yang mempengaruhi persepsi risiko perjalanan terutama sebagai berikut:

- a) Sensitivitas perempuan terhadap risiko terkait perjalanan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki;
- b) Kesamaan budaya dan psikologis serta kedekatan spasial lokasi geografis menentukan perasaan kehilangan wisatawan;



- c) Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin sering mereka terpapar media, dan semakin tinggi status kelasnya, semakin kuat persepsi risikonya;
 - d) Ketika masyarakat lebih percaya pada sumber informasi dan institusi, persepsi risiko mereka akan semakin kuat;
 - e) Masyarakat perkotaan memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan;
 - f) Kekhawatiran, kekhawatiran, dan emosi lain masyarakat terhadap risiko perjalanan dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap persepsi risiko, sedangkan pemahaman individu terhadap risiko perjalanan juga akan mempengaruhi intensitas emosinya.
- 2) Faktor obyektif

Faktor obyektif yang mempengaruhi persepsi risiko perjalanan terutama mengacu pada konsekuensi atau dampak negatif yang mungkin terjadi selama perjalanan. Persepsi wisatawan terhadap risiko biasanya mencakup lima sampai tujuh dimensi, yaitu:

- a. Lima dimensi risiko: risiko psikologis, risiko finansial, risiko



kinerja, risiko kesehatan, dan risiko sosial;

b. enam dimensi risiko: risiko kinerja, risiko fisik, risiko keuangan, risiko psikologis, risiko sosial dan risiko temporal;

c. Risiko tujuh dimensi: Risiko fisik, risiko ekonomi, risiko fisik, risiko sosial, risiko psikologis, risiko sementara dan risiko hilangnya peluang.

b. Manajemen Risiko dan Pentingnya Manajemen Risiko

Risiko adalah segala kejadian yang dapat terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap organisasi atau destinasi pariwisata. Manajemen risiko adalah proses berulang yang terdiri dari langkah-langkah yang didefinisikan dengan jelas, dilakukan secara berurutan, yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi risiko dan dampaknya. Desa wisata memerlukan manajemen risiko karena (Suroso, 2017):

- 1) Manfaat desa wisata terhadap perekonomian masyarakat;
- 2) Pariwisata merupakan industri yang memiliki banyak permasalahan keamanan dan keselamatan;



3) Upaya menjaga kelestarian desa wisata. Resiko di luar industri pariwisata antara lain (Suroso, 2017):

- 1) Tindak pidana umum (pencurian, pencopetan, penyerangan, pencurian, penipuan);
- 2) Kekerasan tanpa pandang bulu seperti pemerkosaan dan pelecehan;
- 3) Kejahatan terorganisir (pemerasan, perdagangan manusia, perbudakan, pemaksaan);
- 4) Terorisme, pembajakan dan penyanderaan;
- 5) Perang, konflik sosial, ketidakstabilan politik dan agama.

Risiko pada sektor pariwisata antara lain (Suroso, 2017):

- 1) Buruknya standar keselamatan di destinasi wisata (kebakaran, kesalahan konstruksi, kurangnya tindakan pencegahan gempa);
- 2) Buruknya kebersihan dan kurangnya penghargaan terhadap kelestarian lingkungan;
- 3) Tidak ada perlindungan terhadap gangguan dan kejahatan yang tidak sah di fasilitas wisata;
- 4) Penipuan dalam transaksi komersial;
- 5) Kegagalan untuk mematuhi kontrak;
- 6) Pekerja mogok.



Resiko dari lingkungan alam meliputi tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, angin puting beliung dan wabah penyakit. Resiko dari individu wisatawan adalah sebagai berikut (Suroso, 2017):

- 1) Mempraktikan olahraga dan aktivitas yang berbahaya, mengemudi yang berbahaya, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak aman;
- 2) Berpergian dengan kesehatan yang buruk, yang memburuk selama perjalanan;
- 3) Menyebabkan konflik dan gesekan dengan warga setempat melalui perilaku yang melanggar norma dan adat istiadat masyarakat setempat atau dengan melanggar hukum setempat;
- 4) Melaksanakan kegiatan terlarang atau kriminal seperti perdagangan obat terlarang;
- 5) Mengunjungi daerah berbahaya;
- 6) Kehilangan barang milik pribadi (dokumen, uang, dan lain-lain) karena kecerobohan.

Risiko terhadap keselamatan dan keamanan wisatawan, masyarakat tuan rumah dan pegawai pariwisata dapat



berasal dari empat sumber (Suroso, 2017):

- 1) Lingkungan manusia dan kelembagaan diluar sektor pariwisata;
- 2) Sektor pariwisata dan sektor komersil terkait;
- 3) Individu wisatawan (risiko pribadi);
- 4) Risiko fisik atau lingkungan.

Identifikasi Risiko dan Analisis Resiko

Pikirkan risiko-resiko yang mungkin terjadi di desa wisata misalnya di Area Camping Ground, sumber resikonya adalah tanah longsor, resikonya para pengunjung yang berkemah dapat tertimbun tanah longsor yang menyebabkan meninggal dunia/luka berat. Menganalisis resikonya adalah sebagai berikut: (1) Analisis kemungkinan suatu risiko akan terjadi; (2) Analisis seberapa besar dampak dari risiko tersebut bila terjadi

Penanganan, Monitoring dan Review Resiko

Penanganan risiko dengan memperhatikan upaya yang diambil untuk menangani risiko-resiko tersebut. Upaya alternatif yang dapat dilakukan antara lain penghapusan risiko, mitigasi risiko, dan



pengalihan risiko seperti asuransi. Pemantauan dan peninjauan meliputi: (1) pelaksanaan upaya manajemen risiko yang dipantau; (2) Apabila efektif dan efisien, merevisi dan memasukkan dalam proses penetapan tujuan dan sasaran selanjutnya

C. Pemetaan Sumber Daya

Peta sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata, pendekatan sumber daya alam menggunakan analisis spasial dilakukan dalam enam tahap yaitu:

- a. mengidentifikasi mengidentifikasi dan menganalisis calon wisatawan
- b. mengidentifikasi dan menganalisis preferensi pemangku kepentingan
- c. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sumber daya alam dan lingkungan pesisir
- d. mengidentifikasi mengidentifikasi dan menganalisis sarana dan prasarana pendukung
- e. mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya masyarakat lokal
- f. rencana pengembangan kawasan pariwisata

Tabel 4. 5 Pemetan Sumber Daya



No	Atraksi wisata alam	Rating	Kriteria
1	Air laut	3	Air laut yang bersih, berwarna biru, tidak adanya sampah, dan sangat cocok untuk kegiatan wisata memancing dan berselancar
		2	Air laut yang cukup bersih, berwarna biru, terdapat adanya sampah, dan cukup cocok untuk kegiatan wisata memancing dan berselancar
		1	Air laut yang kotor, berwarna keruh, terdapat banyak sampah dan tidak cocok untuk kegiatan wisata memancing dan berselancar
	Pasir	3	Pasir berwarna putih, bersih, tidak adanya sampah, dan sangat cocok untuk kegiatan wisata jogging track dan spot foto
		2	Pasir berwarna putih, cukup bersih, terdapat adanya sampah, dan cukup cocok untuk kegiatan wisata jogging track dan spot foto
		1	Pasir terlihat kotor, terlihat tidak bersih, terdapat banyak sampah



No	Atraksi wisata alam	Rating	Kriteria
			dan tidak cocok untuk kegiatan wisata jogging track dan spot foto
2	Hutan cemara :	Rating	Kriteria
		3	Pohon yang banyak tumbuh sekitar > 20, udara yang sejuk dan nyaman, tidak adanya sampah, dan sangat cocok untuk kegiatan wisata rumah pohon dan hammock
		2	Pohon yang cukup banyak tumbuh sekitar 10 -20, udara yang cukup sejuk dan nyaman, terdapat adanya sampah, dan cukup cocok untuk kegiatan wisata rumah pohon dan hammock
		1	Pohon yang sedikit tumbuh sekitar < 10, udara terasa panas dan tidak sejuk, terdapat banyak sampah, dan tidak cocok untuk kegiatan wisata rumah pohon dan hammock
	Tapak	3	terdapat banyak tumbuhan, tidak adanya sampah, dan sangat cocok untuk kegiatan wisata berkemah dan outbound



No	Atraksi wisata alam	Rating	Kriteria
		2	Tapak yang cukup keras dan tidak tergenang air, terdapat cukup banyak tumbuhan, terdapat adanya sampah, dan cukup cocok untuk kegiatan wisata berkemah dan outbound
		1	Tapak yang cukup keras dan sedikit tergenang air, terdapat adanya sedikit tumbuhan, terdapat banyak sampah, dan tidak cocok untuk kegiatan wisata berkemah dan outbound
3	Hutan mangrove :	Rating	Kriteria
	Pohon	3	Pohon yang banyak tumbuh sekitar > 20, udara yang sejuk dan nyaman, tidak adanya sampah, dan sangat cocok untuk kegiatan wisata tracking mangrove
		2	Pohon yang cukup banyak tumbuh sekitar 10 -20, udara yang cukup sejuk dan nyaman, terdapat adanya sampah, dan cukup cocok untuk kegiatan wisata tracking mangrove



No	Atraksi wisata alam	Rating	Kriteria
		1	Pohon yang sedikit tumbuh sekitar < 10, udara terasa panas dan tidak sejuk, terdapat banyak sampah, dan tidak cocok untuk kegiatan wisata tracking mangrove

Sumber : Rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang, 2013

D. Monitoring Lingkungan dalam Pariwisata

Pemantauan lingkungan (Environmental Monitoring) adalah proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, dan pencatatan secara lisan dan visual menurut prosedur baku tertentu terhadap satu atau lebih komponen lingkungan hidup dengan menggunakan satu atau lebih parameter yang dijadikan acuan, yang dilakukan secara terencana, terprogram, dan terkendali. selama periode waktu tertentu. Dalam pemantauan lingkungan, pemantauan sering dilakukan untuk menghasilkan data yang sesuai sebagai unsur analisis observasi.

Kegiatan lanjutan acara You MEC 2015 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Pemantauan juga



digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, memperbaiki penyalahgunaan aturan dan sumber daya, dan memastikan bahwa tujuan yang direncanakan yang ditetapkan oleh tim desain kreatif tercapai. Pemantauannya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Kunjungan kelapangan
2. Memantau melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing pengelola, baik pengelola program/kegiatan inti maupun pendukung, termasuk target dana dan persentase pencapaian serta capaian kemajuan kegiatan.

Memantau suatu kegiatan dengan cara yang kedua, yaitu melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing manajer. Dalam hal ini, setiap perkembangan informasi dari media dan penelitian terus dikumpulkan sehingga dapat diketahui permasalahan dan risiko yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan.

Pemantauan adalah penilaian berkelanjutan terhadap fungsionalitas kegiatan proyek dalam konteks kemajuan dan penggunaan masukan proyek sesuai harapan desain. Pemantauan merupakan bagian integral dari kegiatan proyek, merupakan elemen kunci dari praktik manajemen yang baik dan oleh karena itu



merupakan bagian integral dari pekerjaan manajemen sehari-hari.

Pengawasan dilakukan secara terus menerus atau permanen dan bersifat global. Cakupannya juga luas dan bisa mencakup pembangunan atau kegiatan pemerintahan apa pun. Secara umum kegiatan pemantauan menggunakan data kuantitatif untuk dapat membandingkan hasil indikator-indikator yang diteliti dalam konteks pengelolaan suatu unit kerja, organisasi, atau suatu rencana umum kegiatan, program atau kegiatan. Hasil pemantauan dilakukan secara berkala dan cepat untuk membantu segera mengidentifikasi kegagalan dan hambatan dalam proses pengembangan atau kemajuan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dengan demikian suatu corrective action, dapat segera dilakukan antar unit kerja pelaksana atau antar para penanggungjawab terkait. Jadi monitoring juga merupakan wujud dari suatu sistem kerja yang saling terhubung yang dapat mengamankan fungsi manajemen dan hasil kerja.

1. Pengumpulan Data

a. Mutu Kualitas Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dalam pasal 1, bahwa status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi



baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Dengan cara ini, kualitas suatu badan air dapat dikelompokkan ke dalam kelas tertentu, sesuai dengan tingkat pencemarannya, apakah memenuhi standar sesuai peruntukannya, ataukah berada dalam kondisi tercemar dengan tingkat pencemaran tertentu (misalnya cemar ringan, sedang, atau berat). Dengan demikian, suatu sumber air dapat dinyatakan berada dalam kondisi baik jika memenuhi baku mutu air, atau dalam kondisi cemar bila tidak memenuhi baku mutu air yang ditetapkan. Lebih lanjut lagi, kondisi cemar ini dapat dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa tingkatan, misalnya cemar ringan, cemar sedang, atau cemar berat.

Status mutu air berguna sebagai gambaran mutu air, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan kualitas air sesuai peruntukannya, jika air dinyatakan berada dalam kondisi cemar atau mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas air jika sudah memenuhi baku mutu air (PP Nomor 82 Tahun 2001, pasal



15). Dalam hal kondisi tercemar, pembagian tingkat pencemaran dapat menunjukkan kesenjangan antara kualitas sumber air yang tercemar dengan baku mutu dan dapat menjadi target perbaikan kualitas air secara bertahap.

Keadaan mutu air saat ini ditentukan dengan dua metode yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Mutu Air, Keadaan Mutu Air Saat Ini, yaitu Metode STORET dan Metode Pencemaran. metode indeks dikembangkan oleh Nemerow & Sumitomo.

Langkah-langkah penentuan status kualitas air dengan metode STORET adalah sebagai berikut.

- 1) Mengumpulkan data kualitas air secara berkala untuk menghasilkan data sepanjang waktu (time series data).
- 2) Menetapkan nilai minimum, maksimum dan rata-rata dari data pengukuran.
- 3) Bandingkan data pengukuran dengan nilai sesuai baku mutu yang telah ditentukan:
 - a) Apabila hasil pengukuran memenuhi baku mutu maka diberi nilai 0.



b) Apabila hasil pengukuran tidak memenuhi baku mutu maka diberikan nilai negatif sebesar

b. Mutu Kualitas Udara

Metode perhitungan IKU menerapkan program Program European Union (EU) melalui European Regional Development Fund dalam kerangka proyek inisiatif regional yaitu “Common European Air Information” (Citeair II) bertajuk CAQI Air Quality Index:

Comparison of urban kualitas udara menurut Frontières 2012. Indeks kualitas udara umum (CAQI) digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak tahun 2006. Nilai rata-rata tahunan polutan udara diperoleh dari data pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan passive sampling, dimana kualitas udara ambien adalah dipantau menggunakan Gunakan sampler pasif. Metode ini mencakup beberapa langkah. Sampel udara dikumpulkan menggunakan passive sampler dan dilanjutkan dengan menganalisis sampel udara sekitar dilaboratorium menggunakan kromatografi ion dan spektrometer. Parameter pencemar udara yang selama ini digunakan dalam perhitungan IKU adalah NO₂ dan SO₂. Pengambilan sampel udara



ambien secara pasif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai musim hujan dan musim kemarau;
- 2) Pengawasan dilakukan oleh kabupaten/kota; dan
- 3) Pengambilan sampel udara ambien mewakili 4 (empat) lokasi, yaitu: kawasan lalu lintas padat, kawasan industri, kawasan pemukiman padat, kawasan komersial (perkantoran atau perusahaan) usaha tidak terkena dampak langsung lalu lintas).

2. Penetapan Indikator Lingkungan

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini diadopsi dari banyak sumber, antara lain Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) yang dikembangkan oleh pusat penelitian di Yale University, khususnya Yale Center for Environmental Law and Policy dan Columbia University (International Earth Science Information Network Center) yang bekerja sama dengan Dunia. Forum Ekonomi dan Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



merupakan publikasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia (Suryani, 2017). IKLH dapat digunakan untuk menilai kualitas lingkungan secara keseluruhan dan tren dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. IKLH berfokus pada lingkungan perairan, udara, dan tutupan lahan.

b. Kualitas Udara

Kualitas udara dinyatakan dalam Indeks Pencemaran Udara (IPU). Hanya dua (2) parameter kualitas udara yang dimasukkan dalam perhitungan: SO₂ dan NO₂, meskipun parameter kualitas udara ambien memiliki sembilan (9) parameter. Kedua parameter ini tidak diubah karena pencemaran udara di perkotaan terutama disebabkan oleh industri transportasi. Kedua parameter ini juga hanya mewakili sebagian kecil dari parameter kualitas udara ambien yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pada PP, parameter kualitas udara antara lain SO₂, CO, NO₂, O₃, Pb, debu jatuh, TSP (totalsuspensi partikel), PM_{2.5} dan PM₁₀ (partikulat) dan hidrokarbon (HC).

c. Kualitas Air



Kualitas air dinyatakan dalam Indeks Pencemaran Air (WPI). Parameter kualitas air yang dihitung dalam IPA untuk mendapatkan IKLH hanya mencakup 3 (tiga) parameter yaitu TSS (Total Suspended Solids), DO (Dissolved Oxygen), dan COD (Chemical Demand for Oxygen). Pemilihan parameter TSS, DO dan COD didasarkan pada data tahunan yang tersedia. Sebagai perbandingan, parameter kualitas air yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air meliputi 47 parameter yang meliputi tiga (3) parameter fisik, 27 parameter kimia anorganik, dua (2) parameter mikrobiologi, dua (dua) parameter kualitas air. 2) parameter radiologi dan 13 parameter kimia organik.

d. Tutupan Hutan

Tutupan Hutan dinyatakan sebagai Indeks Tutupan Hutan (FHI) yang dihitung berdasarkan total luas hutan primer (LHP) dan luas hutan sekunder (LHS) yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (LWP) Provinsi. LHP ditambah LHS sama dengan LTH. Hutan primer adalah hutan yang belum terkena dampak manusia atau dampaknya kecil. Hutan sekunder adalah



hutan yang berkembang melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan parah, seperti lahan yang digunakan untuk pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

E. Tindakan Korektif dan Perbaikan

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan lingkungan hidup dan pembangunan global yang paling mendesak saat ini. Ketika destinasi wisata utama semakin merasakan dampak perubahan iklim terhadap pantai, hutan, dan aset alam lainnya, industri pariwisata merasakan tekanan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang signifikan, dan khususnya emisi karbon.

Untungnya, ada sejumlah strategi mitigasi yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak pariwisata terhadap perubahan iklim, banyak di antaranya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Berikut beberapa contoh strategi mitigasi: 1) Penggunaan sumber energi terbarukan dalam berbagai kegiatan pariwisata; 2) Adaptasi terhadap pariwisata hemat energi; 3) Mengurangi penggunaan plastik Sekali Pakai dalam Perjalanan; 4) Mempromosikan pilihan transportasi berkelanjutan bagi wisatawan



1. Melestarikan Dan Melindungi Sumber Daya Alam

Konservasi berarti mengkonsumsi lebih sedikit energi, air atau limbah. Dengan terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan mengurangi atau mendaur ulang limbah, dengan cara menunjukkan kepada pelanggan untuk meminimalkan beberapa dampak lingkungan, sekaligus menjaga Lindungi ekosistem lokal dan kurangi biaya energi atau air.

2. Keterlibatan Dan Keterlibatan Masyarakat

Pariwisata adalah industri interdisipliner yang tumbuh subur atas keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sama pentingnya bagi perusahaan perjalanan, wisatawan, dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan anggota masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata dan rantai pasokan akan memastikan bahwa pembangunan mencapai keseimbangan untuk memberikan hasil yang saling menguntungkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan warisan budaya, mendukung bisnis lokal, beroperasi sesuai dengan nilai-nilai lokal, menghormati tradisi masyarakat adat dan menghindari kerusakan pada ekosistem yang



menjadi sandaran masyarakat lokal sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian. Contoh yang baik adalah konsep pertanian ke meja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seputar rantai pasokan pendek dan produk “lokal”, peternakan dan destinasi dapat menawarkan lebih banyak pengalaman berbasis alam, memungkinkan pengunjung untuk belajar tentang praktik pertanian berkelanjutan lokal, menyaksikan proses pertumbuhan dan mencicipi produk yang baru dipanen.

Pengalaman yang memperkaya ini tidak hanya mendidik wisatawan tentang pertanian berkelanjutan dan produksi pangan namun juga mendukung petani dan koki lokal. Tur dari pertanian ke meja juga memungkinkan wisatawan untuk merasakan berbagai jenis praktik berkelanjutan seperti hidroponik dan pertanian vertikal.

3. Transportasi Berkelanjutan

Transportasi berperan penting dalam jejak karbon pariwisata. Pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan, kapal laut, dan khususnya pesawat terbang melepaskan gas rumah kaca dan mengeluarkan emisi karbon dalam jumlah yang cukup besar tergantung pada lokasi keberangkatan dan tujuan akhir.



Oleh karena itu, mengurangi dampak transportasi terhadap lingkungan dan mendorong pilihan transportasi yang berkelanjutan (seperti sepeda, angkutan umum, carpooling, dan carpooling) sangat penting untuk mengurangi jejak karbon dari operasi perjalanan atau resor. Selain itu dengan memperkenalkan bahan bakar yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti biofuel dan hidrogen, untuk menggantikan bahan bakar fosil dan pilihan mobilitas yang lebih ramah lingkungan: kendaraan listrik. Pilihan transportasi rendah atau nol karbon, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan bentuk transportasi aktif lainnya, juga dapat menjadi pilihan untuk jarak pendek, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong gaya hidup sehat.

4. Pendidikan Dan Kesadaran

Penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan wisatawan, profesional industri, dan komunitas lokal tentang apa yang dilakukan untuk pariwisata berkelanjutan. Fokus untuk mendorong perilaku perjalanan yang bertanggung jawab, seperti mengurangi sampah, mencegah sampah, menghormati budaya lokal, dan mendukung bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan melakukan hal ini, pariwisata



berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam bisnis dan menciptakan siklus positif praktik pariwisata yang bertanggung jawab, yang selanjutnya berkontribusi terhadap konservasi pariwisata, mempertahankan destinasi dan sumber daya lokal.

5. Perencanaan Dan Pengelolaan Destinasi

Dari awal kembangkan dan terapkan rencana pengelolaan berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung destinasi, peraturan zonasi dan konservasi warisan alam dan budaya, serta menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Tujuan dan sasaran yang jelas harus ditetapkan untuk memandu pembangunan ke arah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat dan kepuasan pengunjung. Perencanaan dan pengelolaan destinasi yang efektif memastikan keberlanjutan jangka panjang dan daya saing destinasi pariwisata, yang juga akan membuat bisnis lebih menarik bagi pelanggan.

6. Pemantauan Dan Evaluasi

Dunia usaha di industri pariwisata harus secara teratur memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan mereka, termasuk emisi karbon dan aliran limbah, berdasarkan tonggak penting (indikator kinerja (KPI)



untuk mencapai tujuan yang spesifik namun ambisius. Pemantauan dan evaluasi memberikan cara untuk mengukur dan melacak kinerja bisnis, selain mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Meskipun hal ini tampak seperti sebuah langkah besar, lihatlah inisiatif keberlanjutan pemerintah daerah, program dukungan ramah lingkungan, atau program keringanan pajak untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan mekanisme dukungan yang dapat membantu membiayai transisi ramah lingkungan.

7. Pemikiran Khusus

Pariwisata mempunyai potensi untuk berkontribusi dan memitigasi dampak perubahan iklim. Untuk melakukan hal ini, penting bagi industri untuk menyadari betapa parahnya masalah ini dan mengambil pendekatan yang bijaksana.

Meskipun berpotensi mempengaruhi perekonomian, budaya, dan bentang alam, hal ini juga berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan. Emisi karbon dari transportasi, operasional hotel yang boros energi, dan tekanan terhadap sumber daya alam semuanya berkontribusi terhadap jejak karbon industri pariwisata.



Namun, mengubah pariwisata menjadi kekuatan perubahan positif berada dalam jangkauan kita. Dengan menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak industri terhadap perubahan iklim dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Hal ini memerlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, organisasi pariwisata, dunia usaha, dan wisatawan itu sendiri. memprioritaskan sumber energi terbarukan, mengurangi emisi karbon terkait transportasi, mendukung pilihan akomodasi berkelanjutan, dan terlibat dalam praktik pariwisata yang bertanggung jawab.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodry Azizy (2004). *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 29
- A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta
- Alfiansyah, R., Bani, P. N., & Soerdarwo, V. S. D. (2022). Implikasi Alih Fungsi Lahan menjadi Destinasi Wisata di Sekitar Cafe Sawah Desa Pujon Kidul. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 42-56.
- Arjana, I. G. B. (2021). *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=wNsaEAAAQBAJ>



Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.

berkelanjutan. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem: Jakarta.

BPS. (2023). Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Desember 2022 mencapai 895,12 ribu kunjungan dan Jumlah penumpang angkutan udara internasional pada Desember 2022 naik 14,87 persen. Badan Pusat Statistik Nasional. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/01/1974/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-pada-desember-2022-mencapai-895-12-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-desember-2022-naik-14-87-persen.html>

Brida, J. G., & Pulina, M. (2010). Literature review on the tourism-led-growth hypothesis.

Burns, P.M. and A. Holden. 1997. Alternative and Sustainable Tourism Development – The Way Forward. In: France, L. (Ed). The Earthscan Reader in Sustainable Tourism. Earthscan. London.

Cui, F., Liu, Y., Chang, Y. et al. (2016). An overview of tourism risk perception. *Nat Hazards* 82,



643–658. <https://doi.org/10.1007/s11069-016-2208-1>

Dowling, R. K., & Jamal, T. (2010). Operating hotels in an environmentally sustainable manner. In D. R. Yale (Ed.), *The Routledge Handbook of Transport Economics* (pp. 258-270). Routledge.

Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

Fandeli, C. dan Muhammad. 2019. Analisis daya dukung lingkungan dalam perpektif pembangunan

Freeman, R. E., & Velamuri, S. R. (2006). A new approach to CSR: Company stakeholder responsibility. *California Management Review*, 48(2), 25-41.

Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat: sebuah pendekatan konsep*. Graha Ilmu.

Hadiwijoyo, S.S. 2018. *Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*. Suluh Media: Yogyakarta

Harijadi Kartodiharjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta



Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. “Standar Profesional Akuntan Publik: Standar Atestasi, Standar Auditing, Standar Jasa Akuntansi dan Review per 1 Agustus 1994”, Cetakan ke-1. BP STIE YKPN.

Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. “Standar Akuntansi Keuangan: Per 1 Juni 1999”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 27001:2013 - Information security management systems - Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2015). ISO 14001:2015 - Environmental management systems - Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems - Requirements. ISO.



- International Organization for Standardization. (2018). ISO 50001:2018 - Energy management systems - Requirements. ISO.
- Ira, W.S., Muhammad. 2020. Partisipasi Masyarakat pada penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Studi kasus desa wisata Pujon Kidul, Kab. Malang). *Jurnal Pariwisata Terapan*. Vol.3, No.2. Hal: 124 – 135.
- Irawan, Arif. 1999. “Dampak Isu Lingkungan Terhadap Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi”, Artikel.
- ISO 14001:2015 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use. (2015). International Organization for Standardization.
- ISO 21401:2018 - Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments. (2018). International Organization for Standardization.
- Kaharuddin, dkk. 2020. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. Vol 14. Hal: 42 – 54.
- Kell, Walter G., and W.C. Boyton. 1992. “Modern Auditing”, New York: John Wiley and Sons, Inc., Fifth Edision.



- Khairunnisa, A. (2020) Implementasi Pariwisata Berkelanjutan dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perspektif Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at panels. *Tourism management*, 29(1), 180-192.
- Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Bogor: IPB.
- Luturlean, B. S. (2019). Strategi Bisnis Pariwisata. Humaniora.
<https://books.google.co.id/books?id=BVi9DwAAQBAJ>
- Machmud Syahrul, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta



- Miller, G., Rathouse, K., Scarles, C., Holmes, K., & Tribe, J. (2010). Public Understanding of Sustainable Tourism. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 627-645. doi:10.1016/j.annals.2010.02.003.
- Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13-29.
- Moore, S. A., & Durant, J. (2002). The Certification of Sustainable Tourism: A Policy Perspective. In Theobald, W. (Ed.), *Global Tourism* (pp. 389-405). Butterworth-Heinemann.
- Muljadi.2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nasikun. 1997. *Model Pariwisata Pedesaan. Permodelan Pariwisata Pedesaan untuk Membangun Pedesaan yang berkelanjutan*. Bandung: ITB
- Ninieki Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pitana, I Gde. 1999. "A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata" *Majalah Ilmiah Pariwisata- Analisis Pariwisata Vol. 2*.



Program Studi Pariwisata. Universitas Udayana.

Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali: Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad*. Denpasar: Bali Post.

Sedarmayanti, Sastrayuda, G.S., Afriza, L. 2018. *Pembangunan dan pengembangan pariwisata*. PT. Refika Aditama: Bandung

Silviana, D., Arwani, M., & Himawati, I. P. 2021. *Analisis Pengembangan Desa Wisata di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu*. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(1). pp 41-53.

Silviana, W., dan Mubarak, A. 2020. *Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan pada objek wisata Pantai Carocok Painan*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. Vol. 2, No. 3. Hal: 48 – 57.

Slamet Muljono (2008). *Jurnal Widyaprana Volume 1, No. 2 Desember 2008 . Pendidikan Lindkungan Hidup bagi pimpinan Aparatur Pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance*.

Subagiyo, A., Prayitno, G., & Kusriyanto, R. L. 2020. *Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kota Batu Indonesia*. *Jurnal*



- Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 8(2). pp 135–150.
- Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
- Suradnya, I. made (2011) ‘Strategi Pemasaran Destinasi Pariwisata Berkelanjutan’, Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi STIIE Triarma Mulya, 16(2), pp. 42–53.
- Suri, L. A. 2019. Pembangunan Obyek Wisata Berbasis Komunitas Lokal Pada Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam. Jurnal Sosiologi Andalas, 5(2), 74-86.
- Suryani, P., Jatiningsih, I.D., dan Putra, E.S. 2021. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bendungan Misterius sebagai objek wisata. Jurnal Pariwisata Parama. Vol. 2, No.1. Halaman: 39-48.
- Sutiksno, dkk. (2020). Tourism Marketing. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Teguh Kurniawan (2007). Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan di Indonesia.



- Thomson, R.P., and T.E. Simpson. 1993. "Environmental Auditing", Internal Auditor, April, P.19-22.
- Tost, L. P., & Zervas, G. (2016). The impact of environmental certifications on hotel guest preferences. *Cornell Hospitality Quarterly*, 57(4), 397-409.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Utama, I. G. B. R. (2016) Pemasaran Pariwisata. Universitas Dhayana Pura. Available at: <http://andipublisher.com/produk-0217006278-pemasaranpariwisata.html>.
- Wood, M.E. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*. UNEP.
- Wulandari, A.D., Isyandi, B., dan Ekowarso, H. 2022. Analisis tingkat partisipasi dalam



pembangunan desa di kabupaten Indragiri
Hulu. Jurnal Niara. Vol. 15, No.1.

Zuber, G.R., and C.G. Berry. 1992. "Assessing
Environmental Risk", Journal of
Accountancy, March, P.43-48.



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Supriyono, M.Si. merupakan Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret kelahiran Kabupaten Sukoharjo, 21 Februari 1960 yang menempuh pendidikan S1 Ekonomi

Pembangunan di Universitas Sebelas Maret dan lulus di tahun 1984 kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Sebelas Maret dan lulus di tahun 2008 hingga akhirnya memperoleh gelar Doktor di Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret pada tahun 2023. Dr. Supriyono, M.Si. merupakan Dosen yang aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat beberapa jurnal baik nasional maupun internasional telah dicatatkan beliau tidak lupa



juga beberapa buku juga telah di hasilkan selama menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret sebagai salah satu dosen senior yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret beliau terkenal sebagai dosen yang sangat rendah hati dan sangat mengayomi para mahasiswa. Selain aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian Dr. Supriyono, M.Si. juga aktif dalam mengabdikan pada institusi tercatat beliau pernah memegang beberapa jabatan fungsional di institusi Universitas Sebelas Maret diantaranya lain yaitu Sekretaris Komisi C Senat FEB (2015-2019), Kepala Unit Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana FEB (2020), Koordinator Bidang Perencanaan pada Badan Pengelola Usaha Fakultas (2022- Sekarang).

